

362.293  
W117  
p 4



# **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DI KALANGAN ANAK-ANAK**

## **TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan  
Penyelesaian Studi Pada Program Magister (S2)  
Ilmu Hukum UNDIP Semarang**

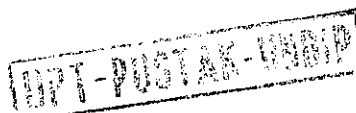
**Disusun Oleh :**

**ADIANA WINDAWATI, SH  
NIM : B4A 098 003**

**Pembimbing :**

**Prof. Dr. I.S. SUSANTO, SH**

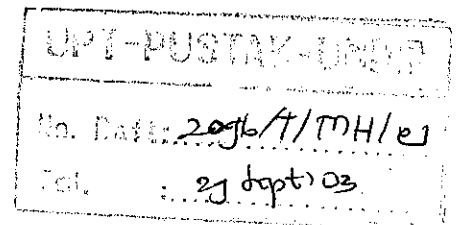
**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2003**





PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN  
PSIKOTROPIKA DI KALANGAN ANAK-ANAK

Disusun Oleh :  
ADIANA WINDAWATI, SH  
NIM : B4A 098 003



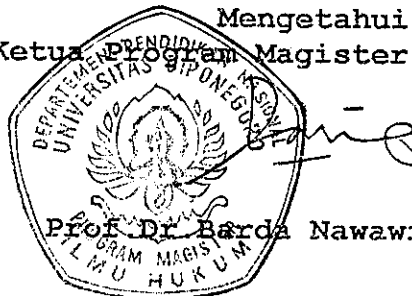
Dipertahankan Di Depan Dewan penguji  
Pada Tanggal : 18 Maret 2003

*Tesis Ini Telah Diterima Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Hukum*

Pembimbing,

Prof. Dr. I. S. Susanto, SH

Mengetahui  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH

PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2003

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (tesis) yang merupakan salah satu prasyarat penyelesaian studi pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan perkuliahan ini penulis memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Jaksa Agung RI dan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menambah wawasan berpikir dan ilmu pengetahuan melalui tugas belajar di Program Magister Ilmu Hukum Undip Semarang (Kelas Khusus Kejaksaan/Gelombang I).
2. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Undip Semarang, yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti Program Magister Ilmu Hukum serta masukan dan bimbingan.

3. Bapak Prof. Dr. I.S. Susanto, SH yang telah bersedia menjadi pembimbing penulisan tesis ini, yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, arahan dan dukungan moral dari awal sampai selesainya penulisan tesis ini.
4. Ketua Pengadilan Negeri Semarang beserta para Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberikan masukan dan data yang dibutuhkan oleh penulis.
5. Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang beserta staf yang telah memberikan masukan pada penulis.
6. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang beserta staf yang telah memberikan masukan kepada penulis.
7. Kepala Kejaksaan Negeri Semarang beserta para Jaksa Kejaksaan Negeri Semarang yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis.
8. Kasatserse Poltabes Semarang beserta para penyidik Poltabes Semarang yang telah memberikan masukan kepada penulis.
9. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP Semarang yang telah memberikan bekal pendidikan dan pengetahuan kepada penulis.
10. Sahabat-sahabat penulis dalam perkuliahan dan keluarga besar IMMA (Ikatan Mahasiswa Magister Adhyaksa) Gelombang I yang dalam perjalanan kuliah banyak

memberikan bantuan baik dukungan dan semangat dalam mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan.

11. Keluarga penulis (Suamiku tercinta Edi Saputra, SH dan Anakku Yasmine Syalilla Adinda) yang senantiasa memberikan dukungan melalui doa dan semangat kepada penulis untuk terus berjuang dalam menyelesaikan perkuliahan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna sehingga terbuka untuk kritik / saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan tulisan ini, dan penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan.

Semarang, April 2003

Penulis



ADIANA WINDAWATI, SH  
B4A 098 003

## DAFTAR ISI

Halaman judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	vi
Ringkasan .....	viii
Abstraksi.....	x
BAB I      PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	12
C. Kontribusi Penelitian.....	13
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	31
1. Pendekatan.....	32
2. Jenis dan Sumber Data.....	34
3. Teknik Pengumpulan Data.....	36
4. Teknik Analisa dan Intepretasi Data.....	38
5. Teknik Pengecekan Keabsaahan Data.....	40
G. Sistematika Penulisan.....	42
BAB II     TINJAUAN PUSTAKA.....	43
A. Penegakan Hukum.....	43
B. Psikotropika.....	50
1. Sejarah Perkembangan Psikotropika.....	50
2. Pengertian dan Penggolongan Psiko-	
tropika.....	51
3. Dampak Negatif Psikotropika.....	53
4. Peraturan Perundang-undangan Yang Mengatur	
Psikotropika.....	56
C. Kejahatan Anak.....	62
D. Perkembangan Pemikiran Kriminologi.....	67
BAB III    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	86
A. Birokrasi dan Mekanisme Penegakan Hukum	
Penyalahgunaan Psikotropika di Kalangan Anak-	
anak.....	86
1. Birokrasi yang Terlibat.....	86
a. Kepolisian.....	88
b. Kejaksaan.....	90
c. Pengadilan.....	91
d. Balai Pemasyarakatan.....	92
e. Lembaga Pemasyarakatan Anak.....	93
2. Mekanisme Penegakan Hukum.....	94
a. Tahap Penyidikan.....	96

b. Tahap Penuntutan.....	98
c. Tahap Pemeriksaan di Persidangan.....	106
d. Tahap Pemasyarakatan.....	110
B. Kendala yang Dihadapi dan Persoalan yang Timbul.....	112
1. Kendala yang Dihadapi.....	112
a. UU No.5 Thn 1997 ttg Psikotropika.....	112
b. UU No.3 Thn1997 ttg Peradilan Anak.....	118
2. Persoalan yang Muncul.....	121
a. Pelaku yang Masih Anak-anak.....	121
b. Pelaku Sebagai Korban.....	121
1). Menimbulkan Dampak Pada Org Lain.....	123
2). Dampak pada Diri Sendiri.....	128
c. Pelaku Sebagai Korban SPP.....	132
1). Akibat dari Penyimpangan Aparat Penegak Hukum.....	135
2). Akibat Penegakan Hukum Itu Sendiri.....	139
C. Persepsi Penegak Hukum Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika Di Kalangan Anak.....	144
D. Kritik Terhadap Penegakan Hukum Penyalahgunaan Psikotropika Di Kalangan Anak.....	149
1. Kritik Terhadap Perundang-undangan.....	151
2. Kritik Terhadap Penegak Hukum.....	153
a. Penyidik.....	153
b. Jaksa Penuntut Umum.....	153
c. Hakim.....	155
d. Bapas.....	155
e. Lembaga Pemasyarakatan.....	156
3. Kritik Terhadap Fasilitas Pendukung.....	156
4. Kritik Terhadap Masyarakat.....	157
 BAB IV      PENUTUP.....	158
A. Kesimpulan.....	158
B. Saran.....	162
 Daftar Pustaka .....	166

## RINGKASAN

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak, memiliki kekhususan apabila dibandingkan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana psikotropika yang pelakunya dewasa. Kekhususan ini berkaitan dengan status pelaku tindak pidana yang masih anak-anak. Status anak-anak membawa konsekuensi pada perbedaan-perbedaan pada hukum acara dan pemidanaan, antara lain : melibatkan Petugas Pemasyarakatan dalam setiap tahap pemeriksaan serta setelah terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terpidana anak dimasukkan dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Keberadaan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dengan UU No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak belum ada kesesuaian khususnya menyangkut pedoman pemidanaannya. Hal ini merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak, antara lain menyangkut penerapan hukum. Penerapan hukum yang dimaksudkan di sini adalah kesulitan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut dan Hakim untuk memutus ketika terdakwa anak didakwakan dengan pasal UU Psikotropika golongan I yang mengatur tentang ancaman pidana minimum. Padahal dalam UU Peradilan anak hanya diatur tentang Hakim tidak boleh memutus lebih dari setengah dari ancaman maksimum, sedangkan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut belum ada pedomannya.

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak juga menimbulkan persoalan-persoalan sebagai berikut : pelaku yang masih anak-anak yang secara hukum dianggap belum dewasa sehingga pertanggungjawabannya dalam hal melakukan suatu tindak pidana juga masih mendapatkan kekhususan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, pelaku kejahatan anak juga sebagai korban yakni sebagai akibat dari tindakan menggunakan psikotropika yang dilakukan tanpa disadari oleh pertimbangan akan akibat yang dapat ditimbulkan atas perbuatannya baik akibat terhadap pelaku sendiri maupun akibat lebih lanjut dari perbuatannya yang dapat merugikan orang lain, pelaku kejahatan anak juga sebagai korban SPP karena terdapat adanya kemungkinan SPP sendiri menjadi faktor kriminogen, maka dengan sendirinya SPP dapat dianggap sebagai salah satu sumber permasalahan, SPP tidak sekedar dilihat sebagai "social problem" yang sama dengan kejahatan itu sendiri, bahkan tidak jarang dijumpai bahwa orang menjadi jahat karena masalah "stigma" atau



"dinyatakan" jahat oleh SPP, meskipun belum tentu yang bersangkutan benar-benar penjahat.

Di sisi lain berbicara tentang penegakan hukum, maka pembicaraan tidak luput dari aparat penegak hukum sebagai pelaksana juga mengalami tekanan-tekanan dari berbagai pihak yang tidak mudah untuk dihindari, antara lain datang dari keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang berusaha mempengaruhi bekerjanya penegakan hukum, disamping ia sendiri juga mempunyai persepsi tersendiri terhadap masalah yang ditanganinya. Persepsi penegak hukum tentang penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak lebih banyak menyoroti pada keterbatasan Undang-undang yang kurang memperhatikan kepentingan masa depan anak. Namun demikian para penegak hukum merasa tidak dapat berbuat banyak mengingat ketentuan-ketentuan organisatoris yang membelenggu.

Sedangkan kualitas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak tidak terlepas dari kritik-kritik yang ditujukan terhadap penegakan hukum itu sendiri, antara lain : kritik terhadap perundang-undangan yakni UU No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika yang memuat ancaman pidana minimum yang merupakan hal yang baru di luar KUHP, sementara dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak diatur pedoman bagi Hakim tidak boleh memutus lebih dari setengah ancaman maksimum, namun tidak ada pedoman bagi Hakim untuk memutus dengan adanya ancaman pidana minimum tersebut, kemudian kritik terhadap penegak hukum ketika menangani perkara anak dimana UU tentang Peradilan Anak sangat melindungi sisi-sisi kepentingan anak, ternyata implementasi perlindungan anak hingga kini belum sepenuhnya terpenuhi karena banyak penyimpangan yang dilakukan dalam tiap tahap pemeriksaan, selanjutnya kritik terhadap fasilitas pendukung di mana UU Peradilan Anak menjamin bahwa dalam setiap tahap pemeriksaan perkara anak, tersangka anak harus mendapatkan jaminan terpenuhinya kebutuhan baik fisik maupun sosial, namun demikian pada kenyataannya jaminan-jaminan tersebut tidak semuanya terpenuhi, dan terakhir adalah kritik terhadap masyarakat di mana masyarakat sering memberikan stigma negatif terhadap anak-anak yang terjebak pada penyalahgunaan psikotropika yang terhadapnya sedang dikenakan proses pemidanaan, meskipun seorang anak yang sedang dalam proses pemeriksaan belum tentu bersalah.

## ABSTRAK

Penyalahgunaan Psikotropika saat ini sudah merambah ke dunia anak-anak, sehingga pemerintah berusaha secara serius dalam pemberantasan tindak pidana psikotropika.

Bicara tentang penegakan hukum, maka pembicaraan selalu dihubungkan dengan kenyataan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum itu. Selama ini keberadaan UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, kurang mensosialisasi di kalangan masyarakat, yang berharap agar terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika dapat dikenakan hukuman setinggi-tingginya.

Di sisi lain, dengan diterapkannya ketentuan khusus UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang memuat ancaman pidana minimum terhadap pelaku kejahatan anak banyak menimbulkan persoalan dalam penerapannya sehingga tidak berarti menjadi garansi keberhasilan, karena pelaku kejahatan anak sebenarnya juga merupakan bagian dari korban yang juga mendapatkan perlindungan secara hukum seperti yang diatur dalam UU No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Di sisi lain penegak hukum juga mengalami tekanan-tekanan dari berbagai pihak yang tidak mudah untuk dihindari yang berusaha mempengaruhi bekerjanya penegakan hukum, disamping penegak hukum sendiri juga mempunyai persepsi tersendiri terhadap masalah yang ditanganinya.

Bertolak dari pemikiran tersebut di atas, dengan menggunakan analisa kriminologi kritis, melalui tesis ini dikemukakan fenomena penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak.

ABSTRACT  
LAW ENFORCEMENT ON ABUSE OF PSYCHOTROPIC  
AMONG CHILDREN  
(By : ADIANA WINDAWATI, SH)

Abuse of Psychotropic in this time have stepped into children world, until the government have to tried seriously in eradication of psychotropic crime.

Talk about law enforcement, then the discussion is always be related to fact that faced in law enforcement process itself. During this time, the existence of Acts Number 5 Year 1997 about Psychotropic and Acts Number 3 Year 1997 about Jurisdiction of Child, less socialization among society that have hoping to perpetrator abuse of psychotropic could be punishable by the highest punishment.

On the other side, applied of special rule of Acts Number 5 Year 1997 about Psychotropic that loading minimum crime to perpetrator of child have appeared many problems in its applying, then is meaningless become a succesfull guarantee, because perpetrator of child in fact is also constitute the part of victim which also get ptotection judicially is such as arranged in Acts Number 3 Year 1997 about Jurisdiction of Child. On the other side, the law enforcer is also have experienced of presures from many sides which do not easy to be avoided, that tried to influence the law enforcement process, beside the law enforcer have separate perception to be handled the problem itself.

Commencing with the thought above, with the use of ctritical criminology analysis, there put forward through this thesis is told the phenomenon of law enforcement abuse of psychotropic among children.

## BAB I

### P E N D A H U L U A N

#### A. Latar Belakang.

Seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat juga semakin meningkat. Peningkatan taraf hidup masyarakat dengan didukung oleh semakin canggihnya ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) juga semakin menambah kompleksnya permasalahan.

Upaya penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul tersebut tentu saja juga tidak semakin mudah tetapi justru sebaliknya yakni semakin pelik dan rumit. Keadaan yang demikian juga terjadi dalam dunia kejahatan.

Tindak pidana yang terjadi sekarang, juga mengalami pergeseran dari yang sederhana menjadi sangat kompleks. Dari kejahatan warungan (kecil-kecilan), menjadi kejahatan yang terorganisasi(modern). Dengan demikian peningkatan kejahatan tidak saja terbatas pada kuantitasnya, tetapi juga kualitasnya. Dari data yang ada di pengadilan terjadi peningkatan sidang perkara anak.

Hal yang sama juga terjadi dalam hal penyalahgunaan psikotropika. Penyalahgunaan psikotropika yang memiliki

spektrum dampak yang luas, ternyata kini telah merambah ke dunia anak-anak.

Berbicara tentang anak, maka terdapat beberapa pemahaman. Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak biasanya didasarkan atas tingkatan umur. Namun demikian adapula yang mendasarkan pada pendekatan psikososial.

Pengertian anak di sini termasuk juga remaja, karena dalam konteks hukum peristilahan remaja kurang lazim dipergunakan. Dalam perundang-undangan biasa disebutkan dengan istilah anak, belum dewasa (minder jarig), belum cukup umur, dan sebagainya.

Pendekatan yang didasarkan atas umur/usia terdapat berbagai variasi. Di Amerika Serikat, 27 Negara Bagian menentukan batas umur antara 8-18 th, sementara 6 Negara Bagian menentukan batas umur 8-17 th, ada pula bagian lain yang menentukan batas umur antara 8-16 th. Di Inggris ditentukan batas umur antara 12-16 th. Di Australia ditentukan 8-16 th. Di Belanda ditentukan antara umur 12-18 th. Di negara-negara Asia antara lain Srilangka menentukan batas umur antara 8-16 th. Di Jepang antara 14-20 th. Sedangkan di negara-negara Asean antara lain Philipina menentukan 7-16 th. Di

Malaysia 7-16 th.<sup>1</sup> Sedangkan di Indonesia sendiri berdasarkan ketentuan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak ditetapkan antara usia 8-18 tahun.

Sementara batasan anak yang didasarkan aspek psikososial, klasifikasi perkembangan anak hingga dewasa dikaitkan dengan usia dan kecenderungan kondisi kejiwaannya.<sup>2</sup>

Perkembangan usia anak hingga dewasa dapat diklasifikasikan menjadi lima, yaitu a) anak, seorang yang berusia di bawah 12 tahun; b) remaja dini, seseorang yang berusia 12-15 tahun; c) remaja penuh, seseorang yang berusia 17-21 tahun e) dewasa, seseorang yang berusia di atas 21 tahun.

Masing-masing tingkatan usia mempunyai karakteristik kejiwaan sendiri-sendiri. Paulus Hadisuprpto mengatakan bahwa remaja dini (usia 12-15) memiliki kecenderungan kejiwaan antara lain : a) sibuk menguasai tubuhnya, karena ketidakseimbangan postur tubuhnya, kekurangnyamanan tubuhnya; b) mencari identitas dalam keluarga, satu pihak menjurus pada sifat egosentris, pada lain pihak belum bisa sepenuhnya disertai tanggungjawab, sehingga ia sangat memerlukan daya

---

<sup>1</sup> Sri Widowati Soekito, dalam Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency, Pemahaman Dan Penanggulannya*, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.8.

<sup>2</sup> Singgih Gunarso, dalam *Ibid*.

tampung dari lingkungan keluarganya; c) kepekaan sosial tinggi, solidaritas pada teman tinggi dan besar kecenderungan mencari popularitas. Dalam fase ini ia sibuk mengorganisasikan dirinya, mulai mengalami perubahan dalam sikap, minat, pola-pola hubungan pertemanan, mulai timbul dorongan seksual, bergaul dengan lain jenis; d) minat keluar rumah tinggi, kecenderungan untuk *trial and error* tinggi, dan kemauan untuk belajar dari pengalamanpun tinggi; e) mulai timbul usaha-usaha untuk menguasai diri baik di lingkungan rumah, sekolah, klub olah raga, kesenian, dan di lingkungan pergaulan pada umumnya. Sementara pada tahapan remaja lanjut, ciri-ciri melekat padanya ialah :

- a) sudah mulai menampakkan dirinya mampu dan bisa menerima kondisi fisiknya;
- b) mulai dapat menikmati kebebasan emosionalnya;
- c) mulai mampu bergaul;
- d) sudah menemukan identitas dirinya;
- e) mulai memperkuat penguasaan diri dan menyesuaikan perilakunya dengan norma-norma keluarga dan kemasyarakatan dan
- f) mulai secara perlahan-lahan meninggalkan reaksi-reaksi dan sikap-sikap kekanak-kanakan.<sup>3</sup>

Dengan demikian seseorang yang dikategorikan masih dalam usia anak, secara psikologis belum memiliki

---

<sup>3</sup> Singgih Gunarso, dalam *Ibid.*

kematangan maupun kedewasaan dalam berpikir, berperilaku dan bersikap tindak, atau dengan kata lain kondisi kejiwaannya masih labil. Dalam kondisi yang demikian tentu akan semakin buruk ketika dipengaruhi oleh psikotropika. Disamping itu mereka juga tidak mengetahui dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh psikotropika tersebut.

Padahal dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan psikotropika sangat kompleks. Kompleksitas yang ditimbulkan tidak saja bagi korban tetapi juga bagi pelaku sendiri. Oleh sebab itu tidak berlebihan kiranya bila sebagian kalangan menganggap bahwa bahaya yang dapat ditimbulkan oleh penyalahgunaan psikotropika dapat mengancam eksistensi suatu peradaban bangsa.

Ungkapan terakhir sebenarnya tidak berlebihan karena dalam hal terjadi tindak pidana psikotropika di kalangan anak, maka pelaku tindak pidana psikotropika tersebut selain sebagai pelaku, yang bersangkutan sebenarnya juga menjadi korban. Sebagai pelaku karena memang dia melakukan tindak pidana yaitu tindak pidana psikotropika, dan sebagai korban, karena yang bersangkutan memang menjadi korban dari tindak pidana psikotropika sebelumnya disamping ia sendiri menjadi korban dari psikotropika itu sendiri.



Sementara korban dari pelaku penyalahgunaan psikotropika tidak hanya terhenti pada lapis satu, atau dua, bahkan mungkin akan terus berdampak dalam beberapa generasi.<sup>4</sup>

Dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Hawari antara lain disebutkan bahwa penyalahgunaan psikotropika menimbulkan dampak antara lain merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar, ketidakcakapan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, perubahan perilaku menjadi anti sosial, merosotnya produktivitas kerja, gangguan kesehatan, mempertinggi kecelakaan lalu lintas, menimbulkan kriminalitas, dan meningkatnya tindakan kekerasan lainnya baik kuantitatif maupun kualitatif.<sup>5</sup>

Mengingat begitu besarnya bahaya yang dapat ditimbulkan oleh penyalahgunaan psikotropika, maka tidak berlebihan kiranya bila pemerintah berusaha secara serius dalam pemberantasan tindak pidana psikotropika.

---

<sup>4</sup> Yang dimaksud dengan lapis satu, lapis dua dan lapis tiga, dst tersebut adalah berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan oleh zat adiktif yang terkandung dalam psikotropika yang dapat merusak susunan syaraf manusia secara fisik dan juga berdampak secara psikis. Generasi yang dihasilkan dari pelaku tersebut maupun mereka yang dibesarkan dalam lingkungan yang demikian cenderung akan mengalami perkembangan psikososial yang menyimpang. Dengan demikian dampak yang ditimbulkan tidak hanya terhenti pada pelaku tetapi juga generasi yang dihasilkannya.

<sup>5</sup> Hawari, Antisipasi Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Alkohol dan Zat Adiktif lainnya (Aspek Medik, Psikososial dan Psikoreligius), dalam Mari Bersatu Memberantas Bahaya Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, PD.Dharma Bakti, Jakarta, Desember 1999.

Apabila pemahaman hanya didasarkan atau bertolak dari sifat bahaya yang dapat ditimbulkan oleh penyalahgunaan psikotropika terhadap masyarakat, maka ketentuan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang menggunakan ancaman pidana minimum dapat dimengerti, sebagaimana diatur dalam pasal 59 yang berbunyi;

- (1) Barang siapa:
  - a. Menggunakan ppsikotropika golongan I selain dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), atau
  - b. Memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, atau
  - c. Mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3); atau
  - d. Mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan, atau
  - e. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I.Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Ancaman pidana minimum ini tentu saja tidak sekedar dimaksudkan untuk memberikan hukuman yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana,

tetapi juga diharapkan memberikan *deterrent effect* kepada masyarakat luas untuk tidak melakukan perbuatan serupa.

Namun demikian perlu juga dipertimbangkan, apakah terhadap pelaku kejahatan psikotropika yang dilakukan oleh anak-anak juga harus diterapkan dengan ancaman hukuman yang sangat tinggi tersebut.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terdapat beberapa ketentuan khusus yang berkaitan dengan peradilan terhadap pelaku tindak pidana yang masih berusia anak-anak. Ketentuan khusus tersebut antara lain siapa yang berhak menangani tindak pidana anak (petugas-petugas khusus); adanya pembimbing dari kemasyarakatan, pekerja sosial maupun pekerja sosial sukarela; suasana persidangan; pemeriksaan tertutup; hakim tunggal; masa penahanan yang lebih singkat; hukuman yang lebih ringan.

Namun demikian dengan diterapkannya ketentuan khusus tersebut terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak, tidak berarti menjadi garansi keberhasilan.

Bicara tentang penegakan hukum, maka pembicaraan selalu dihubungkan dengan kenyataan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum itu. Satjipto Rahardjo mengatakan

bahwa penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataan, maka proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.<sup>6</sup>

Selama ini keberadaan UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, kurang mensosialisasi di kalangan masyarakat, yang berharap agar terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika dapat dikenakan hukuman setinggi-tingginya.

Di sisi lain, dengan diterapkannya ketentuan khusus UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang memuat ancaman pidana minimum terhadap pelaku kejahatan anak banyak menimbulkan persoalan dalam penerapannya karena keberadaan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dengan UU No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak belum ada kesesuaian, khususnya menyangkut pedoman pembedaannya. Hal ini merupakan salah satu kendala yang

---

<sup>6</sup> Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru Bandung, hal 23-24.

dihadapi dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak, antara lain menyangkut penerapan hukum. Penerapan hukum yang dimaksudkan di sini adalah kesulitan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut dan Hakim untuk memutus ketika terdakwa anak didakwakan dengan pasal UU Psikotropika golongan I yang mengatur tentang ancaman pidana minimum. Padahal dalam UU Peradilan anak hanya diatur tentang Hakim tidak boleh memutus lebih dari setengah dari ancaman maksimum, sedangkan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut belum ada pedomannya.

I.S. Susanto menyatakan kualitas penegakan hukum dipengaruhi antara lain oleh perundang-undangnya, yang pada dasarnya terhadap undang-undang itu perlu dikaji tentang substansinya, yakni seberapa jauh cacat yang dimilikinya, seperti kepentingan-kepentingan apa yang ada di balik undang-undang, siapa atau kelompok masyarakat mana yang akan memperoleh keuntungan atau manfaat lebih besar dari peraturan atau sebaliknya siapa yang akan dirugikan, apakah Undang-undang tersebut cukup adil, apakah sanksinya memadai dan manusiawi, dan sebagainya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> I.S.Susanto, Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial, Dalam Masalah-masalah Hukum, Majalah Hukum Undip No.9 Tahun 1992, hal.17.

Di sisi lain berbicara tentang penegakan hukum, maka pembicaraan tidak luput dari aparat penegak hukum sebagai pelaksana juga mengalami tekanan-tekanan dari berbagai pihak yang tidak mudah untuk dihindari, antara lain datang dari keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang berusaha mempengaruhi bekerjanya penegakan hukum, disamping ia sendiri juga mempunyai persepsi tersendiri terhadap masalah yang ditanganinya.

Penegakan hukum juga tidak bisa lepas dari bekerjanya suatu sistem peradilan pidana dalam konteks tertentu. Demikian pula dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak. Permasalahan tidak hanya terhenti begitu saja ketika para penegak hukum telah menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, tetapi lebih jauh dari itu, apakah penegakan hukum tersebut sudah menjadi satu-satunya penyelesaian terbaik.

Di sisi lain sebagai bagian dari subsistem sosial para penegak hukum tentu saja bukan merupakan robot hukum semata, tetapi juga merupakan individu-individu yang mempunyai kehendak, yang masing-masing mempunyai persepsi yang tidak selalu sama dalam menyikapi suatu permasalahan. Sehingga sudah barang tentu akan menghasilkan sesuatu yang tidak selamanya sama pula,

meskipun atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang sama.

Bahkan realitas sosial tidak sedikit pula pengaruhnya dalam mengkonstruksikan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak ini. Apalagi kalau dipahami bahwa tindak pidana anak atau juvenile delinquency<sup>8</sup> bukan merupakan suatu tindak pidana yang berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu akibat lanjutan dari sebuah realitas sosial.

Bertolak dari uraian tersebut di atas, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak ternyata bukan merupakan permasalahan yang sederhana, sehingga hal tersebut di atas sangat menarik untuk diteliti.

#### B. Permasalahan.

Dengan mengacu pada judul penelitian yaitu "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika Di Kalangan Anak-anak" dan latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini permasalahan utama adalah:

---

<sup>8</sup> Bahwa secara etimologis Juvenile Delinquency diartikan sebagai kejahatan anak, bandingkan dengan Robert G. Trojanowics dan Merry Morash dalam bukunya Juvenile Delinquency, Concept and Control, Shaw and Mc.Kay, dalam bukunya Juvenile Delinquency Behaviour, dalam Juvenile Delinquency Pemahaman Dan Penanggulangannya, Paulus Hadisuprpto, Penerbit PT.Citra Aditya, Bandung, 1997.

Bagaimanakah penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak ?

Dari masalah tersebut maka persoalan-persoalan yang akan dikaji antara lain:

- a. Bagaimanakah bekerjanya birokrasi dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak?
- b. Birokrasi apa saja yang terlibat dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak?
- c. Kendala-kendala dan persoalan-persoalan apa yang muncul dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak?
- d. Bagaimanakah persepsi penegak hukum dalam penyelesaian penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak?
- e. Kritik apa saja yang muncul dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak?

### C. Kontribusi Penelitian.

Kontribusi penelitian terdiri dari:



1. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak.
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala pikir dan menjadi bahan masukan terhadap penyelesaian penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak.

#### D. Tujuan Penelitian.

Selain berusaha untuk pengembangan substansi bidang ilmu, dengan bertitik tolak dari pokok permasalahan sebagaimana telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bekerjanya birokrasi dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak.
2. Untuk mengetahui birokrasi yang terlibat dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala dan persoalan-persoalan yang muncul dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak.

4. Untuk mengetahui persepsi penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak.
5. Untuk dapat memberikan kritik dan pandangan secara kritis dalam proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak.

#### E. Kerangka Teori.

Bertolak dari pemikiran Weber yang menempatkan faktor solusi non-hukum sebagai independen variable yang berarti memahami hukum sebagai mekanisme kontrol sosial, Parson melalui karyanya yang berjudul "The Law and Social Control" sampai pada konklusi bahwa fungsi utama dari sistem hukum bersifat integratif<sup>9</sup> karena dimaksud untuk mengatur, memelihara dan menjaga hubungan-hubungan sosial dalam suatu sistem sosial, agar dapat secara efektif menyelenggarakan fungsi integrasi ini, menurut Parson ada 4 (empat) masalah dasar yang perlu mendapat elaborasi secara tepat dalam suatu sistem hukum yaitu:

- 1) masalah legitimasi, menyangkut landasan penataan aturan-aturan hukum;

---

<sup>9</sup> Sebelum sampai pada kesimpulan yang demikian terlebih dahulu Parson menganalisa syarat fungsional suatu sistem yakni : 1) Pencapaian tujuan yang khas yang terkait dengan politik suatu organisasi sosial, 2) Adaptasi yang terkait dengan sub sistem ekonomi, 3) Integrasi meliputi piranti untuk menjalin hubungan koordinatif, meminimalisir konflik seperti hukum, administratif dan adat kebiasaan, dan 4) Pemeliharaan pola sebagai manajemen konflik, elaborasi yang relatif lengkap tentang hal ini dapat dilihat, Tom Campbell, Tujuh Teori Sosial (Sketsa Penilaian Dan Perbandingan), Kanisius, Yogyakarta, 1994.

- 2) masalah intepretasi, menyangkut hak dan kewajiban dalam proses penerapan aturan hukum;
- 3) masalah sanksi baik jenis maupun lembaga yang menerapkannya; dan
- 4) masalah yurisdiksi, menyangkut kewenangan penegakan norma-norma hukum.<sup>10</sup>

Karena sebagaimana dipahami oleh pengembang doktrin "social engineering by law"<sup>11</sup>, perubahan yang hendak dicapai hanya mungkin dilakukan dengan cara memanipulasi keputusan-keputusan yang akan diambil oleh individu dan mengarahkannya pada tujuan yang dikehendaki. Dalam rangka itu pula suatu aturan hukum tergolong terencana dan teratur apabila memenuhi 4 (empat) asas yaitu:

- 1) penggambaran yang baik dan situasi yang dihadapi;
- 2) analisa terhadap penilaian penilaian dan menentukan jenjang nilai-nilai;
- 3) verifikasi dari hipotesa-hipotesa; dan
- 4) adanya pengukuran terhadap efek dari UU yang berlaku.<sup>12</sup>

Karena yang menjadi sasaran dalam proses social engineering by law menggerakkan tingkah laku agar mencapai keadaan yang dikehendaki, Chambliss dan Seidman

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Istilah ini dikemukakan oleh Seidman "To promote economic, development, government must rely upon the law, for the legal order is the filter through which policy becomes practice", dengan demikian hukum dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan pratikal, oleh sebab itu hubungan kausal antara sarana yang dipakai dan tujuan yang ingin dicapai merupakan masalah lama, Lihat Satjipto Raharjo, Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1977, hal 65.

<sup>12</sup> Prasyarat tersebut dikemukakan oleh Pedgorecki dalam Satjipto Raharjo, Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1977, hal 66.

mensyaratkan proses pelebagaan hukum sebagai indikator efektivitas bagi pencapaian tujuan-tujuan dimaksud dan demikian pula sebaliknya.<sup>13</sup> Karena bagaimanapun juga dalam rangka pencapaian tujuan hukum, yang terpenting adalah hasil substantif serta tanggung-jawab yang efektif.

Mengikuti Weber, Merton (1957; 195-196) mengamati beberapa hal berikut di dalam organisasi birokrasi modern:<sup>14</sup>

1. Birokrasi merupakan struktur sosial yang terorganisir secara rasional dan formal.
2. Meliputi suatu pola kegiatan yang memiliki batas-batas jelas.
3. Kegiatan-kegiatan tersebut secara ideal berhubungan dengan tujuan-tujuan organisasi.
4. Jabatan-jabatan dalam organisasi diintegrasikan ke dalam keseluruhan struktur birokratis.
5. Status-status dalam birokrasi tersusun ke dalam susunan yang bersifat hierarkhis.
6. Berbagai kewajiban serta hak-hak di dalam birokrasi dibatasi oleh aturan-aturan yang terbatas serta terperinci.
7. Otoritas pada jabatan, bukan pada orang.
8. Hubungan-hubungan antar orang dibatasi secara formal.

Model analisa fungsional Merton merupakan hasil perkembangan pengetahuan yang menyeluruh tentang ahli

---

<sup>13</sup> Philip Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition, toward Responsive Law*, Harpa & Raw, 1978.

<sup>14</sup> Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, diterjemahkan oleh Tim Penerjemah, Yasmaga Edisi I, Cetakan ke-4, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 1994, hal.31.

teori klasik. Dia menggunakan penulis-penulis besar seperti Max Weber, William I. Thomas dan E. Durkheim sebagai dasar dari karyanya.<sup>15</sup> Di permukaan mungkin terlihat bahwa Merton sendiri tidak memiliki suatu teori yang bulat, mengingat ia hanya menulis esei-esei yang mencoba menyempurnakan berbagai aspek tulisan-tulisan klasik. Akan tetapi di dalam keseluruhan tulisan-tulisannya kita menemukan suatu tema yang menonjol yaitu, "arti pentingnya memusatkan perhatian pada struktur sosial dalam analisa sosiologis".<sup>16</sup> Merton tidak berhenti dengan deskripsi tentang struktur, akan tetapi terus membahas kepribadian sebagai produk organisasi struktural tersebut. Struktur birokratis memberi tekanan terhadap individu sehingga mereka menjadi "disiplin, bijaksana, metodis".<sup>17</sup>

Merton mengutip tiga postulat yang terdapat dalam analisa fungsional yang kemudian disempurnakan satu demi satu. Postulat pertama, kesatuan fungsional masyarakat

---

<sup>15</sup> Mengenai pembahasan Merton bersandar pada para ahli sosiologi Eropa Klasik, lihat Coser (1975). Coser mengomentari usaha Merton, mengingat banyak suara yang membicarakan tetapi secara khusus tidak pernah menghargainya. Merton berhasil mewariskan kepada kita bangunan ide-ide Eropa dan Amerika yang bersegi banyak dan penuh warna, yang dicoba untuk dituangkan ke dalam karya-karyanya dengan memanfaatkan ide-ide tersebut bagi tujuan kreatifnya sendiri, Poloma, Ibid.

<sup>16</sup> Poloma, Ibid.

<sup>17</sup> Tetapi tekanan ini kadang-kadang menjurus pada kepatuhan mengikuti aturan secara membabi buta tanpa mempertimbangkan tujuan dan fungsi-fungsi untuk apa aturan itu pada mulanya dibuat. Walaupun aturan-aturan tersebut dapat berfungsi bagi efisiensi organisasi, tetapi aturan-aturan yang demikian dapat juga memberikan fungsi negatif dengan menimbulkan

yang dapat dibatasi sebagai suatu keadaan di mana seluruh bagian dari sistem sosial bekerja sama pada suatu tingkat keselarasan atau konsistensi internal yang memadai, tanpa menghasilkan konflik yang berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau diatur. Postulat kedua, fungsionalisme universal bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif. Postulat ketiga, dalam setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan, ide obyek materiel, dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan, dan merupakan bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan.<sup>18</sup>

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana

---

kepatuhan yang berlebihan, hal ini menimbulkan konflik antara birokrat dan orang-orang yang harus dilayani.

<sup>18</sup> Poloma, Ibid.

penegakan hukum itu dijalankan. Secara sosiologis, maka pembicaraan selalu dihubungkan dengan kenyataan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum itu. Dalam kenyataan, maka proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.<sup>19</sup>

Menurut I.S. Susanto, paling tidak ada empat dimensi yang dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum, yaitu disamping undang-undangnya, maka penegakan hukum secara konkrit melibatkan pelanggar hukum, korban (masyarakat) dan aparat penegak hukum, di dalam suatu hubungan yang bersifat saling mempengaruhi dan berlangsung dalam wadah struktur, politik, sosial, ekonomi dan budaya pada suatu situasi tertentu.<sup>20</sup>

Lebih lanjut I.S. Susanto menyatakan bahwa pada dasarnya terhadap Undang-undang itu perlu dikaji tentang substansinya, yakni seberapa jauh cacat yang dimilikinya, seperti kepentingan-kepentingan apa yang ada di balik Undang-undang, siapa atau kelompok masyarakat mana yang akan memperoleh keuntungan/manfaat lebih besar dari peraturan atau sebaliknya yang akan

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar baru Bandung, tt. Hal. 23-24.

<sup>20</sup> I.S. Susanto, Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial, Op. cit, hal. 17.

dirugikan, apakah Undang-undang tersebut cukup adil, apakah sanksinya memadai dan manusiawi dan sebagainya.<sup>21</sup>

Dimensi pelanggar hukum antara lain menyangkut pandangan atau persepsi pelanggar terhadap Undang-undang, korban/masyarakat dan aparat penegak hukum maupun bekerjanya hukum. Sementara dimensi korban antara lain menyangkut persepsinya tentang apa yang dipandang sebagai kejahatan dan penegak hukum, kepentingan-kepentingan apa yang dipandang sebagai kejahatan dan penegak hukum, kepentingan-kepentingan yang ada, kesadaran dan sikap korban terhadap hak-haknya.<sup>22</sup>

Dimensi aparat penegak hukum berkaitan dengan kepentingan-kepentingan dan hal-hal lain yang melatarbelakangi tindakan mereka, baik sebagai individu maupun sebagai organisasi dalam interaksinya dengan pelanggar, korban, dan masyarakat pada umumnya sehingga menghasilkan penegakan hukum yang bersifat selektif.<sup>23</sup>

Lebih lanjut I.S. Susanto mengemukakan bahwa dimensi aparat penegak hukum dan peranannya dalam penegakan hukum sangat menonjol, khususnya polisi yang merupakan aparat penegak hukum yang berada paling depan dalam

---

<sup>21</sup> I.S. Susanto Pemahaman Kritis terhadap Realitas Sosial, Dalam Masalah-Masalah Hukum, Majalah FH UNDIP No. 9 tahun 1992, hal. 17.

<sup>22</sup> I.S. Susanto, Ibid.

<sup>23</sup> I.S. Susanto, Ibid.



sistem peradilan pidana, artinya ditangan polisilah mesin formal hukum mulai digerakkan. Ciri utama dari penegakan hukum adalah dimilikinya diskresi oleh aparat penegak hukum, maksudnya Polisi memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan yang bersifat individuil, yaitu bagaimana dan kapan mereka memenuhi kewajiban dan berkaitan dengan tugasnya. Terhadap pelanggaran hukum yang ditemuinya, Polisi dapat memberi teguran, memanggil, mendamaikan, mengusut, menahan atau bahkan tidak mengambil tindakan sama sekali atau membiarkan. Dengan demikian polisi memiliki keleluasaan untuk bertindak atau tidak, begitu pula dalam bertindak dia memiliki keleluasaan dalam memilih tindakan yang akan diambil. Namun adalah keliru apabila kita menyamakan diskresi ini dengan kesewenang-wenangan atau berbuat sekehendak hati Polisi. Lebih-lebih bila diingat bahwa ciri organisasi Polisi adalah sifatnya yang hierarkhis dan semi militer, yakni ditandai dengan sistem atasan bawahan yang agak ketat dan komando serta bersifat birokratis.<sup>24</sup>

Mengenai pengadilan, bahwa sebagai suatu organisasi yang disusun secara rasional, pengadilan tidak luput dari melakukan tindakan-tindakan yang didasarkan pada

---

<sup>24</sup> Ibid.

pertimbangan-pertimbangan yang lazim dilakukan oleh organisasi. Pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah; 1) berusaha untuk mendapatkan hal-hal yang menguntungkan organisasinya sendiri sebanyak mungkin; 2) berusaha untuk menekan sampai kepada batas-batas minimal beban-beban yang akan menekan dan menghambat organisasinya.<sup>25</sup>

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum diperlukan berbagai organisasi, yang sekalipun pada hakekatnya bertugas untuk mengantarkan orang kepada tujuan-tujuan hukum, namun masing-masing tetap berdiri sendiri sebagai badan yang sedikit banyak bersifat otonom. Sekalipun kehadiran lembaga-lembaga hukum tersebut adalah untuk mewujudkan sesuatu yang abstrak menjadi kenyataan, namun lembaga-lembaga itu sendiri diikat oleh hukum-hukum kehidupan kelembagaan. Dalam keadaan yang demikian itu, maka dalam penegakan hukum, lembaga tersebut sibuk sendiri-sendiri untuk mengatasi masalah-masalah yang menyangkut bekerjanya sebagai suatu lembaga.<sup>26</sup>

Sementara itu Chambliss dan Seidman, menyatakan:<sup>27</sup>

Suatu organisasi dan anggota-anggotanya cenderung untuk menggantikan tujuan-tujuan serta kaidah-kaidah organisasi yang resmi dengan kebijakan-kebijakan serta kegiatan-kegiatan yang secara terus menerus

---

<sup>25</sup> Satjipto rahardjo, Op cit. hal. 87.

<sup>26</sup> Ibid, hal. 16-20.

<sup>27</sup> Ibid. hal. 47-57.

dijalankan, yang akan meningkatkan keuntungan terhadap organisasi dan yang akan menekankan hambatan-hambatan terhadap organisasi.

Tujuan organisasi penegakan hukum akan menentukan bagaimana tingkah-laku organisasi itu. Oleh sebab karena organisasi tersebut harus hidup di tengah-tengah masyarakat sambil melayaninya, maka tujuan itupun lalu berfungsi untuk menuntut organisasi sehingga selamat dalam menjalankan tugasnya di tengah-tengah masyarakat. Proses penyesuaian yang demikian itu menimbulkan gejala yang disebut sebagai goal substitution dan goal displacement. Dalam goal substitution maka tujuan formal digantikan oleh kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah yang akan lebih menguntungkan organisasi di satu pihak dan di lain pihak yang menekankan sedapat mungkin ancaman terhadapnya. Pada goal displacement, tujuan-tujuan organisasi yang sudah diterima dan disetujui ditelantarkan demi untuk tujuan-tujuan yang lain.

Oleh sebab itu terdapat hubungan resiprositas antara badan-badan penegak hukum dengan masyarakatnya. Melalui goal substitution dan goal displacement tersebut tercermin proses resiprositas itu. Oleh karena badan-badan itu berusaha untuk meningkatkan atau menarik keuntungan-keuntungan dari masyarakat dan menekankan hambatan serta ancaman yang datang kepadanya, maka

penegakan hukum bisa cenderung meringankan golongan-golongan yang mempunyai kekuasaan dan memberatkan mereka yang tidak memilikinya. Golongan-golongan yang mempunyai kekuasaan memperoleh keuntungan, oleh karena badan-badan penegak hukum akan merisaukan kemampuan golongan-golongan tersebut untuk melakukan tindakan resiprositas.<sup>28</sup>

Peter M. Blau dan Richard Scott menilai bahwa hubungan dalam organisasi terdapat dua macam yaitu formal dan informal. Hubungan informal pada dasarnya bersumber dari struktur organisasi formal, dan sangat membantu organisasi formal dalam menetapkan norma dan aturan kerja. Argumentasinya bahwa tidak mungkin bisa mengetahui dan memahami kebenaran struktur organisasi formal tanpa mengetahui dan memahami organisasi informal. Organisasi informal walaupun kelihatannya terdiri dari proses-proses kegiatan dalam masyarakat yang resmi (unconscious) sangat berbeda dengan organisasi yang formal (conscious). Organisasi informal ini mempunyai dua pengaruh penting yaitu a) dapat menetapkan tindakan, pengertian, cara, kebiasaan

---

<sup>28</sup> Ibid.

institusi; b) dapat menciptakan kebiasaan organisasi formal berjalan.<sup>29</sup>

Menurut Martin Albrow, terdapat tujuh konsep modern tentang birokrasi, yaitu 1) birokrasi sebagai organisasi rasional, 2) birokrasi sebagai inefisiensi organisasi, 3) birokrasi sebagai kekuasaan yang dijalankan oleh pejabat, 4) birokrasi sebagai administrasi negara publik, 5) birokrasi sebagai administrasi yang dijalankan oleh pejabat, 6) birokrasi sebagai sebuah organisasi, dan 7) birokrasi sebagai masyarakat modern.<sup>30</sup>

Pada dasarnya birokrasi mempunyai peranan dalam mengemban dan menjalankan fungsi-fungsi hukum. Paling tidak birokrasi mempunyai peranan penting dalam proses pembuatan Undang-undang dan dalam menerapkan hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut di Indonesia, I.S. Susanto menyatakan:<sup>31</sup>

Paling tidak birokrasi mempunyai peranan penting dalam proses pembuatan Undang-undang dan dalam menerapkan hukum. Pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan, Presiden sebagai pemegang kekuasaan dalam pembentukan UU (Pasal 5 UUD 1945) dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi di bidang pemerintahan, maka peran dan pengaruh birokrasi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan sangat besar, baik di tingkat pusat maupun di daerah-daerah selama pemerintahan Orde Baru.

---

<sup>29</sup> Miftah Toha, *Perspektif Perilaku Birokrasi*, Cetakan ke-II, penerbit CV. Rajawali, 1991, hal. 21-22.

<sup>30</sup> Martin Albrow, *Birokrasi*, terjemahan M. Rusli Karim dan Totok Daryanto, cet. Ke-III, penerbit PT. Tiara Wicana, Yogyakarta, 1996, hal. 79-103.

<sup>31</sup> I.S. Susanto, *Birokrasi Yang Humanis*, Op. cit. hal. 3-5.

Dalam proses penegakan hukum, disamping birokrasi penegak hukum seperti pengadilan, kita juga mengenal lembaga administrasi (birokrasi), yang ditugasi untuk menjalankan peraturan perundangan di berbagai bidang seperti pajak, lingkungan hidup, perbankan, obat-obatan dan makanan dan sebagainya. Sebagaimana dikemukakan tentang fungsi hukum antara lain untuk memberi keadilan dalam arti lembaga peradilan berkewajiban untuk memperbaiki mekanisme perubahan terhadap alokasi ganjaran, struktur-struktur dan kesempatan, dan jalan masuk (akses) ke cara-cara kehidupan sosial kita secara adil nampaknya masih jauh dari harapan. Studi sosiologis tentang bekerjanya kedua bentuk birokrasi penegakan hukum di Indonesia memberikan gambaran yang tidak jauh berbeda dalam arti masih jauh dari harapan. Sifatnya yang tertutup, agak bias, kurangnya penghargaan terhadap martabat manusia, cenderung mempertahankan status quo dan kurang tanggap terhadap tuntutan perubahan, menjadikan keputusan-keputusan yang dihasilkan jauh dari rasa keadilan masyarakat. Akibatnya keadilan yang menjadi dambaan masyarakat menjadi suatu hal yang langka dan mahal. Sebaliknya, semakin marak kesenjangan di berbagai segi kehidupan.

Bekerjanya organisasi penegak hukum harus diterima sebagai suatu sistem yang terbuka, artinya bahwa kita melihatnya sebagai sesuatu yang bekerja di dalam dan dipengaruhi oleh interaksinya dengan faktor-faktor manusia, sosial, politik, ekonomi, teknologi. Kecuali faktor-faktor tersebut memberikan pengaruh terhadap organisasi dalam kedudukannya sebagai lingkungan (eksternal) maka mereka mempengaruhi pula susunan (intern) organisasi.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, cetakan ke-II, Alumni Bandung, 1983, hal. 135.

Mengenai masalah yang berhubungan dengan lingkungan dari proses penegakan hukum itu bisa dikaitkan kepada manusianya secara pribadi serta kepada penegak hukum sebagai suatu lembaga.

Mengenai masalah lingkungan pribadi dari sang penegak hukum, oleh Van Doorn dikatakan bahwa dalam kedudukannya sebagai pemegang fungsi di dalam rangka suatu organisasi, seorang penegak hukum cenderung untuk menjalankan fungsinya itu menurut tafsirannya sendiri yang dilatar-belakangi oleh berbagai faktor, seperti asal-usul sosial dan tingkat pendidikannya, kepentingan ekonominya serta keyakinan politik dan pandangan hidupnya sendiri.<sup>33</sup>

Penegakan hukum tentu saja tidak bisa lepas dari bekerjanya suatu sistem peradilan pidana dalam konteks tertentu. Demikian pula dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak. Permasalahan tidak hanya terhenti begitu saja ketika para penegak hukum telah menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, tetapi lebih jauh dari itu, apakah penegakan hukum tersebut sudah menjadi satu-satunya penyelesaian terbaik.

---

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, Op. cit, tt, hal. 26.

Di sisi lain sebagai bagian dari subsistem sosial para penegak hukum tentu saja bukan merupakan robot hukum semata, tetapi juga merupakan individu-individu yang mempunyai kehendak, yang masing-masing mempunyai persepsi yang tidak selalu sama dalam menyikapi suatu permasalahan. Sehingga sudah barang tentu akan menghasilkan sesuatu yang tidak selamanya sama pula, meskipun atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang sama.

Bahkan realitas sosial tidak sedikit pula pengaruhnya dalam mengkonstruksikan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak ini. Apalagi kalau dipahami bahwa tindak pidana anak atau juvenile delinquency<sup>34</sup> bukan merupakan suatu tindak pidana yang berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu akibat lanjutan dari sebuah realitas sosial.

Dalam kajian sosiologis kriminal terdapat hubungan korelasional antara kejahatan anak dengan kondisi sosiokultural lingkungan. Menurut John Hagan dalam bukunya *Modern Criminology, Crime, Criminal Behaviour*

---

<sup>34</sup> Bahwa secara etimologis Juvenile Delinquency diartikan sebagai kejahatan anak, bandingkan dengan Rober G. Trojanowics dan Merry Morash dalam bukunya *Juvenile Delinquency, Concept and Control*, Shaw and Mc. Kay, dalam bukunya *Juvenile Delinquency and urban Areas*, Voss dalam bukunya yang berjudul *Society, Delinquency and Deliquent behaviour*, Dalam *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, Paulus Hadisaputro, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.



and Its Control, dikemukakan beberapa teori yang diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu a) teori undercontrol; b) teori kultur, status dan kesempatan; c) teori over control<sup>35</sup>.

Dari uraian tersebut di atas dikaitkan dengan realitas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak, maka masalah tersebut akan diteliti dengan menggunakan pendekatan kriminologi kritis. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh I.S. Susanto mengenai kriminologi yang sebaiknya dikembangkan di Indonesia, yaitu:

Untuk lebih banyak mempelajari proses terjadinya kejahatan/penjahat, dalam arti mempelajari kondisi struktur, sosial, politik, budaya dan ekonomi yang mempengaruhi pembuatan perundang-undangan (pidana) dan bekerjanya hukum (pidana). Dalam mempelajari bekerjanya hukum, termasuk di dalamnya mempelajari hubungan interaksi diantara subyek-subyek yang terlibat dalam menghasilkan kejahatan, seperti pelanggar, korban, masyarakat serta penegak hukum.<sup>36</sup>

Terhadap masalah penegakan hukum kiranya dapat digunakan pendekatan kriminologis kritis terutama dalam mengungkapkan kepentingan-kepentingan dan hal-hal lainnya yang melatar belakangi tindakan aparat penegak

---

<sup>35</sup> John Hagan, dalam Paulus Hadisaputro, *Juvenile Delinquency, Pemahaman dan Penanggulangannya*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 1997, hal. 118.

<sup>36</sup> I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi, Makalah bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi*, 1993, UNDIP, Semarang.

hukum, baik sebagai individu maupun sebagai organisasi dalam interaksinya dengan pelanggar, korban dan masyarakat pada umumnya sehingga menghasilkan penegakan hukum yang bersifat selektif.<sup>37</sup>

Pendekatan kritis ini dimaksudkan untuk mengungkapkan hal-hal yang belum dapat teridentifikasi dalam kriminologi klasik dan positivis. Dengan demikian pendekatan kritis ini akan digunakan untuk menganalisis bekerjanya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak serta persepsi penegak hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak.

#### F. Metode Penelitian.

##### 1. Pendekatan.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak, sehingga akan melihat 2 (dua) entitas penting yaitu tidak saja memandang hukum dalam arti peraturan perundang-undangan semata tetapi lebih dari itu adalah memandang hukum dalam arti realitas sosial. Oleh sebab itu akan membawa konsekuensi pada penggunaan pendekatan sosiologis.

---

<sup>37</sup>. I.S. Susanto, Pemahaman Kritis terhadap Realitas Sosial, Op. cit. hal. 17.

Pendekatan sosiologis ini dimaksudkan untuk menggali makna yang tersembunyi dibalik fenomena-fenomena yang muncul dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak.

Pendekatan sosiologis dilakukan dengan terang pikir pengembang paradigma<sup>38</sup> alamiah (naturalistic paradigm)<sup>39</sup> yang melihat suatu realitas sebagai suatu kenyataan ganda, dibentuk dan merupakan keutuhan, dan inkuirinya terikat nilai, oleh karena itu pula peneliti disyaratkan melakukan studi dengan latar alamiah, bersifat deskriptif dan penafsirannya terikat ruang dan waktu.

Dengan menggunakan paradigma alamiah, latar alamiah menempati posisi yang sangat penting, oleh sebab itu institusi hukum dipahami tidak semata-mata dipandang sebagai entitas normatif yang eksoterik perse, tetapi lebih dipandang sebagai bagian

---

<sup>38</sup> Paradigma (penelitian) menurut Bogdan dan Bikten adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian, baca Lexy J. Moleong, ketika membahas topik "Paradigma Penelitian Kualitatif" dalam bukunya Metodologi penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, cetakan ke-7, 1996, hal. 30. Bandingkan juga dengan pengertian paradigma menurut Thomas Khun, yang lebih kurang dipakai sebagai seperangkat keyakinan komunitas ilmu dalam berolah ilmu, Deborah A. Redman, *Economic and the Philosophy of Social Science*, New York, Oxford University Press, 1991, hal. 16.

<sup>39</sup> Paradigma ini berawal dari pandangan Max Weber yang selanjutnya diteruskan oleh Irwin Deutcher, dan yang lebih dikenal dengan pandangan "fenomenologis". Paradigma ini mendasari aksiomanya pada "the naturalistic sociological theory" dan "the wualitative phenomenological theory", yang kalau hendak disingkat menurut Lincoln and Guba bertumpu pada 5 (lima) aksioma, Lihat Lexy J., Moleong, *ibid.* hal. 31-32.

subsistem dari keseluruhan sistem sosial yang tentu saja memiliki hubungan yang saling berkaitan dengan variabel sosial yang lain.

Dengan demikian lembaga penegak hukum dalam penelitian ini dilihat sebagai sub-sistem Sistem Peradilan Pidana (SPP), dan Sistem Peradilan Pidana sendiri berada atau menjadi bagian dari sub-sistem sosial. Terhadap hal ini membawa konsekuensi logis akan pendekatan yang digunakan untuk meneliti masalah ini, yaitu berangkat dari dua pendekatan yaitu, pertama model "interaksionisme simbolik"<sup>40</sup> untuk memahami lembaga penegak hukum sebagai bagian dari sub-sistem sosial.

Kedua, model "rationalistik"<sup>41</sup>, dalam rangka membangun pemahaman panafsiran, sebagai landasan

---

<sup>40</sup> Konsep interaksionisme simbolik paling tidak berolak dari 7 (tujuh) proposisi dasar, 1) simbol dan interaksi itu menyatu (tidak cukup bila kita hanya merekam fakta, kita harus mencari yang lebih jauh, yaitu mencari konteks sehingga dapat ditangkap simbol dan maknanya); 2) karena simbol dan makna itu tidak bisa lepas dari sikap pribadi, maka jati diri subyek perlu dapat ditangkap; 3) peneliti harus sekaligus mengaitkan antar simbol dengan jati diri dengan lingkungan dan hubungan sosialnya; 4) Konsep jati diri terkait dengan konsep sosiologi tentang struktur sosial dan lainnya; 5) hendaknya direkam situasi yang menggambarkan simbol dan makna, bukan hanya merekam fakta sensualnya saja; 6) metode yang dipakai hendaknya mampu menangkap makna di balik interaksi; 7) sensitizing (yaitu sekedar mengarahkan pemikiran) itu yang cocok dengan interaksionisme simbolik, dan ketika mulai memasuki lapangan perlu dirumuskan menjadi yang lebih operasional, menjadi scientific concepts, Periksa Nung Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi ke-II), Penerbit Rakesasih, Yogyakarta, 1996, hal. 136-138.

<sup>41</sup> Metode pendekatan ini berpijak pada proposisi bahwa mencari makna secara ontologis menggunakan kerangka berpikir reflektif, kursif, dengan menggunakan pola pikir divergensi, kreatif, inovatif, untuk mendapatkan makna yang lebih jauh dari hanya sekedar signifikansi. Atas dasar proposisi yang demikian inilah maka kerangka teoritis dari sebuah penelitian disyaratkan; 1) ada grand-concepts yang melandasi kerangka teoritis seluruh pemikiran teori dari penelitian; 2) membangun kerangka teori berdasarkan teori-teori substansi; dan 3) perkerangkaan teori

tinjauan terhadap Undang-undang yang mendasari bekerjanya lembaga penegak hukum khususnya dalam menangani penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak, sehingga akan didapat pemahaman antara yang tersurat dan tersirat dalam Undang-undang tersebut dengan sesuatu di luarnya.

## 2. Jenis dan Sumber Data.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder, keduanya saling melengkapi.

Pada prinsipnya terdapat 2 (dua) kategori data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu 1) data primer tentang bekerjanya lembaga penegak hukum (birokrasi) terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak dengan informan awal yaitu aparat penegak hukum (birokrat) dalam hal ini dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan; 2) data sekunder yaitu hal-hal yang mendasari bekerjanya lembaga penegak hukum seperti perundang-undangan dan dokumen-dokumen lain yang mendukung yang dapat diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan.

---

adalah hipotesis atau tesis yang hendak diuji kebenarannya secara empirik, Nung Muhajir, Ibid. hal. 74-80.

Dengan bertitik tolak dari pendekatan yang digunakan yaitu interaksionisme simbolik dan rasionalisme, yang akhirnya akan sampai pada upaya untuk memahami apa adanya dan apa yang seharusnya dilakukan lembaga penegak hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak, maka akan didapatkan 3 (tiga) sumber. Sumber dimaksud adalah aparat birokrasi penegak hukum, aparat lain yang berkompeten dan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Penetapan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sesuai kepentingan dan keperluan analisis. Pengembangan data maupun sumbernya dilakukan dengan mengikuti prinsip "snow balling" hingga mencapai titik kejenuhan dalam arti sampai kelengkapan dan validitas data dirasa cukup bagi kepentingan analisis.

Sedangkan sumber data, diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Terhadap data primer yang menjadi sumber data primer adalah para penegak hukum dan pihak-pihak yang berkompeten dalam penanganan penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak yang berada di kotamadia Semarang. Sedangkan sumber data sekunder yang menjadi rujukan

berupa peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen atau risalah-risalah perundang-undangan, pendapat para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan negara lain, serta hasil kegiatan ilmiah lainnya, bahkan juga digunakan data sekunder yang bersifat publik.

### 3. Teknik Pengumpulan Data.

Penelitian ini berusaha menggali data primer dan data sekunder secara sekaligus dengan harapan keduanya saling mendukung.

Dalam rangka pengumpulan data primer ditempuh dengan menggunakan 2 (dua) teknik yaitu 1) wawancara mendalam (depth interview); dan 2) teknik observasi partisipasi (partisipant observation). Sebelum secara terus menerus dilakukan pengumpulan dengan dua teknik tersebut, terlebih dahulu dilakukan apa yang oleh Spradly dipakai sebagai penciptaan rapport untuk meminimalisir transfer peneliti dengan para responden penelitian dan sekaligus menjajagi fisibilitas untuk dapat bekerja sama.

Hal ini menjadi sangat penting karena responden dalam memberikan informasi belum tentu dapat memberikan apa adanya secara natural, karena

kemungkinan terdapat hal-hal yang sifatnya sensitif untuk diungkapkan.

Melalui teknik wawancara akan digali selengkap-lengkapannya tidak hanya tentang apa yang diketahui, apa yang dialami informan dan responden penelitian, tetapi juga apa yang ada di balik pandangan, pendapat dan atas perilaku yang terobservasi. Oleh sebab itu alat-alat bantu wawancara dipersiapkan secara maksimal. Sedangkan teknik observasi partisipasi dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang tidak dapat diperoleh melalui wawancara seperti situasi, sikap atau aktivitas-aktivitas dalam struktur sosial dalam rangka bekerjanya lembaga penegak hukum, untuk itu observasi dilakukan dari hal yang paling umum hingga terfokus pada hal-hal yang paling khusus.<sup>42</sup>

Sedangkan untuk pengumpulan data sekunder ditempuh dengan penelitian kepustakaan (studi pustaka) dan studi dokumen.

#### 4. Teknik Analisa dan Intepretasi Data.

##### a. Teknik Analisa Data.

---

<sup>42</sup> Dalam metode penelitian kualitatif, jenis dan cara observasi yang demikian dipakai sebagai jenis observasi yang dimulai dari cara kerja deskriptif, kemudian observasi terfokus dan pada akhirnya observasi terseleksi, lihat Sarafiah Faisal, *Ibid.* hal. 80.



Data yang telah dianggap valid dan reliable, selanjutnya dilakukan konstruksi data melalui pendekatan yang bertumpu pada logika individu konseptualis dan emik.<sup>43</sup> Dengan logika berpikir induksi konseptualis, peneliti akan mengkonstruksikan semua fakta empiris selanjutnya membangun konsep, hipotesis, maupun pengembangan teori. Sedangkan dengan logika pikir emik, dilakukan untuk memahami hubungan antara berbagai pemahaman budaya dan tradisi antara berbagai pemahaman budaya dan tradisi hukum masyarakat dalam memandang lembaga penegak hukum dalam penanganan penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak.

Meskipun model analisa data penelitian ini tidak mengikuti tata pikir analisis komparasi konstan (constant comparative analysis) atau sebagaimana dipahami oleh Glaser dan Strauss

---

<sup>43</sup> Apabila seseorang pengamat akan menguraikan perilaku manusia, ada 2 titik tolak yang dianut yang bermanfaat menurut situasi tertentu. Jika seseorang menggunakan pendekatan etik terhadap data, maka ia melakukan generalisasi pernyataan tentang data bahwa ia (a) mengelompokkan secara sistematis, seluruh data yang dapat diperbandingkan, seluruh kebudayaan dunia, ke dalam sistem tunggal; (b) menyediakan peringkat kriteria untuk mengklasifikasikan setiap unsur data; (c) mengorganisasikan data yang telah diklasifikasikan ke dalam tipe-tipe; (d) mempelajari, merencanakan dan menguraikan setiap data baru yang ditemukan ke dalam kerangka sistem yang telah dibuat sebelum mempelajari kebudayaan dari data yang ditentukan. Sebaliknya pendekatan emik merupakan esensi yang sah untuk satu bahasa/satu kebudayaan pada satu waktu tertentu; pendekatan ini tidak berusaha menguraikan segi generalisasi ke dalam klasifikasi yang diperoleh sebelum studi suatu kebudayaan dilakukan. Lexy J. Moleong, Ibid, Hal. 54.

sebagai grounded theory<sup>44</sup> research dalam rangka membangun teori grounded, namun secara praktis operasional, teknik analisis data dalam penelitian ini tetap dalam menggunakan teknik analisis tipe Straus dan Corbin<sup>45</sup>, yang menyatakan bahwa analisa data kualitatif sebaiknya dilakukan semenjak peneliti berada di lapangan, dengan mengikuti model interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Matthew B. Miles & A. Michael Huberman<sup>46</sup> bahwa peneliti bergerak dalam 3 (tiga) siklus yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dalam suatu jalinan dalam rangka membangun analisis data yang komprehensif.

b. Teknik Intepretasi Data.

Proses siklus polibios yang menandai alur kegiatan analisis data emik penelitian ini akan terhenti manakala akan dilakukan intepretasi etik, karena didekati dengan jalan mengedepankan data secara non struktural dalam arti menyusun kategori logis tanpa memperdulikan struktur yang ada dalam bahasa perorangan (kesimpulan emik),

---

<sup>44</sup> Periska Sanafiah Faisal, Op. Cit. hal. 103-109.

<sup>45</sup> Periksa A. Strauss and J. Corbin, *Busir (Qualitative Research; Grounded Theory Prosedure and Techniques)*, London, Sage Publication, 1990, hal. 19.

<sup>46</sup> Periksa Mathew B. Miles & A Michael Huberman, *Analisa Data Kualitatif*, Penerbit UI Press, 1992, hal. 22.

untuk kemudian membangun interpretasi-intepretasi teoritis. Dalam hal ini intepretasi teoritis dilakukan dengan menggunakan tinjauan kritis.

#### 5. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.

Keabsahan data merupakan tahap penting dalam penelitian. Keabsahan data yang dalam positivisme dikenal dengan istilah kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) dalam penelitian ini bertumpu pada "derajat kepercayaan" (level of confidence) atau credibility<sup>47</sup> melalui teknik pemeriksaan keabsahan ketekunan pengamatan dan triangulasi. Untuk menetapkan keabsahan (trust worthiness) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Terdapat 4 (empat) kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability) dan kepastian (confirmability).

---

<sup>47</sup> Kriteria ini menurut Lincoln dan Guba (1981) dan Patton (1987) berfungsi untuk (1) melakukan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan dapat diatasi, dan (2) menunjukkan derajat kepercayaan hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti, lihat Lexy J. Moleong, Op. cit. hal. 173.

Melalui teknik pemeriksaan "ketekunan pengamatan" akan sampai pada ciri-ciri dan unsur-unsur yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian dan kemudian dirinci serta diobservasi secara mendalam. Sedangkan melalui teknik triangulasi dilakukan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh.

Penggunaan triangulasi ini dimaksudkan triangulasi sumber<sup>48</sup> dan metode.<sup>49</sup> Secara teknik operasional, triangulasi sumber dilakukan dengan mengadakan komparasi atau perbandingan data dan sumbernya untuk mensistematiskan baik perbedaan maupun persamaan pandangan berdasarkan kualifikasi, situasi sumber saat penyampaian data dan atau kesesuaian dengan dokumen yang menjadi data penelitian. Sedangkan melalui triangulasi metode dilakukan dengan mengadakan strategi pengecekan lewat teknik

---

<sup>48</sup> Menurut Patton (1987) triangulasi sumber dilakukan dengan jalan (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan sesuai kualifikasi tertentu, dan (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen, lihat Lexy J. Moleong, Ibid. hal. 178.

<sup>49</sup> Menurut Patton, ada 2 strategi yang bisa dilakukan pada triangulasi dengan metode yaitu (1) pengecekan derajat kepercayaan temuan penelitian lewat beberapa teknik pengumpulan data; dan (2) pengecekan derajat kepercayaan terhadap sumber data dengan metode yang sama, lihat Lexy J. Moleong, Ibid.

pengumpulan data observasi partisipasif dan wawancara mendalam di satu pihak dan teknik pengumpulan data lewat fokus group discusion di pihak lain.

#### G. Sistematika Penulisan.

Penulisan hasil penelitian ini secara garis besar akan disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I tentang Pendahuluan yang berisi latar belakang panulisan, tujuan penulisan, permasalahan yang akan diteliti serta metode yang akan digunakan dalam penelitian ini. Bab II tentang Tinjauan Pustaka, yang secara garis besar akan menguraikan tentang gambaran umum psikotropika, pengertian dan ruang lingkupnya, sejarah perkembangan psikotropika, dampak yang dapat ditimbulkan oleh penyalahgunaan psikotropika, penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dan juga tentang peradilan anak. Bab III berisikan uraian tentang analisis terhadap data-data yang diperoleh dalam penelitian dan hasil penelitian itu sendiri. Sedangkan Bab IV berupa penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penegakan Hukum.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.<sup>1</sup>

Karena penegakan hukum berarti proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, maka peranan peraturan perundang-undangan cukup besar dalam hubungannya dengan pelaksanaan peraturan itu yang dilakukan oleh para penegak hukum. Bahkan **Satjipto Rahardjo** mengungkapkan secara ekstrim bahwa keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.<sup>2</sup>

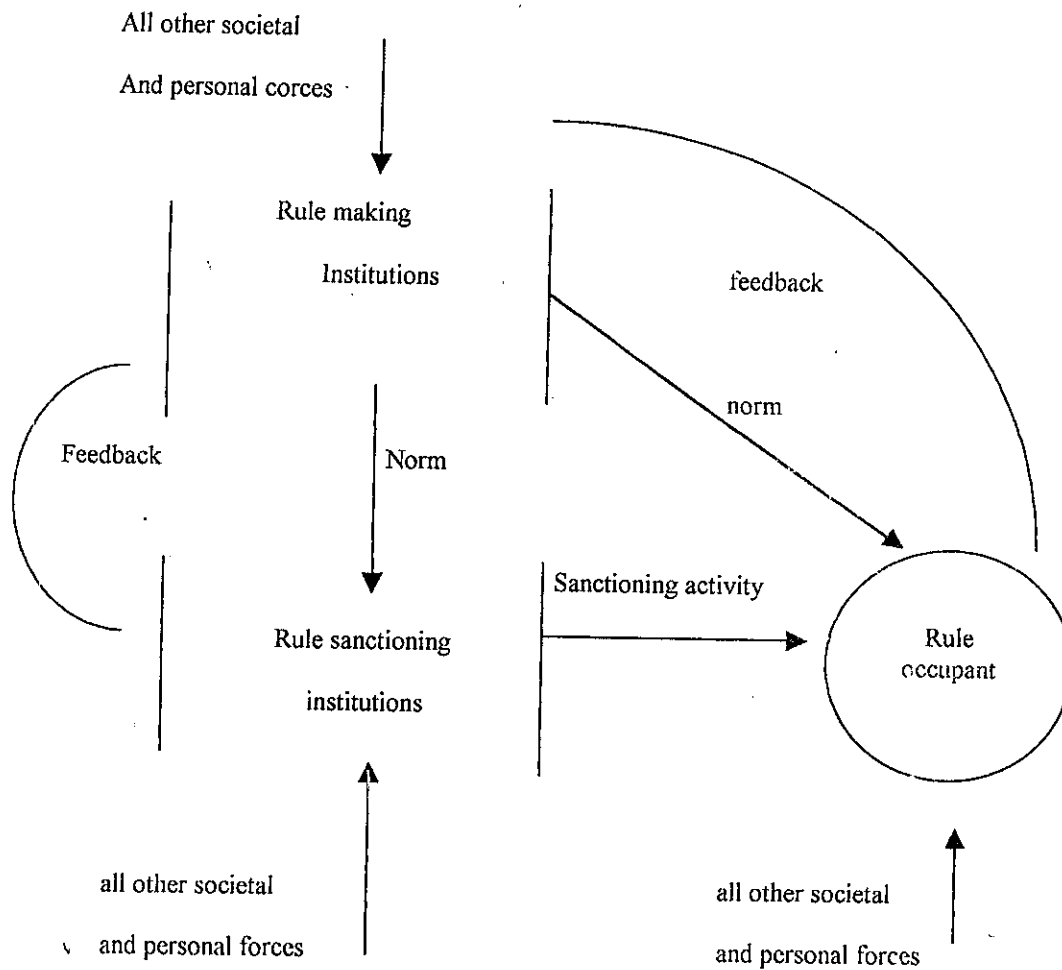
Selain ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, keberhasilan penegakan hukum juga ditentukan oleh bagaimana pengaruh lingkungan terhadap pribadi penegak hukum. Dalam kaitannya dengan pengaruh lingkungan

---

<sup>1</sup> Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, BPHN, Penerbit Sinar baru Bandung, tt, hal.24.

<sup>2</sup> Ibid, hal.25.

terhadap penegak hukum sebagai suatu lembaga, Chambliss dan Seidman menggambarkan dalam bentuk diagram sbb:<sup>3</sup>



(Diagram Chambliss and Seidman mengenai proses penegakan hukum).

<sup>3</sup> Chambliss and Seidman dalam Satjipto Raharjo, Ibid hal.27.

Penegakan hukum pidana tradisional memusatkan perhatian pada aspek investigasi dan penindakan dalam rangka "crime control", dengan meletakkan aspek pencegahan pada prioritas kedua. Hal ini berbeda dengan penegakan hukum pidana modern, dimana penegakan hukum meletakkan aspek pencegahan pada posisi primer.<sup>4</sup>

Pada prinsipnya, semua usaha penegakan hukum pidana memang memberikan arti adanya upaya untuk menjaga agar keberadaan hukum yang diakui dan hidup di masyarakat tetap dapat ditegakkan. Atau dengan kata lain supaya penegakan hukum dapat menjamin agar setiap warga negara memenuhi hukum yang berlaku. Itulah sebabnya penegakan hukum yang bersifat represif, walaupun tetap diperlukan untuk memberikan reaksi yang negatif terhadap setiap pelanggaran hukum, haruslah didahului oleh aksi-aksi pencegahan atau preventif agar hukum yang ada tidak dilanggar.

Penegakan hukum yang bersifat represif merupakan suatu proses yang berlangsung manakala terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana. Sedangkan upaya penegakan hukum yang bersifat preventif merupakan usaha

---

<sup>4</sup> Mohammad Kemal Darmawan, makalah disampaikan dalam rangka seminar nasional "Polisi dan Masyarakat dalam Era Reformasi, kerjasama FH dan FE UI, 30 Juni 1998.



yang terkoordinir, yang bertujuan untuk mencegah agar tingkah laku kriminal (pelanggaran hukum pidana) tidak terjadi.<sup>5</sup> Apabila tingkah laku kriminal atau kejahatan dapat dicegah maka hukum pidana dalam masyarakat dapat ditegakkan.

Penegakan hukum pidana sebenarnya merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut sebagai "politik kriminal". Politik kriminal itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu kebijakan atau usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dalam suatu masyarakat. Senada dengan pernyataan ini, Gladstone<sup>6</sup>, merujuk pada pendapat Marc Ancel dan Hofnangels, memberikan arti bagi politik kriminal sebagai suatu pengorganisasian yang rasional dari reaksi-reaksi sosial terhadap kejahatan sehingga dianggap pula sebagai suatu ilmu pengetahuan tentang pencegahan kejahatan.

Sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas. Pendapat tersebut wajar karena pada hakekatnya

---

<sup>5</sup> Mohammad Kemal Darmawan, Strategi Pencegahan Kejahatan, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, hal.11.

<sup>6</sup>Gladstone,F.J.Co-ordinating Crime Prevention Efforts, dalam Clarke dan Mathews (eds), Designing Out Crime, London, HMSO, 1980, hal.32.

kejahatan merupakan masalah kemanusiaan atau masalah sosial, yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana. Sebagai suatu masalah sosial, kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis, yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks.

Senada dengan hal tersebut, Konggres ke-4 PBB tentang "Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggar Hukum, di Kyoto Jepang juga menyebutkan bahwa kejahatan adalah *socio-political problem*.<sup>7</sup> Sehubungan dengan pemahaman bahwa penegakan hukum adalah bagian dari politik kriminal, dan politik kriminal bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial demi kesejahteraan sosial, maka dalam konggres tersebut juga disepakati bahwa;

"Perencanaan tentang pertahanan sosial haruslah merupakan bagian yang integral dari perencanaan nasional. Pencegahan kejahatan dan pembinaan bagi pelanggar hukum tidak dapat dilakukan secara efektif kecuali jika pencegahan kejahatan dan pembinaan bagi pelanggar hukum tersebut terkait erat secara baik sekali dengan kecenderungan perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Perencanaan dalam bidang sosial dan ekonomi menjadi titik realistis apabila perencanaan tersebut tidak mencari penawar bagi kondisi-kondisi kriminogenik yang potensial melalui investasi yang tepat dalam program-program pembangunan".<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Fourth United Nations Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders, New York Department of Economic and Social Affairs, United Nations, 1971, hal.6.

<sup>8</sup> Ibid, hal.13.

Selanjutnya dalam konggres yang sama ke-VI tahun 1980 di Caracas dihasilkan suatu kesepakatan bahwa:

"Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana haruslah dipertimbangkan dalam konteks pembangunan, sistem politik, nilai-nilai sosial, dan kultural serta perubahan sosial, serta juga dalam konteks peraturan ekonomi internasional yang mutakhir. Adalah suatu hal yang amat penting dan merupakan prioritas bahwa program-program pencegahan kejahatan dan pembinaan bagi pelanggar hukum harus didasarkan pada keadaan atau kondisi sosial, kultural, politik dan ekonomi setiap negara, dalam suasana kemerdekaan dan hormat terhadap hak asasi manusia, dan harus dikembangkan dalam kapasitas yang efektif bagi perumusan dan perencanaan politik kriminal dan bahwa setiap kebijakan pencegahan kejahatan haruslah dikoordinasikan dengan strategi-strategi bagi pembangunan sosial, ekonomi, politik dan kultural masyarakat".

Menurut **Soeryono Soekanto**, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau faktor yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, cet ke-3, 1986 hal 2-3.

Dalam kaitannya dengan birokrasi khususnya dalam penegakan hukum I. S. Susanto mengemukakan:

"Dalam proses penegakan hukum, disamping birokrasi penegak hukum seperti pengadilan, kita juga mengenal lembaga administrasi (birokrasi), yang ditugasi untuk menjalankan peraturan perundang-undangan di berbagai bidang seperti pajak, lingkungan hidup, perbankan, obat-obatan dan makanan dan sebagainya. Sebagaimana dikemukakan tentang fungsi hukum antara lain untuk memperbaiki mekanisme perubahan terhadap alokasi ganjaran, struktur-struktur dan kesempatan, dan jalan masuk (akses) ke cara-cara kehidupan sosial kita secara adil nampaknya masih jauh dari harapan. Studi sosiologis tentang bekerjanya kedua bentuk birokrasi penegakan hukum di Indonesia memberikan gambaran yang tidak jauh berbeda dalam arti masih jauh dari harapan. Sifatnya yang tertutup, agak bias, kurangnya penghargaan terhadap martabat manusia, cenderung mempertahankan status quo dan kurang tanggap terhadap tuntutan perubahan, dari rasa keadilan masyarakat. Akibatnya keadilan yang menjadi dambaan masyarakat menjadi suatu hal yang langka dan mahal. Sebaliknya, semakin marak kesenjangan di berbagai segi kehidupan".<sup>10</sup>

Bekerjanya organisasi penegak hukum harus diterima sebagai suatu sistem yang terbuka, artinya bahwa kita melihatnya sebagai suatu yang bekerja di dalam dan dipengaruhi oleh interaksinya dengan faktor-faktor manusia, sosial, politik, ekonomi, teknologi. Kecuali faktor-faktor tersebut memberikan pengaruh terhadap organisasi dalam kedudukannya sebagai lingkungan

---

<sup>10</sup> I. S. Susanto, Birokrasi yang Humanis, Makalah Seminar Sosiologi dan Konggres 1 Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia (ASHI), Semarang tanggal 15-16 April 1998.

(eksternal) maka mereka mempengaruhi pula susunan (intern) organisasi).<sup>11</sup>

## B. Psikotropika.

### 1. Sejarah Perkembangan Psikotropika.

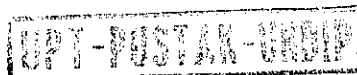
Jenis Psikotropika yang banyak beredar di masyarakat dan sering ditemui penyalahgunaannya adalah ecstasy. Ecstasy merupakan turunan dari ampetamin dengan nama Methylenedioxy Methamphetamine yang disingkat dengan MDMA dan mempunyai nama sandi lain seperti XTC, ADAM, ESSENCE "E" dan lain-lain.

Penyalahgunaan psikotropika telah dimulai di beberapa negara secara perlahan-lahan semenjak awal abad 20. Pada tahun 1914 pertama kali digunakan di Jerman sebagai obat penahan nafsu makan, dan di kalangan tentara mulai digunakan untuk meningkatkan moral tempur pasukan.

Penyimpangan ini semakin memuncak pada waktu perang dunia ke-dua dimana Amphetamine dijadikan perlengkapan tentara Amerika, Inggris, Jepang dan Jerman.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, cetakan ke-dua, Alumni Bandung, 1983, hal. 135.

<sup>12</sup> Mannaione PF, Cincial Pharmacology of drug Dependence Piccin Nuova Libraris, SPA, Padua, Italy, 1984, hal. 215-234.



Pasca perang dunia ke-II, sisa persediaan psikotropika tersebut diedarkan di pasaran gelap. "Mulailah timbul wabah ketergantungan psikotropika". Korban yang paling banyak adalah para pemuda usia 14 hingga 19 tahun. Pada tahun 1980 Institute for the Study of Drug Dependence (ISDD) melaporkan bahwa terjadi pergeseran penggunaan psikotropika dimana sebelumnya penggunaannya terbatas untuk mencari kesenangan di akhir minggu di diskotik, berubah untuk mempertahankan situasi kenikmatan yang diperoleh dengan menggunakan psikotropika ini dalam kehidupan sehari-hari dan kalangan mahasiswa menggunakan psikotropika ini sebagai recreational drug. Kondisi yang demikian terus berkembang dan kian memburuk hingga pada dekade 90-an, psikotropika populer sebagai *mood modulator* untuk pesta-pesta dansa eksekutif.<sup>13</sup>

## 2. Pengertian dan Penggolongan Psikotropika.

Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada

---

<sup>13</sup> Lewis LA, Roos MW, The Gay Dance Party Culture in Sidney, A Qualitative Analysis-J-Homosex, 29 (1) 41-70, 1995.

aktivitas mental dan perilaku. Dari sini terlihat adanya batasan ruang lingkup psikotropika yang dipersempit yaitu zat dan obat yang bukan narkotika, dengan maksud agar tidak berbenturan dengan ruang lingkup narkotika.

Psikotropika memiliki khasiat proaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, dan mempunyai hubungan kausalitas pada aktivitas mental dan perilaku penggunaannya. Mental dan perilaku pengguna menunjukkan adanya perubahan yang khas dibandingkan apabila yang bersangkutan tidak mengkonsumsi psikotropika.

Psikotropika pada hakekatnya terbagi kedalam 4 (empat) golongan yaitu : Psikotropika golongan I, Psikotropika golongan II, Psikotropika golongan III dan Psikotropika golongan IV. Secara lengkap masing-masing golongan psikotropika tersebut adalah sebagai berikut :

Psikotropika Golongan I:

- a. MDMA yang lebih dikenal dengan nama ecstasy.
- b. N-etil MDA juga terdapat dalam kandungan ecstasy.
- c. MMDA juga terdapat dalam kandungan ecstasy.

Psikotropika Golongan II.

- a. Amfetetamine dikenal sebagai sabu-sabu.
- b. Reksamfetamina.
- c. Fenetilina.

Psikotropika Golongan III.

- a. Amubarbital.
- b. Bumenorfina.
- c. Butal-bital.

Psikotropika Golongan IV.

- a. Diazepam dikenal dengan nama nipam, BK, Magadon.
- b. Nitrazepam.
- c. Nordazepam.

Psikotropika yang sekarang populer atau banyak disalahgunakan adalah psikotropika golongan I yang dikenal dengan istilah ecstasy dan psikotropika golongan II yang berjenis sabu-sabu.

Ecstasy berbentuk pil mempunyai daya reaksi relatif cepat yaitu kurang lebih 40 (empat puluh) menit setelah dikonsumsi. Pemakai akan merasakan rasa hangat, energik, bahagia baik fisik maupun mental. Ketahanan reaksi tersebut akan bertahan dari 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) jam tergantung dari toleransi pemakainya. Setelah ketahanan reaksi tersebut berakhir, akan muncul efek buruk seperti halnya orang keracunan, tubuh akan mengalami kelelahan yang sangat dan mulut akan terasa kelu dan kaku.

### 3. Dampak Negatif Psikotropika.

Dampak negatif dari penyalahgunaan Psikotropika secara farmakologi tidak sekedar bersifat stimulat



atau rangsangan tetapi juga menimbulkan adanya *halusinogik* yaitu khayalan-khayalan tentang kenikmatan, kesenangan yang antara lain : meningkatkan rasa nikmat dan bahagia semu; meningkatkan daya tahan tubuh; menimbulkan khayalan yang menyenangkan; menurunkan emosi, dan sebagainya.

Pengguna psikotropika akan merasakan kenikmatan dan merasakan *spheria* (rasa gembira yang berlebihan), hal ini karena pengaruh obat yang masuk ke dalam otak manusia dan melepaskan DA, NE dan SE dari limbic system, maka pengguna akan merasa gembira dan senang. Kalau obat yang diminum banyak maka akan terjadi peningkatan perasaan tersebut secara berlebihan. Orang akan kehilangan rasa susah, sedih, sakit hati. Ia akan merasakan kegembiraan, kebahagiaan selama psikotropika yang diminum masih memberikan pengaruh atau berproses. Namun bila proses tersebut telah berhenti maka akan timbul halusinasi.

Lebih lanjut bila tidak minum lagi akan timbul rasa susah, sedih, sakit, perasaan tertekan, perasaan tidak enak, tidak nyaman yang berlebihan bila dibandingkan sebelum mengkonsumsi psikotropika tersebut.

Keadaan yang demikian akan memacu pengguna untuk mengulangi lagi mendapatkan kembali perasaan yang pernah dirasakannya seperti ketika mengkonsumsi psikotropika.

Obat yang bersifat *halosinogen* digunakan dengan alasan dan tujuan berbeda. Alasan pengguna antara lain menegaskan bahwa, dengan menggunakan obat ini mereka mendapatkan cara atau jalan baru memandang dunia, cara pandang pengguna sangat bervariasi tergantung pada pengaruh oleh persepsi derajat perubahan pikiran yang dialami yaitu perubahan rasa nikmat dan juga rasa diri yang meningkat.

Ketertarikan atau daya tarik dari psikotropika mempunyai efek farmakologi yang dapat merubah suasana hati, rasa sedih diganti gembira, rasa loyo menjadi bersemangat, rasa sakit berubah menjadi senang sampai dengan euforia.

Dampak negatif dari penggunaan psikotropika khususnya yang mengandung *Amphetamine* sangat memprihatinkan, karena dapat merusak syaraf otak. Bahkan terjadi intoksikasi, yaitu perubahan perilaku sebagai akibat langsung dari menggunakan psikotropika yang berlebihan.

Psikotropika juga dapat menimbulkan efek samping berupa: muntah-muntah; nafsu makan berkurang; meningkatnya denyut jantung; kejang-kejang; khayalan yang menakutkan; gelisah; sakit kepala, dan sebagainya.

Psikotropika juga dapat menimbulkan efek-efek lain. Efek lain yang dimaksudkan di sini adalah setelah efek psikotropika tersebut habis, antara lain: tidur berlama-lama; depresi; apatis; kematian karena adanya payah jantung serta kritis hipertensi maupun pendarahan otak, dan sebagainya.

Disamping efek-efek yang telah disebutkan di atas, psikotropika juga dapat menimbulkan efek negatif pada organ tubuh yaitu antara lain: gangguan pada otak; jantung; ginjal; hati; kulit; alat kelamin; dan sebagainya.

#### 4. Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Tentang Psikotropika.

Sebelum lahirnya UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, penyalahgunaan psikotropika belum dapat dijerat dengan peraturan perundangan yang ada, karena UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika dan UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan tidak mengatur tentang

penyalahgunaan psikotropika. Namun dengan lahirnya UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ini tidak ada alasan lagi bagi penegak hukum untuk menjerat pelaku penyalahgunaan psikotropika.

Terbentuknya UU Psikotropika ini tidak terlepas dari adanya konvensi-konvensi Internasional antara lain: konvensi psikotropika tahun 1971 (*Convention on Psychotropic Substances 1971*) dan konvensi pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika 1988 (*Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*). Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi Psikotropika 1971 tersebut dengan UU No. 8 Tahun 1996.

Berdasarkan ketentuan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, perbuatan yang diancam pidana dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Tindak pidana yang menyangkut produksi psikotropika;  
Pasal 59 ayat (1) huruf b  
"Barang siapa memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud Pasal 6, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 59 ayat (2)

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 59 ayat (3)

Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Pasal 60 ayat (1)

Barang siapa:

- a. memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan pasal 5 bahwa psikotropika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau
- b. memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, atau
- c. memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- b. Tindak pidana yang menyangkut peredaran psikotropika yaitu:

Pasal 59 ayat (1) huruf c

Barang siapa mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) yaitu psikotropika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pengetahuan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 60 ayat (2)

Barang siapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 60 ayat (3)

Barang siapa menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Pasal 60 ayat (4)

Barang siapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Pasal 60 ayat (5)

Barang siapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

c. Tindak Pidana yang menyangkut kegiatan ekspor dan impor psikotropika.

Pasal 59 ayat (1) huruf d

Barang siapa mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 61 ayat (1)

Barang siapa:

a. mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16, atau

- b. mengekspor atau mengimpor psikotropika tanpa surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, atau
- c. melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) atau Pasal 22 ayat (4);
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 61 ayat (2)

Barang siapa tidak menyerahkan surat persetujuan ekspor kepada orang yang bertanggungjawab atas pengangkutan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

- d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan psikotropika.

Pasal 59 ayat (1) huruf e

Barang siapa tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 62

Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 63 ayat (1) huruf a

Barang siapa melakukan pengangkutan psikotropika tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan sebagai mana dimaksud dalam pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

- e. Kejahatan yang menyangkut penggunaan psikotropika.  
Pasal 59 ayat (1) huruf a  
Barang siapa menggunakan psikotropika golongan I selain untuk tujuan ilmu pengetahuan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- f. Kejahatan yang menyangkut pengobatan dan rehabilitasi.  
Pasal 64  
Barang siapa:  
a. menghalang-halangi penderita sindroma ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau  
b. menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3).  
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- g. Tindak pidana yang menyangkut label dan iklan psikotropika.  
Pasal 63 ayat (2)  
Barang siapa:  
a. tidak mencantumkan label sebagaimana dimaksud Pasal 29 yaitu pada kemasan psikotropika ; atau  
b. mencantumkan tulisan berupa keterangan dalam label yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) yaitu harus lengkap dan tidak menyesatkan; atau  
c. mengiklankan psikotropika selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) yaitu pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi,  
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- h. Tindak pidana yang menyangkut transito psikotropika.  
Pasal 63 ayat (1)  
Barang siapa:



- a. melakukan perubahan negara tujuan ekspor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau
- b. melakukan pengemasan kembali psikotropika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25,  
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- i. Tindak pidana yang menyangkut pelaporan adanya tindak pidana psikotropika.  
Pasal 65  
Barang siapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- j. Kejahatan yang menyangkut saksi dalam perkara psikotropika.  
Pasal 66  
Saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan di sidang pengadilan yang menyebut nama, alamat atau hal-hal yang dapat terungkapnya pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- k. Kejahatan yang menyangkut pemusnahan psikotropika.  
Pasal 63 ayat (2) huruf d  
Barang siapa melakukan pemusnahan psikotropika tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) atau pasal 53 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

### C. Kejahatan Anak.

Pengertian tentang kejahatan anak yang dalam berbagai literatur dikenal dengan istilah "juvenile

*delinquency*" memiliki keberagaman. Istilah yang sering terdengar dan lazim dipergunakan dalam media massa adalah kenakalan remaja atau sering juga dipergunakan istilah kejahatan anak. Istilah kejahatan anak dirasakan terlalu tajam. Sementara istilah kenakalan remaja sering disalahtafsirkan dengan kenakalan yang tertuangkan dalam pasal 489 KUHP.<sup>14</sup> Untuk menghindari pemakaian yang kurang tepat atau berlebihan, maka dipakai istilah *juvenile delinquency* atau kejahatan anak.

Sementara pengertian tentang anak itu sendiri juga terdapat beberapa pemahaman yang berbeda. Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak biasanya didasarkan atas tingkatan umur. Namun demikian adapula yang mendasarkan pada pendekatan psikososial.

Pengertian anak di sini termasuk juga remaja, karena dalam konteks hukum peristilahan remaja kurang lazim dipergunakan. Dalam perundang-undangan biasa disebutkan dengan istilah anak, belum dewasa (*minder jarig*), belum cukup umur, dan sebagainya.

---

<sup>14</sup> Periksa Robert Trojanowics dan Merry Morash dalam bukunya *Juvenile Delinquency, Concept and Control*; Shaw and Mc. Kay dalam bukunya *Juvenile Delinquency and Urban areas*; Rose Giallombardo dalam bukunya *Juvenile Delinquency, A Book of Reading*; Korn dalam bukunya *Juvenile Delinquency*; Jossine Junger dalam *Delinquent Boys*; Cloward and Ohlin dalam *Delinquency and Opportunity*; Siegel and Sienna dalam bukunya *Juvenile Delinquent*; Hand dalam bukunya yang berjudul *Juvenile Offender and Crime and Delinquency*, dari berbagai judul buku tentang Juvenile Delinquency tersebut, akhirnya mengarah pada makna yang sama.

Pendekatan yang didasarkan atas umur/usia terdapat berbagai variasi. Di Amerika Serikat, 27 Negara Bagian menentukan batas umur antara 8-18 th, sementara 6 Negara Bagian menentukan batas umur 8-17 th, ada pula bagian lain yang menentukan batas umur antara 8-16 th. Di Inggris ditentukan batas umur antara 12-16 th. Di Australia ditentukan 8-16 th. Di Belanda ditentukan antara umur 12-18 th. Di negara-negara Asia antara lain Srilangka menentukan batas umur antara 8-16 th. Di Jepang antara 14-20 th. Sedangkan negara-negara Asean antara lain Philipina menentukan 7-16 th. Di Malaysia 7-18 th. Singapura menentukan batas antara 7-16 th.<sup>15</sup> Sedangkan di Indonesia sendiri berdasarkan ketentuan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak ditetapkan antara usia 8-18 tahun.

Sementara batasan anak yang didasarkan aspek psikososial, klasifikasi perkembangan anak hingga dewasa dikaitkan dengan usia dan kecenderungan kondisi kejiwaannya.<sup>16</sup>

Perkembangan usia anak hingga dewasa dapat diklasifikasikan menjadi lima, yaitu a) anak, seseorang yang berusia di bawah 12 tahun; b) remaja dini, seseorang

---

<sup>15</sup> Sri Widoyati Soekito, dalam Paulus Hadisuprpto, *Juvenile delinquency, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1997 hal. 8

<sup>16</sup> Singgih Gunarso, dalam *Ibid*.

yang berusia 12-15 tahun; c) remaja penuh, seseorang yang berusia 15-17 tahun d) dewasa muda, seseorang yang berusia 17-21 tahun (e) dewasa, seseorang yang berusia di atas 21 tahun.

Masing-masing tingkatan usia mempunyai karakteristik kejiwaan sendiri-sendiri. Paulus Hadisuprpto menyatakan bahwa remaja dini (usia 12-15) memiliki kecenderungan kejiwaan antara lain a) sibuk menguasai tubuhnya, karena ketidak seimbangan postur tubuhnya, kekurangnyamanan tubuhnya; b) mencari identitas dalam keluarga, satu pihak menjurus pada sifat egosentris, pada lain pihak belum bisa sepenuhnya disertai tanggungjawab, sehingga ia sangat memerlukan daya tampung dari lingkungan keluarganya; c) kepekaan sosial tinggi, solidaritas pada teman tinggi, dan besar kecenderungan mencari popularitas. Dalam fase ini ia sibuk mengorganisasikan dirinya, mulai mengalami perubahan dalam sikap, minat, pola-pola hubungan pertemanan, mulai timbul dorongan seksual, bergaul dengan lain jenis; d) minat ke luar rumah tinggi, kecenderungan untuk *trial and error* tinggi, dan kemauan untuk belajar dari pengalamanpun tinggi; e) mulai timbul usaha-usaha untuk menguasai diri baik di lingkungan rumah, sekolah, klub olahraga, kesenian, dan

di lingkungan pergaulan pada umumnya. Sementara pada tahapan remaja lanjut, ciri-ciri melekat padanya ialah a) sudah mulai menampakkan dirinya mampu dan bisa menerima kondisi fisiknya; b) mulai dapat menikmati kebebasan emosionalnya; c) mulai mampu bergaul; d) sudah menemukan identitas dirinya; e) mulai memperkuat penguasaan diri dan menyesuaikan perilakunya dengan norma-norma keluarga dan kemasyarakatan dan f) mulai secara perlahan-lahan meninggalkan reaksi-reaksi dan sikap-sikap kekanak-kanakan.<sup>17</sup>

Dengan demikian seseorang yang dikategorikan masih dalam usia anak, secara psikologis belum memiliki kematangan maupun kedewasaan dalam berfikir, berperilaku dan bersikap tindak, atau dengan kata lain kondisi kejiwaannya masih labil. Dalam kondisi yang demikian tentu akan semakin buruk ketika dipengaruhi oleh psikotropika. Di samping itu mereka juga tidak mengetahui dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh psikotropika tersebut.

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak, maka khusus tentang peradilannya berlaku ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Dalam

---

<sup>17</sup> Singgih Gunarso, *Ibid.*

UU tersebut terdapat beberapa ketentuan khusus yang berkaitan dengan peradilan terhadap pelaku tindak pidana yang masih berusia anak-anak.

Ketentuan khusus tersebut antara lain siapa yang berhak menangani tindak pidana anak (petugas-petugas khusus); adanya pembimbing dari kemasyarakatan (BAPAS), pekerja sosial maupun pekerja sosial sukarela; suasana persidangan; pemeriksaan tertutup; hakim tunggal; masa penahanan yang lebih singkat; hukuman yang lebih ringan.

#### D. Perkembangan Pemikiran Kriminologi.

Philippe Nonet dan Philippe Selznick mengatakan bahwa Ilmu Hukum selalu memiliki keterkaitan yang luas dengan berbagai disiplin ilmu.<sup>18</sup> Hal ini tidak berarti bahwa teori hukum yang ada tidak mampu menjelaskan terhadap berbagai permasalahan dan realitas sosial, tetapi apabila kita mau melihat bagaimana hukum itu bekerja, maka kita juga harus memahami bagaimana proses hukum itu terjadi, dimana hukum itu dibuat dalam sebuah masyarakat dan dalam kondisi yang bagaimana hukum tersebut dicetuskan.

Selanjutnya ia juga menjelaskan bahwa untuk membuat ilmu hukum menjadi lebih relevan dan lebih hidup, ialah dengan melakukan re-integrasi antara hukum, politik dan

berbagai teori dalam ilmu sosial lainnya. Dalam tahapan ini, kita harus memperhatikan masalah-masalah hukum ditinjau dari sudut pandang ilmu pengetahuan sosial. Kemudian untuk memahami kita mengajukan kerangka kerja dengan membandingkan masing-masing penalaran tersebut (penalaran dari bidang hukum dan penalaran dari bidang ilmu sosial yang di-reintegrasikan) untuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada.

Ilmu sosial yang banyak membantu ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana dalam upayanya melakukan pendekatan dan memahami sebuah perilaku yang menyimpang tidak lain adalah sosiologi dan kriminologi.<sup>19</sup>

Kebanyakan orang beranggapan bahaya penggunaan sosiologi dalam kriminologi tidak lebih dari sekedar alat bantu dalam skema besar analisis. Ia hanya berfungsi bila difungsikan dan diperlukan keberadaannya, padahal diluar itu semua sebenarnya kerangka pemikiran sosiologi dan kriminologi yang ada senantiasa bekerja untuk selalu melakukan analisis. Bahkan apabila difungsikan secara benar dan tepat, maka hasil yang diperoleh akan jauh lebih tajam.

---

<sup>18</sup> Phillippe Nonet, Philippe Selznick, *Law and Society in Transition; Toward Responsive Law*, Harper and Row, Colophon Books, New York, 1978, hal. 1.

<sup>19</sup> Erich Goode, *Deviant Behaviour*, Prentice Hall Inc, Englewood Cliffs, New Jersey, 1989.

Perkembangan kriminologi sebagai suatu ilmu tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ilmu lain seperti antropologi kriminal, psikologi kriminal, psikiatri kriminal, statistik kriminal, victimologi dan sebagainya.

Dilihat dari sejarahnya kriminologi mengalami perkembangan perspektif yang berbeda, paradigma yang berbeda, maupun dominasi aliran (*school of criminology*) yang berbeda.

Secara garis besar terdapat dua aliran atau paradigma yang ada dalam kriminologi dalam usahanya untuk menjelaskan kejahatan, yaitu *spiritistik* atau *demonologik* dan *naturalistik*. I.S. Susanto dalam hal pendekatan *naturalistik* ini membagi lagi menjadi tiga aliran yaitu klasik, positif dan kritis.<sup>20</sup>

Don. C. Gibbon menyatakan "*The core concepts of the classical frame of reference are hedonism and free will*".<sup>21</sup> Lebih lanjut dikatakan bahwa "*The conclusion from these premises was that criminals make deliberate, rational, hedonistically oriented decisions to engage in lawbreaking*".<sup>22</sup> Hal senada juga dalam aliran klasik dalam memandang kejahatan dan penjahat dilihat semata-mata dari

<sup>20</sup> I.S. Susanto, *Kriminologi*, hal. 2-6 lihat juga I.S. Susanto dalam *Kejahatan Korporasi*, hal. 5-8.

Penjelasan yang rinci mengenai perkembangan pemikiran yang demonologis dan spiritistik serta varian teorinya, lihat juga JE. Sahetapy, *Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologik*, hal. 12-32.

<sup>21</sup> Don C. Gibbon, *Society, Crime and Criminal Behavior*, Prentice Hall, Englewood, New Jersey, 1992, hal. 16.



batasan undang-undang. Kejahatan didefinisikan sebagai setiap pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang oleh UU pidana, penjahat adalah setiap orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan bebas dari individu dalam menilai untung ruginya melakukan kejahatan.

Oleh karena itu secara rasional tanggapan yang diberikan oleh masyarakat terhadap hal ini adalah meningkatnya kerugian yang harus dibayar dan menurunkan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan agar orang-orang tidak memilih untuk melakukan kejahatan.<sup>23</sup>

Sedangkan aliran pemikiran positiv, menurut Michael R. Gottfredson dan Travis Hirschi sangat bertolak belakang dengan aliran klasik, ide pengetahuannya bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia terbatas dalam arti sudah ditentukan sedangkan aliran klasik percaya pada kebebasan di dalam berkehendak.<sup>24</sup>

Faktor penentu tersebut baik berupa faktor biologik maupun kultural. Ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk berbuat menurut dorongan keinginannya dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi

---

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> I.S. Susanto, Op cit.

<sup>24</sup> Michael R. Gottfredson dan Travis Hirschi (editor), *Positiv Criminology*, Sage Publication, 1987, hal. 9. *"...They learn that the positivist accepted the scientific idea that human behavior is determined while the classicists believed in choice or freedom of the will".*

atau ditentukan oleh perangkat biologiknya dan situasi kulturalnya. Implikasi terhadap kriminologi adalah bahwa para kriminolog yang positivistik menolak penjelasan yang berorientasi pada nilai, dan mengarahkan pada aspek-aspek yang dapat diukur dari pokok persoalannya dalam usaha mencari hubungan sebab akibat.<sup>25</sup>

Perkembangan berikutnya adalah kriminologi kritis yang kemunculannya sesudah pemikiran kritis dari disiplin ilmu lain seperti politik, ekonomi, sosiologi dan filsafat.<sup>26</sup> Dengan demikian secara etimologis sudah terdapat perbedaan antara paradigma aliran klasik, positif dan kritis dalam melihat kejahatan. R. C. Kwant menyatakan;

"Kata kritis berasal dari bahasa Yunani "kriein" artinya "memisahkan", "memerinci". Sehingga dapat dikatakan mempunyai sikap atau pemikiran yang kritis jika orang dapat membuat pemisahan, perincian antara yang bernilai dan yang bukan, arti dan bukan arti, baik dan jelek. Sehingga kritis adalah penilaian atas nilai".<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> I.S. Susanto, *Op Cit.*

<sup>26</sup> "... Filsafat kritis adalah filsafat yang berfikir metodis, logis, bertata tertib dan secara tegas mendasarkan diri pada fenomena-fenomena yang dialami oleh manusia-manusia yang nyata serta dihasilkan oleh ilmu-ilmu yang relevan. Filsafat ini dipertanggungjawabkan secara intelektual untuk melakukan apa yang sebetulnya diharapkan dari setiap orang yang tidak hanya mau membebek saja, yang tidak hanya mau menelan mentah-mentah apa yang sudah dikunyah sebelumnya oleh pihak-pihak lain. Yaitu untuk mengerti, memahami, mengartikan, menilai, mengkritik data-data dan fakta-fakta yang dihasilkan dalam pengalaman sehari-hari dan melalui ilmu-ilmu". Periksa Frans Magnis Suseno, *Berfilsafat Dari Konteks*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hal. 5.

<sup>27</sup> R.C. Kwant, *Manusia dan Kritis*, dalam P. Leenhovors, *Manusia dalam Lingkungan, Refleksi Filsafat Tentang manusia*, (diterjemahkan oleh K.J. Veeger M.A.) Penerbit PT. Gramedia Jakarta, 1970, hal. 280.

Di sisi lain I.S. susanto menggunakan istilah kritis dalam pengertian yang umum sebagai berikut :

"Sebagai cara pandang yang lebih mengarahkan pada proses-proses terbentuknya realitas sosial. Cara pandang ini akan digunakan dalam membahas, memahami dan mempertanyakan realitas sosial yang ada dalam kehidupan sehari-hari, terutama dihubungkan dengan tujuan kehidupan masyarakat dan bernegara, yakni dalam mencapai masyarakat adil dan makmur sebagaimana tersurat dalam Pancasila dan UUD 1945"<sup>28</sup>

Dengan perbedaan tentang tata cara studi ini khususnya dengan aliran klasik dan positiv, maka dijumpai penyebutan yang beragam tentang terminologi kritis ini, misalnya J.E. Sahetapy memberi istilah *kriminologi baru*, *kriminologi sosialis*, *kriminologi radikal*, *kriminologi sayap kiri* atau *kriminologi marxis*.<sup>29</sup>

Gwynn Nettler mengemukakan bahwa perbedaan paradigma antara kriminologi kritis dengan klasik dan positiv terlihat dari proposisi yang mendasari aliran kriminologi tersebut yaitu antara lain: *Situated ideas*, *critical philosophy*, *contra positivism*, *crime defined*, *unjust justice*, *human right denied* dan *liberation promised*.<sup>30</sup>

Dengan demikian upaya untuk menjelaskan kejahatan sifatnya lebih bersifat situasional (*situated ideas*),

<sup>28</sup> I. S. Susanto, Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial, dalam Masalah-masalah Hukum, Majalah Fakultas Hukum Undip, No. 9 tahun XXII-1992, hal. 14.

<sup>29</sup> J.E. Sahetapy, Teori Kriminologi, Suatu Pengantar, *Op Cit*, hal. 47.

terkait dengan faktor-faktor waktu, dan juga berhubungan dengan faktor ekonomi. Critical philosophy dimaksudkan bahwa kriminologi kritis dalam usaha melihat dan menjelaskan perilaku jahat didasarkan pada filsafat fenomenologi<sup>31</sup> yang berasumsi bahwa orang berpikir dalam konteks baik waktu maupun tempat, dengan demikian pasti ada lebih dari satu cara berfikir.

Adapun yang dimaksud dengan *Contra positivism* dimaksudkan bahwa kausal kriminologi kritis tidak puas dengan cara berpikir kausal yang dilakukan oleh kriminologi konvensional, yang sifatnya mekanistik. Oleh karena itu kejahatan menurut kriminologi kritis adalah dirumuskan oleh mereka yang berkuasa, sehingga menurut Gwynn Nettler "*Crime is one of the words used to describe the wrongs we do ourselves and others*".

Demikian juga I.S.Susanto berpendapat bahwa fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial,<sup>32</sup> yang berarti kita

---

<sup>30</sup> Gwynn Nettler, Op Cit, hal. 207-211.

<sup>31</sup> "Istilah fenomenologi berasal dari kata fenomenon dan biasanya diucapkan fenomen atau gejala. Menurut para filsuf fenomenologi, suatu fenomen tidak harus dapat diamati dengan indra, Suatu fenomen dapat juga dilihat secara rohani, tanpa lewat indra. Fenomen tidak harus suatu peristiwa. Bagi seorang penganut fenomenologi, yang dimaksud dengan fenomen adalah apa yang menampakkan diri dalam dirinya sendiri, apa yang menampakkan diri seperti apa adanya, apa yang jelas di hadapan kita". Periksa, Ali Mudhofir, Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat, Penerbit Leberty Yogyakarta, 1988, cet-I, hal. 71

<sup>32</sup> "Konstruksi sosial sangat berkaitan dengan realitas sosial, realitas sosial dapat diartikan sebagai kenyataan tentang kejadian-kejadian dan sebagai gambaran tentang kenyataan atau pengetahuan tentang kenyataan, yang pertama menggambarkan tentang kejadian-kejadian di dalam masyarakat yang dapat dilihat, didengar dan dibaca di dalam kehidupan sehari-hari atau dapat dipandang sebagai realitas tentang fenomena, sedangkan yang kedua merupakan gambaran atau pengetahuan yang kita miliki tentang kenyataan sosial atau realitas sosial. Kedua realitas sosial tersebut bukanlah suatu keadaan atau kenyataan yang adanya seakan-akan "jatuh dari langit" akan tetapi keberadaannya karena diadakan atau istilah sosiologisnya "sebagai konstruksi sosial". I. S. Susanto Op cit. Hal. 14.

masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu sebagai suatu kejahatan, maka orang-orang tertentu memenuhi batasan sebagai penjahat. Ini berarti bahwa kejahatan dan penjahat bukanlah fenomena yang berdiri sendiri yang dapat diidentifikasi dan dipelajari secara obyektif oleh ilmuwan sosial.<sup>33</sup>

Kriminologi kritis dalam memandang Sistem Peradilan Pidana (SPP) dalam aktivitasnya bersifat diskriminatif. Pada akhirnya kriminologi kritis berusaha atau menjanjikan kebebasan (*liberation promised*), dimana hak asasi manusia merupakan batu pijakan utamanya dalam melihat keseluruhan persoalan, baik proses kriminalisasi, sampai pada proses penegakan hukum.<sup>34</sup>

Selanjutnya Ian Taylor et al. Pelopor dari new criminology, mengungkapkan bahwa pendekatan baru ini berusaha melakukan penelitian dan pemahaman ilmiah terhadap kejahatan dan diperlukan guna mengungkap:

"The wider origins of the deviant act, immediate origin of the deviant act, the actual act, immediate origins of social reaction, wider origin of devian reaction, the outcome of the social reaction on deviant's further action, the nature of the deviant process as a whole"

---

<sup>33</sup> I. S. Susanto, Op Cit. Hal. 8-13.

<sup>34</sup> Gwynn Nettler, Op Cit, hal. 207-211.

Permasalahan mendasar atau akar yang lebih luas dari perilaku menyimpang dapat dijelaskan dengan melihat kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkan perilaku menyimpang dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan, kemakmuran dan otoritas serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat.

Di sisi lain kriminologi kritis juga berusaha untuk mengetahui faktor-faktor pencetus langsung dari perilaku menyimpang (*immediate origin of the deviant*), sebagai akibat tanggapan, reaksi dan perwujudan tuntutan-tuntutan struktural dalam pengertian bahwa manusia mungkin secara sadar memilih jalan menyimpang sebagai cara pemecahan masalah-masalah pertentangan.

Disamping itu kriminologi kritis juga bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tindakan nyata dengan keyakinan pelaku (*the actual act*), antara *rasionalitas optimum* yang dipilih manusia dengan perilaku yang dikerjakan dalam kenyataan, oleh karena selalu terdapat hubungan antara pilihan individu dengan tindakan. Jadi yang dibutuhkan disini adalah pemahaman atas dinamika sosial yang melatar-belakangi tindakan-tindakan.

Reaksi-reaksi sosial (*immediate origins of social reaction*) yang dilakukan oleh orang-orang, kelompok-

kelompok (penguasa) atau alat-alat pengendali sosial, terutama dengan menggunakan hukum pidana terhadap penyimpangan. Mempelajari akar yang luas daripada reaksi sosial terhadap pelaku (*wider origin of deviant reaction*). Reaksi pelaku atas reaksi sosial yang diberikan kepadanya (*the outcome of the social reaction on deviant's further action*). Serta mempelajari sifat dari proses perilaku menyimpang secara keseluruhan (*the nature of the deviant process as a whole*) merupakan bidang kajian dari kriminologi kritis.<sup>35</sup>

Sehingga kriminologi dalam studinya tidak terhenti pada pengertian kejahatan sebagaimana telah ditentukan Undang-undang (aliran klasik dan positiv) serta fenomenanya tetapi juga diarahkan pada proses pembuatan undang-undang (kriminalisasi) yang merupakan salah satu sarana pengendali sosial (*social control*), maupun bekerjanya hukum.

Kriminologi kritis tidak hanya mempelajari perilaku orang-orang yang didefinisikan sebagai kejahatan, akan tetapi juga perilaku dari agen-agen kontrol (aparatus penegak hukum), disamping juga mempertanyakan dijadikannya tindakan-tindakan tertentu sebagai

---

<sup>35</sup> Ibid.

kejahatan. Khusus terhadap UU studi kritis yang dapat dilakukan menurut I.S.Susanto adalah:

"Terhadap perundang-undangan perlu dikaji tentang substansinya, yaitu seberapa jauh cacat yang dimilikinya, seperti kepentingan-kepentingan apa yang ada di balik UU, siapa atau kelompok masyarakat mana yang akan memperoleh keuntungan/manfaat lebih besar dari pengaturan atau sebaliknya yang akan dirugikan, apakah UU tersebut sudah cukup adil, apakah sanksinya memadai dan manusiawi, dan sebagainya".<sup>36</sup>

Demikian juga terhadap penegak hukum dengan menggunakan kriminologi kritis kiranya dapat diungkapkan kepentingan-kepentingan dan juga hal-hal yang melatarbelakanginya, baik sebagai individu maupun sebagai organisasi dalam interaksinya dengan pelanggar, korban serta masyarakat pada umumnya, sehingga menghasilkan penegakan hukum yang bersifat selektif.<sup>37</sup> Sementara dimensi korban tentunya menyangkut persepsinya tentang apa yang dipandang sebagai kejahatan, kepentingan yang ada, kesadaran dan sikap korban terhadap hak-haknya.<sup>38</sup>

Mencermati dari apa yang telah diuraikan tersebut di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa objek studi kriminologi, terutama kriminologi kritis pada dasarnya adalah sistem peradilan pidana itu sendiri, karena

---

<sup>36</sup> I.S. Ssanto Op Cit, hal. 17.

<sup>37</sup> Ibid.



menurut **James M. Henslin** dalam mempertimbangkan kejahatan sebagai suatu masalah sosial, maka kita harus melihat juga paling tidak aspek yang nyata yaitu sistem peradilan pidana.<sup>39</sup> Dikemukakan pula bahwa "*We cannot adequately understand crime as a social problem, however, without examining the system that deals with it*".<sup>40</sup>

Sementara itu **Muladi** mengatakan, bahwa sebagai suatu sistem, maka peradilan pidana dalam aktivitasnya tidaklah dapat dilihat sebagai *deterministic system* yang bekerjanya dapat ditentukan secara pasti, namun harus dilihat sebagai *probabilistic system* yang hasilnya secara tidak pasti tidak dapat diduga.<sup>41</sup>

Menurut **Alan Coffey et. al**<sup>42</sup>. Agar supaya pendekatan konsep peradilan pidana sebagai suatu sistem dapat dilihat, maka digunakan tiga komponen utama yaitu input dari sistem, proses dan output, dan output yang merupakan hasil dari suatu proses sistem tersebut merupakan umpan balik terhadap keseluruhan sistem.

Dalam konteks baik sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk

---

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> "*In considering crime as a social problem, we must also look at a less obvious aspect; the criminal justice system*", James M. Henslin, *Social Problem*, second edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1990, hal. 199.

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Muladi, *Op cit* hal. 15.

<sup>42</sup> Alan Coffey et.al, *An Introduction to the Criminal Justice System and Proses*, Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Jersey, hal. 84.

mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan.

Sedangkan menurut **Gordon B. Davis** bahwa pemahaman pengertian *system* dalam hal ini harus dilihat dalam konteks baik sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *abstract system* dalam arti gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan.<sup>43</sup>

Dengan demikian terlihat jelas bahwa dalam upaya memahami kejahatan dengan pendekatan kriminologi kritis pada dasarnya adalah melakukan studi terhadap peradilan pidana sebagai suatu sistem, yang di dalamnya banyak terkait institusi yang mempunyai fungsi dan peranan yang berbeda namun antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya sangat terkait erat. Tentunya dalam hal ini melihat bagaimana sistem peradilan pidana tersebut melaksanakan peranan dan fungsinya, yang secara eksplisit maupun implisit berbagai ideologi, gagasan, serta kepentingan dalam merespon kejahatan sebagai masalah sosial dapat dilihat.

---

<sup>43</sup> Gordon B. Davis, *Management Information System Conceptual Foundation Structure and Development*, Mc. Graw Hill, Yokyo, Sydney, 1974, hal 81-86 dalam Muladi, Op cit, hal. 15.

Kriminologi kritis ini secara relatif dapat dibedakan antara pendekatan interaksionis dan konflik. Interaksionis simbolik merupakan perspektif Chicago yang mempunyai konsep bahwa perilaku manusia itu bukan merupakan pembawaan dari lahir namun merupakan hasil atau produk lingkungan sosial.<sup>44</sup>

Persoalan mendasar dalam interaksionis adalah bagaimanakah masyarakat itu membentuk seseorang, atau bagaimanakah individu tersebut menciptakan, mempertahankan dan mengubah masyarakat. Dalam konteks kriminologi maka pendekatan interaksionis berusaha untuk menentukan mengapa tindakan-tindakan dan orang-orang tertentu didefinisikan sebagai kriminal di masyarakat tertentu dengan cara mempelajari "persepsi" makna kejahatan yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan. Mereka juga mempelajari makna kejahatan yang dimiliki agen kontrol sosial dan orang-orang yang diberi batasan sebagai penjahat. Disamping itu juga dipelajari makna proses sosial yang dimiliki kelompok yang bersangkutan dalam mendefinisikan seseorang sebagai penjahat.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> "Symbolic interactionism developed from a belief that human behaviour was the product of purely social symbols communicated between individuals...the mind and the self are not innate but are products of the social environment" lihat Frank P. Williams III dan Marilyn D. Mc. Shane, *Criminology Theory*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1988, hal. 38-39.

<sup>45</sup> I.S. Susanto, Op cit.

Hal ini dikarenakan menurut Weber ada realitas di belakang struktur sosial yang makro, yang merupakan interaksi simbolik yang bermakna antara manusia.<sup>46</sup> Oleh karena itu dalam penjelasan perilaku devian para interaksionis menekankan pada peranan dari makna (*meaning*). Goode mengemukakan tiga kunci pangkal tolak untuk para interaksionis yaitu; pertama orang beraksi berdasarkan makna (*meaning*). Kedua makna timbul karena adanya interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sangat dekat (*intimate others*), dan ketiga makna terus menerus berubah karena adanya interpretasi terhadap obyek, orang lain dan situasi.<sup>47</sup> Sehingga Gwyn Nettler menempatkan penyebab perilaku kita dalam intepretasi kita terhadap realitas.<sup>48</sup>

Sebaliknya pendekatan konflik lebih memfokuskan studinya dalam mempertanyakan kekuasaan dalam mendefinisikan kejahatan. Menurut kriminologi konflik, orang berbeda karena memiliki perbedaan kekuasaan dalam mempengaruhi perbuatan dan bekerjanya hukum. Secara umum dikatakan bahwa mereka yang memiliki tingkat kekuasaan yang lebih besar mempunyai kedudukan yang lebih baik (menguntungkan) dalam mendefinisikan perbuatan-perbuatan

---

<sup>46</sup> J.E. Sahetapy, *Opp cit.* Hal. 2.

<sup>47</sup> *Ibid.*

yang bertentangan dengan nilai-nilai dan kepentingannya sebagai kejahatan.

Pandangan konflik bertolak pangkal dari anggapan-anggapan dasar bahwa konflik merupakan gejala yang melekat pada setiap masyarakat, sehingga setiap masyarakat selalu berada dalam proses perubahan yang tidak pernah berakhir. Juga merupakan anggapan dasar bagi para penganut pendekatan konflik bahwa setiap unsur dalam suatu masyarakat memberikan sumbangan untuk terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial, sedangkan setiap masyarakat terintegrasi karena dominasi oleh sekelompok orang-orang terhadap sekelompok orang-orang lain.<sup>49</sup>

Konflik juga dapat terjadi adanya ketidak-seimbangan (*disequilibrium/inbalances*) aspek-aspek yang ada dalam masyarakat atau antara kelompok-kelompok sosial atau antara keduanya yaitu antara kelompok sosial dengan aspek-aspek yang ada dalam masyarakat.<sup>50</sup> Perbedaan dan ketidaksetaraan tersebut dapat bersumber dari kekuasaan yang dimiliki, penguasaan sumber-sumber ekonomi. Sehingga

---

<sup>48</sup> "Symbolic interactionism locates the causes of our behaviours in our interpretations of reality" periksa Gwynn Nettler, Op cit, hal. 264.

<sup>49</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik, Penerbit CV. Agung, Semarang, 1990 hal. 6, lihat juga Ronny Hanitijo Soemitro, Masalah-masalah Sosiologi Hukum, Penerbit Sinar Baru Bandung, Cet-I, 1984, hal. 35, lihat juga dalam Rony Hanitijo Soemitro, Sdi Hukum dan Masyarakat, Penerbit Alumnus Bandung, 1985, hal. 27.

menurut James M. Haslin dari persepektif konflik ini, kejahatan merupakan ciri yang melekat dari masyarakat, dimana setiap orang berkompetisi dalam memperoleh sumber atau barang yang langka dan terbatas.<sup>51</sup>

Bertolak dari pendekatan konflik ini, derivasi teori yang terkenal adalah teori labeling dengan Howard Becker sebagai tokoh utamanya, dan Edwin Lemert. Teori labeling pada dasarnya menyepakati bahwa proses pemberian label merupakan penyebab seseorang untuk menjadi jahat. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, adanya label akan menimbulkan perhatian masyarakat terhadap orang yang diberi label. Hal ini akan menyebabkan masyarakat di sekitarnya memperhatikan terus-menerus orang yang diberi label tersebut. Kedua adanya label mungkin akan diterima oleh individu tersebut dan berusaha untuk menjalani sebagaimana label yang dilekatkan pada dirinya, dan salah satu proses tersebut akan menjelaskan kejahatan dan menciptakan karir penjahat.

**Howard Becker** dalam melihat perilaku menyimpang (deviance) berpendapat sbb:

---

<sup>50</sup> "Conflict theorists focus on disequilibrium (inbalances) between aspects of societies or between other social groups or both", Ronald A. Hardean, et. Al. *Confronting Social Problems*, West Publishing Company, St. Paul New York, 1984, hal. 9.

<sup>51</sup> "From the conflict perspective, violence is an inherent feature of human society, with people competing for scarce and limited resources, violence is to be expected", James M. Henslin, Op. Cit. 1964.

Social groups create deviance by making the rules whose infraction constitutes deviance, and by applying those rules to particular people and labeling them as outsiders. From this point of view, deviance is not a quality of the act the person commits, but rather a consequence of the application by others of rules and sanctions to an "offender". The deviant is one to whom that label has successfully been applied, deviant behaviour is behaviour that people so label".<sup>52</sup>

Dalam melihat kejahatan sebagai hasil kreasi dari kelompok sosial yang ada maka D. Stanley Eitzen menyatakan bahwa kejahatan tersebut diciptakan dan dipertahankan pada tiga level yaitu;

From this perspective (labeling-pen) deviance is created and sustained at three levels;

1. The first level is that of collective rule making. The rules of society created deviance, What is deviant varies from society to society and from one period to another within a society.
2. The second level of creating and sustaining deviance is that of interpersonal relations.
3. Finally, there is the formal level of the organizational processing of deviants. Here the focus on the public and private agencies that process the wayward, for examples; the courts, prisons, and mental hospital.<sup>53</sup>

Edwin Lemert juga menjelaskan kejahatan dari perspektif reaksi sosial, dimana proses-proses seseorang

---

<sup>52</sup> Howard S. Becker, *Outsiders, Studies In The Sociology Of Deviance*, The Free press, New York, 1973, hal. 9.

<sup>53</sup> D. Stanley Eitzen, *Crime and Justice, Social Problem*, Allyn and Bacon, Inc, 1986 hal. 432-433.

diasingkan sebagai pelaku penyimpangan dan akibatnya karir kehidupannya terorganisasikan atau terbentuk secara pribadi di sekitar status-status sebagai pelaku penyimpangan. Dalam kaitannya dengan hal ini Lemert memperkenalkan perbedaan utama antara penyimpangan primer (primary deviant) dan penyimpangan sekunder (secunder deviant).<sup>54</sup> Penyimpangan primer merupakan proses dengan mana cap (label) diberikan pada seseorang sedangkan penyimpangan sekunder adalah reaksi seseorang terhadap label yang diberikan masyarakat terhadap dirinya.

Hal terpenting dalam usaha mengungkap kejahatan dengan pendekatan teori labeling ini adalah digunakannya metode mengukur/mengetahui adanya kejahatan dengan menggunakan *self report study* yaitu melakukan interview terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap/tidak diketahui oleh pihak polisi.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Frank P. William III dan Marilyn D McSane, *Op cit* hal. 38.

<sup>55</sup> *Ibid.*



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika Di Kalangan Anak-anak dapat diuraikan sebagai berikut :

##### A. Birokrasi dan Mekanisme Penegakan Hukum Penyalahgunaan Psikotropika di Kalangan Anak-anak.

###### 1. Birokrasi Yang Terlibat.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.<sup>16</sup> Untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum tersebut, implementasinya dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum.

Sedangkan birokrasi modern menurut Max Weber bercirikan sebagai berikut:<sup>17</sup>

a. Birokrasi merupakan struktur sosial yang terorganisir secara rasional dan formal.

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, BPHN, Penerbit Sinar Baru, Bandung, tt, hal. 24.

<sup>17</sup> Margaret M. Poloma, Sosiologi Kontemporer, diterjemahkan oleh Tim Penerjemah, Yasmaga Edisi I, Cet. Ke-4, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hal. 31.

- b. Meliputi suatu pola kegiatan yang memiliki batas-batas jelas.
- c. Kegiatan-kegiatan tersebut secara ideal berhubungan dengan tujuan-tujuan organisasi.
- d. Jabatan-jabatan dalam organisasi diintegrasikan ke dalam keseluruhan struktur birokratis.
- e. Status-status dalam birokrasi tersusun ke dalam susunan yang bersifat hierarkhis.
- f. Berbagai kewajiban serta hak-hak di dalam birokrasi dibatasi oleh aturan-aturan yang terbatas serta terperinci.
- g. Otoritas pada jabatan, bukan pada orang.
- h. Hubungan-hubungan antara orang dibatasi secara formal.

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Psikotropika di kalangan anak-anak, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan penegakan hukum lainnya.

Perbedaan yang terjadi bila dibandingkan dengan tindak pidana lainnya lebih banyak diakibatkan sebagai suatu konsekuensi atas status pelaku yang masih berstatus anak-anak. Dengan statusnya sebagai anak-anak, maka dengan sendirinya proses hukum terhadapnya ada perbedaan-perbedaan dibandingkan dengan pelaku dewasa.

Perbedaan dimaksud terletak pada hukum acara dan pemidanaan yang akan dijatuhkan serta tindakan lebih lanjut atas vonis yang dijatuhkan oleh Hakim.

Di samping perbedaan tersebut di atas, birokrasi yang terlibat di dalamnya juga berbeda dibandingkan dengan birokrasi yang terlibat dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan selain anak-anak.

Adapun birokrasi yang terlibat adalah sebagai berikut:

a. Kepolisian.

Yang dimaksud dengan Penyidik terhadap penyalahgunaan Psikotropika adalah Penyidik Kepolisian. Untuk dapat menangani perkara anak dalam tingkat penyidikan, penyidik harus mendapatkan keputusan tersendiri dari Kapolri bahwa penyidik tersebut sebagai penyidik tindak pidana anak. Ketentuan tentang syarat menjadi penyidik diatur dalam Pasal 41 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sebagai berikut:

Pasal 41.

(1) Penyidikan terhadap Anak Nakal, dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau

pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

(2) Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

a. telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;

b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

(3) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebankan kepada:

a. Penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa; atau

b. Penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Memperhatikan ketentuan tersebut, berarti untuk dapat menjadi penyidik selain harus mendapatkan keputusan dari Kapolri, juga harus benar-benar memiliki minat dan perhatian terhadap permasalahan anak. Persyaratan ini dimaksudkan agar dalam melakukan tugas penyidikan, penyidik tidak mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan anak khususnya aspek perlindungan terhadap anak.

Memang tugas penyidikan tersebut dapat dibebankan kepada penyidik lain, namun demikian tetap dipersyaratkan dalam kondisi tertentu, yang berarti harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

b. Kejaksaan.

Ketika berkas perkara hasil penyidikan telah dilimpahkan ke Kejaksaan, maka Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk untuk menangani perkara anak juga harus memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana halnya penyidik.

Adapun Persyaratan sebagai Jaksa Anak tersebut diatur dalam pasal 53 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sebagai berikut:

Pasal 53.

- (1) Penuntutan terhadap Anak Nakal dilakukan oleh Penuntut Umum, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
  - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
- (3) Dalam Hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebankan kepada Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Dalam praktek ketentuan pasal 53 Ayat (3) UU No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dilakukan berdasarkan P-16 (Surat Perintah Kepala

Kejaksaan Negeri Semarang Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Tindak Pidana).

Untuk dapat diangkat sebagai Penuntut Umum dalam perkara anak, Jaksa Penuntut Umum juga harus memiliki minat dan perhatian terhadap permasalahan-permasalahan anak. Hal ini juga dimaksudkan untuk melindungi kepentingan anak dalam proses penuntutan.

#### c. Pengadilan.

Pada saat Jaksa Penuntut Umum telah melimpahkan berkas perkara anak ke Pengadilan, selanjutnya akan ditetapkan hari sidang serta Hakim yang menyidangkan perkara anak tersebut.

Penunjukan hakim juga tidak dapat dilakukan secara sembarangan, karena hanya hakim tertentu saja yang dapat ditunjuk untuk menyidangkan perkara anak.

Persyaratan dimaksud diatur dalam Pasal 9 dan 10 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sebagai berikut :

##### Pasal 9

Hakim ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi.

Pasal 10.

Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 adalah :

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum; dan
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak

d. Balai Pemasyarakatan.

Dalam perkara anak juga terdapat lembaga yang disebut dengan Balai Pemasyarakatan. Keberadaan Balai Pemasyarakatan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan anak dalam setiap tahap pemeriksaan yang harus dilalui.

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak diatur sebagai berikut:

Pasal 33.

Petugas Pemasyarakatan terdiri dari:

- a. Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman.
- b. Pekerja Sosial dari Departemen Sosial; dan
- c. Pekerja Sosial Sukarela dari Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 34.

(1) Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a bertugas:

- a. Membantu memperlancar tugas Penyidik, penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik di dalam

maupun di luar Sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

- b. Membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.
- (2) Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, bertugas membimbing, membantu dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Departemen Sosial untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pekerja Sosial mengadakan koordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dilihat bahwa pihak yang terlibat aktif dalam setiap tahap pemeriksaan mulai dari penyidikan hingga di persidangan adalah petugas Pemasyarakatan dari Departemen Kehakiman yang sekarang berganti nama dengan Departemen Hukum dan Perundang-undangan.

e: Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Pemasyarakatan terhadap terpidana anak, harus disendirikan atau dipisahkan dari pemasyarakatan dewasa. Hal ini dimaksudkan agar



*treatment* atau perlakuan terhadap terpidana anak tersebut juga dibedakan dengan terpidana dewasa.

Ketentuan tentang hal ini terdapat dalam pasal 60 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sebagai berikut:

Pasal 60.

- (1).Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa.
- (2).Anak yang ditempatkan di lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61.

- (1).Anak Pidana yang belum selesai menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan telah mencapai umur 18 (delapan belas tahun) tahun dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan.
- (2).Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan secara terpisah dari yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.

## 2. Mekanisme Penegakan Hukum.

Mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana anak, secara umum sama dengan mekanisme penyelesaian tindak pidana yang pelakunya dewasa. Dengan demikian

tahap-tahap yang harus dilalui juga sama. Perbedaannya hanya terletak pada keterlibatan Petugas Pemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan yang bertugas membuat studi kemasyarakatan tentang latar belakang si pelaku tindak pidana anak ini.

Latar belakang yang digali meliputi kehidupan pribadi anak yang menyangkut masalah orang tua yang merawat, atau walinya, taraf ekonomi keluarga, tingkat pendidikan anak, riwayat kesehatan. Disamping itu juga didukung dengan data-data sosial meliputi lingkungan sosial tempat anak tersebut dibesarkan, riwayat pergaulan di sekolah dan di lingkungan serta catatan-catatan tindak pidana yang pernah dilakukan sebelumnya.

Petugas pemasyarakatan harus proaktif terhadap setiap tahap pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga penjatuhan vonis oleh Hakim.

Peran petugas pemasyarakatan ini diatur dalam Pasal 34 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sebagai berikut :

Pasal 34.

(1) Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a bertugas:

- a. Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar Sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.
  - b. Membimbing, membantu, dan mengawasi Anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.
- (2) Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, bertugas membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Departemen Sosial untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
  - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pekerja Sosial mengadakan koordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan.

Adapun mekanisme bekerjanya Sistem Peradilan Pidana (SPP) dari tiap-tiap sub sistem tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tahap Penyidikan.

Pada tahap penyidikan, penyidik dapat melakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku (pasal 43 KUHP). Namun demikian lamanya waktu penahanan terhadap pelaku tindak pidana anak berbeda dengan lamanya penahanan pelaku tindak pidana dewasa.

Adapun lama penahanan pada saat penyidikan adalah 20 (dua puluh) hari. Dan apabila ternyata dalam waktu tersebut waktunya belum mencukupi dapat dilakukan perpanjangan penahanan selama 10 hari. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut ternyata penyidik belum menyerahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, maka tersangka harus dibebaskan demi hukum.

Penahanan terhadap anak harus dibedakan atau dipisahkan dengan tahanan dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum si anak.

Pada saat penyidikan, penyidik harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 42 UU No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sebagai berikut:

Pasal 42.

- (1).Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan.
- (2).Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.
- (3).Proses penyidikan terhadap perkara Anak Nakal wajib dirahasiakan.

Penahanan tersebut harus memperhatikan kepentingan anak dengan mengedepankan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sebagai berikut :

Pasal 45.

- (1). Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.
- (2). Alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
- (3). Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.
- (4). Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus dipenuhi.

Memperhatikan ketentuan tersebut terlihat bahwa kepentingan anak secara ideal telah dilindungi secara hukum.

b. Tahap Penuntutan.

Sebelum keluarnya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, di Kejaksaan sudah ada semacam pedoman dari Jaksa Agung dalam bentuk Surat Edaran yaitu : Surat Edaran No.02/JA/6/1989 tanggal 10 Juli 1989 tentang Penuntutan Terhadap

Anak, yang pada prinsipnya adalah sebagai berikut:

1). Pra penuntutan.

- a) Segera setelah menerima SPDP agar diperhatikan usia dari tersangka.
- b) Apabila usia terangkamasih di bawah umur 16 tahun tahun segera pastikan kepada penyidik tentang usia tersangka dengan mencari bukti-bukti autentik seperti akte kelahiran atau akte kenal lahir, data di sekolah, kelurahan, dan lain-lain.
- c) Setelah usia tersangka dapat diketahui secara pasti berdasarkan alat bukti yang sah maka dilakukan kegiatan sebagai berikut:
  - (1). Melaporkan secara hierarkhis tentang identitas tersangka, kasus posisi, keterangan yang dilaporkan dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
  - (2). Apabila tersangka belum berumur 10 tahun pada saat melakukan perbuatan tersebut, agar Jaksa Peneliti (Calon Penuntut Umum) melakukan pendekatan kepada penyidik untuk tidak melanjutkan penyidikan tetapi cukup diberikan bimbingan/penanganan secara bijaksana kepada tersangka maupun kepada orang tua/walinya sehingga perkaranya tidak perlu dikirimkan ke Kejaksaan (SE.02/JA/6/89).
  - (3). Apabila tersangka di tahan, hendaknya disarankan supaya segera dibebaskan, melalui prosedur atau ketentuan penangguhan atau pengalihan jenis penahanan, sedangkan kalau masih dipandang perlu untuk melakukan penahanan, disarankan agar tempat penahanan pada rutan/lembaga tidak disatukan dengan tahanan dewasa.
- d) Mengikuti secara aktif setiap perkembangan penyidikan untuk menghindari penyelesaian perkara yang berlarut-larut.
- e) Dengan penyerahan tahap pertama agar disamping meneliti syarat formal dan

material juga disarankan memeriksa hasil penelitian pra yuwana (Bispa) setempat.

- f) Pendapat Prayuwana (Bispa) benar-benar diperhatikan dan dimanfaatkan dalam penyelesaian perkara.
- g) Apabila tersangka anak dibawah umur tersebut melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa agar penuntutan terhadap masing-masing terdakwa dilakukan secara terpisah (pasal 142 KUHP).
- h) Dalam penyerahan tahap kedua supaya Jaksa benar-benar meneliti dan mempertimbangkan kesehatan, masa depan anak dan penggunaan kewenangan untuk menahan atau tidak menahan tersangka anak di bawah umur.

2). Penuntutan.

- a. Perkara yang tersangkanya anak di bawah umur supaya diprioritaskan penyelesaiannya.
- b. Tata tertib sidang anak di bawah umur harus sesuai dengan peraturan menteri kehakiman No. M-06-UM-01-06 tahun 1983 tentang tata cara persidangan dan tata ruang sidang.
- c. Tuntutan terhadap anak di bawah umur dilakukan sebagai berikut:
  - 1). Apabila terdakwa anak di bawah umur tersebut tidak ditahan, supaya mengajukan tuntutan agar anak tersebut dikembalikan kepada orang tua/wali untuk dididik dan kalau orang tua/wali menolak, hendaknya dituntut untuk diserahkan kepada pemerintah sebagai anak negara atau diserahkan kepada orang/suatu badan tertentu untuk mendapat pendidikan sebagaimana mestinya tanpa pidana apapun (pasal 45 dan 46 KUHP) atau.
  - 2). Dalam hal ditahan, agar Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara minimum sama dengan masa selama dalam tahanan, atau
  - 3). Dalam hal Jaksa Penuntut Umum memandang perlu menuntut pidana penjara agar mempedomani SE Jaksa Agung RI No. SE-001/JA/4/1995 tentang pedoman tuntutan pidana.

Setelah keluarnya UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, maka selain pedoman tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak maka dikeluarkan Surat Nomor : B-129/ES/Epo.1/2/1999 tanggal 11 Februari 1999 perihal memenuhi ketentuan Pasal 53 (1) UU No. 3 Tahun 1997 dalam hal pengusulan Jaksa sebagai Jaksa untuk Pengadilan Anak agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Telah berpengalaman sebagai Jaksa Penuntut Umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
- (2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Dari uraian tersebut terlihat bahwa memang ada upaya yang serius dari institusi Kejaksaan dalam hal penyelesaian perkara anak.

Dengan demikian upaya perlindungan hukum terhadap kepentingan anak, sudah mendapatkan perhatian yang serius dari Kejaksaan sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana yang mempunyai peran cukup menentukan atas tindak lanjut dari anak yang melakukan tindak pidana dan



terhadapnya dikenakan proses pemidanaan melalui Sistem Peradilan Pidana (SPP).

Tahap penuntutan ini terbagi dalam dua tahap yaitu : tahap pra penuntutan dan tahap penuntutan.

Dalam tahap pra penuntutan dimulai ketika Jaksa menerima penyerahan tahap I dari penyidik berupa berkas perkara yang diserahkan dari penyidik kepada Jaksa, kemudian Jaksa melakukan penelitian berkas tersebut, selanjutnya Jaksa menentukan sikap apakah berkas perkara sudah lengkap sehingga dikeluarkan P-21 (Surat Pemberitahuan Penyidikan. Sudah Lengkap) atau justru sebaliknya berkas perkara belum lengkap dan perlu dilengkapi untuk selanjutnya diterbitkan P-18 (Surat Pemberitahuan Penyidikan Belum Lengkap) dan diberikan petunjuk dengan P-19 (Surat Pengembalian Berkas Perkara Untuk Dilengkapi) disertai dengan lampiran petunjuk jaksa peneliti untuk dilengkapi dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari.

Dalam praktek sering terjadi pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi tersebut melebihi tenggang waktu yang sudah ditentukan oleh undang-

undang (KUHP) karena kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Untuk penanggulungan hal tersebut diupayakan adanya koordinasi yang harmonis antara Jaksa Penuntut Umum dengan Penyidik, karena KUHP pun tidak memberikan aturan yang tegas mengenai batasan berapa kali berkas perkara tersebut harus bolak-balik di tangan jaksa dan penyidik.

Selanjutnya tahap penuntutan dimulai ketika berkas sudah dinyatakan lengkap maka Jaksa Penuntut Umum menerima penyerahan tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) dari penyidik, segera Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan (P-28) dan melimpahkannya kepada Pengadilan. Pada tahap ini, Jaksa berwenang untuk menahan terdakwa selama 10 (sepuluh) hari. Namun bila diperlukan Jaksa dapat minta perpanjangan kepada Ketua Pengadilan Negeri selama 15 (lima belas) hari. Ketentuan tentang penahanan ini diatur dalam Pasal 46 UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sebagai berikut:

Pasal 46.

- (1). Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.

- (2). Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (3). Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 15 (lima belas) hari.
- (4). Dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari, Penuntut Umum harus melimpahkan berkas perkara anak kepada pengadilan negeri.
- (5). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum dilimpahkan ke pengadilan negeri, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa ketika Jaksa Penuntut Umum dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ternyata tidak mampu menyusun surat dakwaan untuk dilimpahkan ke Pengadilan maka terdakwa harus dibebaskan demi hukum.

Yang menjadi permasalahan adalah ketika, Jaksa menemui kejanggalan bahwa ternyata ketika penerimaan tersangka dan barang bukti, dengan membuat berita acara penerimaan, baru diketahui bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik adalah tidak benar atau fiktif. Namun demikian Jaksa

sudah tidak mampu lagi untuk menghentikan perkara tersebut, mengingat Jaksa sudah mengeluarkan P-21 (Surat Pemberitahuan Penyidikan Sudah Lengkap) yang berarti berkas perkara sudah dinyatakan lengkap.

Dalam praktek kelemahan Undang-undang ini dimanfaatkan oleh penyidik untuk merekayasa Berkas Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga seolah-olah apa yang terjadi atau faktanya adalah seperti apa yang tertuang dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP), padahal sebenarnya kenyataannya tidak demikian.

Penyimpangan ini sering terjadi, namun ketika di persidanganpun, Jaksa, Hakim serta terdakwa tidak dapat berbuat apa-apa, karena baik Jaksa maupun hakim terpaku pada syarat pembuktian.

Alat bukti yang ada misalnya saksi dalam kasus yang "direkayasa" oleh penyidik sudah barang tentu akan mendukung apa yang dibuat oleh penyidik yang merupakan satu korpsnya, karena dalam tindak pidana penyalahgunaan psikotropika rata-rata yang menjadi saksi adalah penyidik (Polri) yang melakukan penangkapan. Hingga kini

belum ada aturan hukum yang dapat mengatasi masalah ini.

Dalam kasus yang seperti ini, baru disadari bahwa penyidik berdasarkan KUHAP telah tumbuh menjadi sebuah institusi yang tidak terkontrol, dan tidak adanya suatu sanksi yang dapat dikenakan atas penyimpangan tersebut.

c. Tahap Pemeriksaan di Persidangan.

Pada tahap pemeriksaan dipersidangan ini, Hakim juga memiliki kewenangan untuk menahan terdakwa seperti halnya dengan penyidik dan penuntut umum. Kewenangan Hakim untuk menahan diatur dalam Pasal 47 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sebagai berikut:

Pasal 47.

- (1). Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.
- (2). Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3). Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

- (4). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan Hakim belum memberikan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pada tahap pemeriksaan Hakim Banding, juga berlaku ketentuan-ketentuan penahanan yang berbeda bila dibandingkan dengan ketentuan penahanan tindak pidana dewasa. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam pasal 48 UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak adalah sebagai berikut :

#### Pasal 48.

- (1). Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim Banding di sidang pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.
- (2). Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3). Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui oleh Hakim. Banding belum memberikan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pemeriksaan pada tingkat Kasasi juga memiliki karakteristik yang melindungi kepentingan anak dengan ketentuan pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sebagai berikut:

Pasal 49.

- (1). Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim Kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.
- (2). Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 25 (dua puluh lima) hari.
- (3). Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan Hakim Kasasi belum memberikan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Hal khusus sehubungan dengan pemeriksaan di persidangan, adalah sidang dilaksanakan secara tertutup. Jadi setelah sidang dinyatakan dibuka, maka hakim akan menyatakan bahwa sidang perkara anak bersifat tertutup untuk umum.

Pada saat persidangan berlangsung Jaksa Penuntut Umum tidak boleh mengenakan toga Jaksa,

maupun pakaian seragam yang lain. Jaksa menggunakan pakaian biasa yang tidak menimbulkan kesan menakutkan bagi terdakwa. Demikian juga dengan Hakim, Hakim tidak diperkenankan mengenakan toga kebesaran cukup dengan pakaian biasa yang tidak menimbulkan rasa takut bagi terdakwa. Hal tersebut di atas dilakukan untuk melindungi psikologis daripada terdakwa anak akan proses persidangan yang dilaksanakan sehingga persidangan dapat berjalan dengan lancar.

Dalam setiap persidangan, maka pihak wali atau orang tua terdakwa harus hadir di persidangan, termasuk juga petugas dari Balai pemasyarakatan. Pada tahap pemeriksaan terdakwa, petugas dari Balai Pemasyarakatan akan memberikan keterangan sebagaimana hasil penelitian kemasyarakatan yang telah disusun sebelumnya.

Rekomendasi dari Petugas Pemasyarakatan ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan tuntutan pidana dan juga akan menjadi bahan pertimbangan bagi hakim sebelum menjatuhkan putusan. Apakah putusan tersebut berupa pemidanaan atau berupa tindakan.



Putusan Hakim ini membawa konsekuensi lanjutan terhadap tindakan / treatment yang akan diberikan kepada anak tersebut.

d. Tahap Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan terhadap terpidana anak atau anak nakal dilakukan secara terpisah dengan terpidana yang sudah dewasa. Hal ini dimaksudkan agar dampak negatif yang mungkin dapat ditularkan dengan cara belajar oleh terpidana dewasa kepada terpidana anak-anak tidak terjadi.

Sebagaimana diketahui bahwa anggapan Lembaga Pemasyarakatan sebagai sekolah kejahatan pada tahap tertentu tidak berlebihan, hal ini dikarenakan pada sifat anak itu sendiri yang memiliki daya *curiosity* (rasa ingin tahu) yang tinggi, sehingga kemungkinan besar terpidana anak yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan tersebut akan sangat terpengaruh oleh perilaku-perilaku negatif yang sangat mungkin ditularkan dari para narapidana dewasa.

Pemisahan terpidana anak ini diatur dalam pasal 60 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sebagai berikut :

Pasal 60.

- (1). Anak didik pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa.
- (2). Anak yang ditempatkan di lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan prundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61.

- (1). Anak Pidana yang belum selesai menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan.
- (2). Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun ditempatkan di lembaga Pemasyarakatan secara terpisah dari yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut diatas juga bertujuan untuk melindungi kepentingan anak. Agar anak nakal yang telah mendapatkan vonis, dapat menjalani pembinaan yang pada akhirnya dimaksudkan untuk mendidik anak nakal tersebut menjadi anak yang tidak nakal dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Pembinaan ini akan disesuaikan dengan minat dan bakat dari anak, sebagai bekal ketika masa hukumannya sudah usai. Yang menjadi permasalahan adalah tidak setiap daerah memiliki lembaga pemasyarakatan anak. Di Kotamadia Semarang saja hingga kini belum memiliki lembaga pemasyarakatan anak secara khusus. Dengan demikian selama ini pemasyarakatan anak masih menjadi satu dengan pemasyarakatan dewasa yakni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Kedung Pane Mijen Semarang.

#### B. Kendala Yang Dihadapi dan Persoalan Yang Timbul.

##### 1. Kendala Yang Dihadapi.

Bahwa dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak, memiliki kendala yang berbeda dibandingkan dengan penyalahgunaan psikotropika di kalangan orang dewasa. Kendala ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut:

##### a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Dilihat dari sudut perundang-undangan, UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika memiliki

kekhususan, yaitu yang terdapat dalam pasal 59 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59.

(1) Barang siapa:

- a. Menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam pasal 4 ayat 2; atau
- b. Memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 6; atau
- c. Mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (3); atau
- d. Mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan; atau
- e. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(2). Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuhratus lima puluh juta rupiah).

(3). Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak

pidana kepada korporasi dikenakan  
pidana denda sebesar  
Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar  
rupiah).

Penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak lebih sering terjadi berupa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) ke-1 huruf c dan e UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Pelanggaran terhadap pasal ini lebih sering terjadi karena memang lebih memungkinkan dibandingkan dengan pelanggaran pasal yang lain.

Persoalan kemudian muncul, karena dalam ketentuan pasal 59 ini terdapat ancaman pidana minimum yaitu 4 (empat) tahun. Jadi secara umum, apabila melakukan penyalahgunaan psikotropika selain golongan I tidak akan diterapkan pasal ini, namun demikian apabila penyalahgunaan psikotropika dimana barang buktinya adalah golongan I, maka akan dikenakan pasal 59 ini.

Ancaman pidana minimum ini selain diluar konteks aturan umum KUHP yang tidak mengenal ancaman minimum, timbul persoalan karena terhadap penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan oleh anak-anak, berdasarkan ketentuan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Hakim dalam

menjatuhkan pidana tidak boleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  dari ancaman hukuman maksimum.

Sehubungan dengan hal tersebut persoalan yang timbul tentu saja akan berkisar pada:

- 1). Terhadap pelaku anak-anak, apakah tepat dikenakan ancaman minimum, apalagi dikaitkan dengan status pelaku yang masih anak-anak yang tentu masa depannya akan menjadi tidak menentu, belum lagi bila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan.
- 2). Terhadap putusan Hakim sudah ada pedoman untuk memutus tidak lebih dari  $\frac{1}{2}$  ancaman maksimum, bagaimana halnya dengan adanya ancaman pidana minimum.
- 3). Terhadap Jaksa Penuntut Umum belum ada pedoman untuk menuntut, apakah dengan ancaman minimum 4 (empat) tahun berarti dengan sendirinya akan berlaku bagi penuntutan untuk tidak boleh menuntut dibawah 2 tahun.

Untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh UU Nomor 5 Tahun 1997 tersebut di atas, karena terdapat hal-hal yang tidak diatur dalam UU yang bersangkutan, maka dapat digunakanlah aturan yang terdapat dalam KUHP

sebagai UU induknya yakni yang terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 45 KUHP :

Jika orang yang di bawah umur dituntut karena melakukan tindak pidana ketika umurnya belum cukup 16 tahun, dapatlah hakim :

Memerintahkan supaya anak yang bersalah itu dikembalikan kepada orangtuanya atau walinya atau pemeliharanya dengan tidak dijatuhkan sesuatu pidana, atau memerintahkan supaya anak yang bersalah itu diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dijatuhkan pidana, yakni jika tindak pidana itu masuk bagian kejahatan atau pelanggaran yang tersebut dalam pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540, serta tindak pidana itu dilakukannya sebelum lalu 2 tahun sesudah putusan yang menyalahkan dia berbuat salah satu pelanggaran itu atau sesuatu kejahatan menjadi tetap, atau memidana yang bersalah itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 KUHP tersebut di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menurut pasal ini agar orang yang melakukan tindak pidana itu tidak dijatuhi hukuman harus memenuhi 2 syarat sebagai berikut :

- Pada waktu dituntut orang itu harus belum dewasa. Yang dimaksudkan "belum dewasa" bagi orang Indonesia menurut LN 1931 BW ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Orang yang umurnya belum mencapai 21 tahun tetapi telah kawin kemudian cerai, dianggap belum dewasa.

- Tuntutan itu mengenai peristiwa pidana yang dilakukan oleh orang yang berumur 16 (enambelas) tahun (pada waktu peristiwa pidana itu terjadi).

2. Apabila kedua syarat itu terpenuhi maka hakim dapat memutuskan salah satu dari tiga kemungkinan :

- Anak tersebut dikembalikan kepada orangtua atau walinya, dengan tidak dijatuhi hukuman apapun.
- Anak itu diserahkan kepada rumah pendidikan anak-anak nakal milik negara untuk memperoleh pendidikan dari negara sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini hanya dapat dilakukan, bila anak itu telah melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran yang termaktub dalam pasal ini dan sebagai recidive (orang yang berulang kali melakukan kejahatan)
- Anak itu dijatuhi hukuman seperti biasa. Dalam hal ini ancaman hukuman dikurangi dengan sepertiganya.

Untuk ketiga macam kemungkinan ini, kepada hakim diberikan kesempatan untuk menimbang tentang



kecakapan rohaninya terdakwa yang masih muda itu. Misalnya hakim berpendapat bahwa anak-anak yang umurnya 9 tahun atau 13 tahun kecakapan akal nya ternyata tidak normal berkembangnya, maka cukup alasan bagi hakim untuk mengirimkan kembali anak-anak itu kepada orang tuanya, wali atau orang yang memeliharanya, dengan tidak dijatuhi suatu hukuman apapun. Akan tetapi apabila hakim menganggap bahwa anak-anak berumur 13 tahun atau 15 tahun yang melakukan kejahatan itu telah berakal yang cukup mampu untuk membedakan, maka pada hakim ada kesempatan pula untuk menjatuhkan hukuman, akan tetapi hukuman yang dijatuhkan itu tidak boleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  maksimum yang diancamkan.

Pasal 47 KUHP :

- (1) Kalau hakim memidana anak yang bersalah itu maka maksimum pidana pokok bagi tindak pidana itu dikurangi  $\frac{1}{3}$  nya.
- (2) Jika kejahatan itu diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka anak itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun.
- (3) Pidana tambahan yang tersebut pada pasal 10 bagian b ke-1 dan ke-3 tidak dijatuhkan.

b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang  
Peradilan Anak.

Undang-undang Peradilan Anak dalam hal tertentu tidak operasional, artinya banyak ketentuan-ketentuan yang dipandang terlalu idealis sehingga penerapannya bagi penegak hukum menjadi sangat mustahil.

Namun demikian yang menjadi permasalahan adalah apakah dalam praktek benar-benar diterapkan sebagaimana dimaksudkan dan dicitacitakan seperti halnya diatur dalam Undang-undang Pengadilan Anak.

Dalam praktek, tidak seideal yang dirumuskan dalam Undang-undang. Banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan pada tiap tahap pemeriksaan. Penyimpangan tersebut antara lain dalam tahap penyidikan misalnya tidak dipisahkannya antara tahanan anak dengan tahanan dewasa. Juga tidak setiap penyidik yang menjadi penyidik dalam perkara anak adalah penyidik yang benar-benar memiliki minat dan perhatian terhadap anak. Jadi pelaksanaannya bersifat seadanya saja. Penyimpangan lain adalah tindakan kekerasan yang dilakukan pada saat pemeriksaan, apabila tersangka anak tidak mengakui tindak pidana yang disangkakan kepadanya.

Dalam tahap penuntutan pun juga demikian, tidak dipisahkannya tahanan anak dengan orang dewasa yakni dititipkan dan disatukan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane Semarang, karena di Kejaksaan sendiri tidak mempunyai ruang tahanan khusus untuk tahanan anak maupun dewasa. Juga tidak setiap Jaksa Penuntut Umum adalah Jaksa Anak karena suatu hal tertentu.

Dalam tahap pemeriksaan di pengadilan pun juga demikian, tidak dipisahkannya tahanan anak dengan orang dewasa yakni dititipkan dan disatukan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane Semarang, karena di Pengadilan sendiri tidak mempunyai ruang tahanan khusus untuk tahanan anak maupun dewasa. Juga tidak setiap Hakim adalah Hakim Anak karena suatu hal tertentu.

Disamping penyimpangan tersebut juga terdapat penyimpangan lain seperti Petugas dari Bapas yang tidak selalu mendampingi tiap tahap pemeriksaan. Prakteknya Petugas Pemasyarakatan hanya mengumpulkan data-data formal yang nanti dijadikan bahan bagi hakim sebelum memutus perkaranya dan Jaksa Untuk melakukan tuntutan

pidana. Dengan demikian banyak penyimpangan terjadi pada tiap tahap pemeriksaan.

Ketentuan penahanan sebagaimana dimaksud pasal 45 UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak tersebut nampaknya dalam kondisi Sistem Peradilan Pidana (SPP) kita yang sekarang ini sulit untuk dilaksanakan. Bahkan ketentuan ini seperti tidak menginjak bumi. Bagaimana mungkin mereka yang ditahan akan terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan kebutuhan sosialnya. Sulit rasanya, bahkan mereka yang tidak ditahanpun belum tentu dalam kesehariannya mendapatkan jaminan atau dapat terpenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dalam praktek hal tersebut di atas berkaitan dengan anggaran negara yang tersedia terkadang tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut di atas.

## 2. Persoalan Yang Muncul.

### a. Pelaku Yang Masih Anak-anak.

Secara psikologis, masa anak-anak adalah suatu tahap dalam perjalanan hidup manusia yang harus dilalui sebelum berangkat dewasa. Pada tahap tersebut anak mengalami pertumbuhan yang pesat

baik secara fisik maupun mental. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara hukum anak-anak dianggap belum dewasa sehingga pertanggungjawabannya dalam hal melakukan suatu tindak pidana juga masih mendapatkan kekhususan. Hal ini tidak lain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan anak sebagaimana yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Tiap-tiap negara mempunyai batasan tersendiri tentang kriteria anak, namun demikian umumnya batasannya bervariasi antara 16, 18 hingga 21 tahun. Sementara berdasarkan UU Peradilan Anak, usia kategori anak di Indonesia adalah 18 tahun.

Batasan usia 18 tahun ini itupun masih ada ketentuan-ketentuan yang mengikat bagi penegak hukum yaitu, anak yang berusia di bawah 8 tahun, tidak dapat dipidana.

Memang tidak ada kepastian yang jelas tentang kedewasaan anak, karena masing-masing anak memiliki tingkat pertumbuhan yang berbeda, terkadang juga tidak seimbang antara bentuk fisik dan pertumbuhan mental. Namun demikian secara umum atau rata-rata adalah berkisar 18 tahun.

Dalam kondisi mental yang belum dewasa, maka dapat dipahami bila perbuatan yang dilakukan juga sebagai hasil dari keputusan mental/sikap yang belum dewasa, sehingga dalam kondisi yang belum dewasa dan masih labil ini perbuatan yang dilakukan meski dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, maka pertanggungjawabannya juga tidak penuh.

Namun demikian, disatu sisi terkadang juga dinilai tidak adil karena perbuatan yang dilakukan atau bahkan tindak pidana yang dilakukan telah menimbulkan dampak/akibat sebagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Atau lebih jelasnya sifat bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku anak-anak sama dengan sifat bahaya yang dilakukan oleh orang dewasa namun demikian hukumannya berbeda.

Dengan pemahaman yang sekilas, memang terasa tidak adil, namun demikian bila dipahami secara mendalam justru tidak adil ketika seorang anak yang melakukan tindak pidana dipidana sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, karena anak-anak secara psikososial belum memiliki kedewasaan. Ketidaktahuan anak untuk

mengetahui apa yang dimaksud dengan psikotropika, dampak dan akibat bila digunakan.

Kenyataan menunjukkan ketika seorang anak suatu Sekolah Dasar yang diiming-imingi untuk membeli permen coklat dengan harga tertentu, kemudian mendatangkan ketagihan terhadap diri si anak untuk terus membeli permen coklat tersebut yang ternyata telah dicampuri dengan psikotropika. Hal tersebut bisa terjadi karena tidak adanya sosialisasi terhadap psikotropika, dampak dan sanksi hukum terhadap si pemakai ataupun pengedar, yang dilakukan di sekolah-sekolah (TK, SD, SMP, SLTA maupun Perguruan Tinggi).

b. Pelaku Sebagai Korban.

Ungkapan ini terasa membingungkan dan sulit untuk dipahami. Bagaimana mungkin pelaku kejahatan juga dianggap sebagai korban dari kejahatan itu sendiri. Lebih-lebih apabila dikaitkan dengan akibat lebih lanjut dari adanya tindak pidana anak/kejahatan itu sendiri, yang berupa pemidanaan/penjatuhan pidana. Pelaku kejahatan sudah selayaknya mendapatkan pemidanaan, sedangkan bagi korban/masyarakat mendapatkan perlindungan.

Dengan demikian apabila pelaku juga sekaligus sebagai korban, berarti pelaku juga harus mendapatkan perlindungan.

Fenomena pelaku sekaligus sebagai korban ini memang tidak sekaligus berlaku bagi setiap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak. Namun demikian meski tidak setiap pelaku kejahatan sebagai korban, kasus ini sering dijumpai di masyarakat terutama di depan persidangan.

Dikaitkan dengan pasal 59 ayat 1 huruf c (mengedarkan psikotropika golongan I), huruf e (memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I) UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, tidak membedakan antara mengedarkan, memiliki, menyimpan atau membawa psikotropika golongan I, dimana pelakunya adalah anak-anak atau dibawah 18 tahun.

Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa usia anak-anak adalah usia dimana tingkat pertumbuhan mentalnya belum matang, atau belum dewasa. Pada saat seseorang belum dewasa mentalnya, maka sikap atau keputusan yang diambil untuk melakukan sesuatu dalam hal ini melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 59 (1) huruf c dan e UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tidak didasari atas keputusan yang matang/dewasa.

Tindakan yang diambil tanpa disadari oleh pertimbangan akan akibat yang dapat ditimbulkan atas perbuatannya baik akibat terhadap pelaku sendiri maupun akibat lebih lanjut dari perbuatannya yang dapat merugikan orang lain.

Kesadaran akan kemungkinan yang dapat ditimbulkan sebagai akibat dari perbuatannya belum sepenuhnya dipikirkan atau disadari.

Secara umum antara perbuatan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan baik terhadap diri sendiri maupun orang lain/masyarakat dapat digambarkan/dikelompokkan sebagai berikut:

1). Menimbulkan dampak pada orang lain.

Bahwa perbuatan yang dapat menimbulkan dampak pada orang lain yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah mengedarkan psikotropika (pasal 59 ayat (1) huruf c).

Dengan adanya perbuatan mengedarkan psikotropika sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut berarti akan menambah deretan jumlah

penyalahgunaan psikotropika, karena dengan diedarkannya psikotropika berarti akan ada pihak lain yang menerima baik dengan cara membeli atau dengan cara lain yang pada saat yang bersamaan terhadapnya dapat dikenakan pidana.

Apabila terhadap peredaran tersebut, ternyata diedarkan lagi, maka daftar pelaku penyalahgunaan psikotropika tersebut akan semakin panjang yang tidak terprediksi kapan berhentinya.

Terhadap peredaran psikotropika tersebut, akan terhenti ketika dikonsumsi. Mata rantai akan terhenti pada pemakai. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa akibat yang ditimbulkan dari peredaran psikotropika ini terhenti, namun demikian bisa juga akibat tersebut berkembang/berubah wujud dalam bentuknya yang lain.

Sebagai contoh ketika peredaran psikotropika tersebut sampai pada pengguna, maka pengguna dapat saja karena terpengaruh psikotropika sebagaimana sifat dari psikotropika yang dapat mempengaruhi

bekerjanya susunan syaraf otak menjadikan pemakai tidak mampu mengontrol emosinya, sehingga melakukan tindak pidana lain. Apalagi yang mengkonsumsi psikotropika tersebut adalah anak-anak, yang secara psikologis mentalnya belum dewasa. Belum lagi sebagai akibat dari ketergantungan psikotropika, ketika akan mendapatkan psikotropika sudah dilakukan dengan cara yang melawan hukum misalnya dengan melakukan kejahatan lain.

Dengan demikian penyalahgunaan psikotropika akan berdampak pada orang lain tanpa dapat diprediksi kapan akibat tersebut akan terhenti. Seolah-olah sebagai suatu lingkaran setan.

## 2). Dampak pada diri sendiri.

Organisasi PBB tentang Kesehatan *World Health Organization* (WHO) pernah mengingatkan akibat dari penyalahgunaan Psikotropika sebagai berikut:

- a). an over powering desire or need (compulsion) to continue taking the drug to obtain it by any means;

- b). a tendency to increase the dose;
- c). a physisic (psychological) and generally a physical dependence on the effects of the drug;
- d). an effect detrimental to the individual and to society.<sup>18</sup>

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 59 ayat (1) huruf a atau huruf e yang akhirnya juga dikonsumsi, selain perbuatan tersebut diancam pidana maka dengan mengkonsumsi psikotropika sebagaimana sifat dari psikotropika dapat merusak sel-sel syaraf otak, pengguna akan kehilangan kesadaran-kesadaran tertentu yang dapat mempengaruhi pada perilaku yang dilakukan.

Pengaruh yang dapat ditimbulkan oleh psikotropika tersebut akan semakin besar ketika yang mengkonsumsi adalah anak-anak, karena anak-anak belum mencapai kematangan pertumbuhan mentalnya.

Tingkat pertumbuhan mental yang belum dewasa ditambah dengan dampak negatif

---

<sup>18</sup> Edwin M. Schur, 1990, *Crime Without Victims*, New Jersey, Prentice Hall, hal. 122.

psikotropika akan semakin berpengaruh buruk terhadap perilaku sosial anak.

Perbuatan-perbuatan yang kurang terkontrol sebagai akibat pengaruh psikotropika cenderung berlanjut pada perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat.

Dengan demikian mengkonsumsi psikotropika selain dapat menimbulkan akibat yang dilarang, juga dapat menimbulkan/ berpotensi menimbulkan tindak pidana lain.

Memperhatikan dampak yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan psikotropika baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, ketika pelakunya anak-anak maka belum sepenuhnya menyadari akibat apa yang dapat ditimbulkan oleh karena perbuatannya itu, serta belum sepenuhnya mengetahui konsekuensi dari perbuatannya itu sendiri.

Dengan dasar pemikiran yang demikian tidak berlebihan kiranya, ketika pelaku penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak juga sebagai korban dari kejahatan itu sendiri.

Pernyataan bahwa pelaku penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak dikategorikan sebagai korban ini mungkin dianggap berlebihan, namun demikian apabila dilihat realitas yang menunjukkan bahwa anak-anak sejalan dengan statusnya yang belum dewasa tidak dapat mengentaskan dirinya sendiri dari penyalahgunaan psikotropika. Mereka tidak dapat memberi kesadaran pada dirinya sendiri tentang penyalahgunaan psikotropika ini. Lebih dari itu, anak-anak yang terjebak dalam penyalahgunaan psikotropika, dalam hal dijatuhi pidana, sudah barang tentu akan tersita bagian dari waktu perkembangan phisik dan mentalnya dari pertumbuhan yang sehat.

Disamping itu biasanya mereka tidak dapat diharapkan lagi, mengingat secara fisik dan mental sudah terkena dampak negatif psikotropika. Dan yang lebih penting dari itu ketidak-berdayaan ini juga berkaitan dengan status mereka yaitu sebagai anak-anak.

Namun demikian tidak setiap pelaku penyalahgunaan psikotropika dapat dikategori-

kan sebagai korban, karena banyak pula pelaku penyalahgunaan psikotropika, meskipun usianya masih tergolong anak-anak, tetapi secara psikis yang bersangkutan sudah dewasa. Hal ini dapat dilihat dengan modus operandi yang dilakukan serta perulangan perbuatan yang sama sebelumnya.

c. Pelaku sebagai korban Sistem Peradilan Pidana.

Untuk dapat memahami makna pelaku sebagai korban dari Sistem Peradilan Pidana (SPP), sama sulitnya dengan usaha untuk memahami pelaku sebagai korban kejahatan.

Namun demikian kesulitan tersebut akan terhenti ketika kita dihadapkan pada suatu realitas dalam bekerjanya penegakan hukum khususnya terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa dalam beberapa dekade terakhir ini telah terjadi pergeseran atau setidaknya perluasan perhatian kriminologi. Masalah sentral yang menjadi pusat perhatian bukan lagi pada sebab-sebab mengapa seseorang melakukan kejahatan

sedangkan yang lain tidak, tetapi mengapa perbuatan seseorang ditetapkan sebagai suatu kejahatan sedangkan yang lain tidak.<sup>19</sup>

Dengan kata lain, ada pergeseran pusat perhatian dari si pelanggar atau pelaku kejahatan ke sistem peradilan pidana dan keterkaitan antara persepsi mengenai kejahatan, penyelenggaraan hukum pidana dan masyarakat pada umumnya.<sup>20</sup>

Kalau memang SPP telah mendapatkan sorotan, bahwa ada kemungkinan SPP sendiri menjadi faktor kriminogen, maka dengan sendirinya SPP dapat dianggap sebagai salah satu sumber permasalahan. SPP tidak sekedar dilihat sebagai "social problem" yang sama dengan kejahatan itu sendiri.<sup>21</sup> Bahkan tidak jarang dijumpai bahwa orang menjadi jahat karena masalah "stigma" atau "dinyatakan" jahat oleh SPP, meskipun belum tentu yang bersangkutan benar-benar penjahat.

Sehubungan dengan hal tersebut tidak berlebihan kiranya bila dikatakan bahwa,

---

<sup>19</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Terori-teori Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung 1992, hal. 195.

<sup>20</sup> Clayton A. Hertjen, dalam Muladi dan Barda Nawawie Arief, *Ibid*.



"every element of the criminal justice (in Amerika) has come under harsh criticism".<sup>22</sup>

Stephan Quensel dalam "The International Congress on Criminology" di Humburg 1988 mengemukakan adanya krisis di bidang politik kriminal yang berhubungan erat dengan krisis di bidang Sistem Peradilan Pidana. Lebih lanjut dikemukakan bahwa, dimensi yang jelas dari krisis SPP terlihat pada masih berkembangnya "contra productivity", yaitu timbulnya akibat-akibat yang berlawanan (dari yang diharapkan) antara lain peningkatan kejahatan yang tersembunyi dan usaha mengintensifkan pengejaran penjahat mengundang timbulnya strategi kontra yang bersifat mafia dan case quick, inilah yang menyebabkan SPP sendiri menjadi suatu "social problem".

Fenomena korban Sistem Peradilan Pidana (SPP) ini secara garis besar dapat dilihat dalam 2 segi, yaitu:

---

<sup>21</sup> Ibid. hal. 195-196.

<sup>22</sup> Ibid. hal 197.

- 1). Akibat dari penyimpangan aparat penegak hukum.

Kalau kita kembali pada logika berpikir yang sederhana, pada dasarnya SPP bekerja dalam suatu mekanisme yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang. Dengan demikian bekerjanya SPP pada hakekatnya adalah proses penegakan hukum pidana. Oleh sebab itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana "*in abstracto*" yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum "*in concreto*".<sup>23</sup>

Bekerjanya penegakan hukum dalam upaya pemberantasan terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak melibatkan berbagai komponen yakni pada tahap penyidikan, tahap penuntutan hingga tahap persidangan di pengadilan.

---

<sup>23</sup> Ibid. hal. 198.

tidak mandiri karena semua putusan tergantung kebijaksanaan pimpinan di atasnya, yang tidak berhadapan langsung dengan terdakwa atau hal-hal lain di lapangan selama persidangan tersebut berjalan.

Hakim sendiri dalam memutus suatu perkara juga tidak terlepas dari tekanan-tekanan berbagai pihak yang berusaha mempengaruhi proses bekerjanya penegakan hukum, antara lain : keluarga terdakwa sendiri yang memohon putusan seringan-ringannya bahkan kalau bisa diputus bebas, masyarakat yang awam hukum yang berkepentingan (interrest) minta hukuman setinggi-tingginya terhadap terdakwa anak yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika. Dalam praktek hal tersebut tentu mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan seadil-adilnya.

## 2). Akibat Penegakan Hukum itu sendiri.

Pelaku tindak pidana menjadi korban sebagai akibat dari penegakan hukum itu

sendiri. Ungkapan ini juga sulit untuk dimaknai, bahkan terasa berlebihan, namun demikian dalam kajian kriminologis sebagaimana kini telah mengalami pergeseran pusat perhatiannya, maka tidaklah mengada-ada. SPP yang dalam bekerjanya melibatkan aparaturnya penegak hukum tentu saja berada dalam bingkai atau kerangka peraturan perundang-undangan untuk menjalankan tugas dan kewenangannya, namun demikian tidak selamanya dengan bekerjanya SPP itu (meski tidak ada penyimpangan) berarti tidak menimbulkan masalah di dalamnya.

Kurang baiknya kondisi Undang-undang sebagai salah-satu faktor timbulnya kejahatan antara lain dikemukakan oleh J.E. Sahetapy disamping juga pelaksanaan Undang Undang yang tidak konsekuen dan sikap atau tindak-tanduk dari para penegak hukum.

Wolf Middendorf menyatakan bahwa keseluruhan efektivitas peradilan pidana tergantung pada tiga faktor, yaitu adanya

Undang-undang yang baik (*good legislation*); pelaksanaan yang cepat dan pasti (*quick and certain enforcement*); serta pemidanaan yang layak dan seragam (*moderate and uniform sentencing*).

Secara psikologis, masa anak-anak adalah suatu tahap dalam perjalanan hidup manusia yang harus dilalui sebelum berangkat dewasa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara hukum anak-anak dianggap belum dewasa sehingga pertanggungjawabannya dalam hal melakukan suatu tindak pidana juga masih mendapatkan kekhususan. Hal ini tidak lain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan anak sebagaimana yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Dalam kondisi mental yang belum dewasa, maka dapat dipahami bila perbuatan yang dilakukan juga sebagai hasil dari keputusan mental/sikap yang belum dewasa, sehingga dalam kondisi yang belum dewasa dan masih labil ini, perbuatan yang dilakukan meski dikategorikan sebagai

penuntutan seorang Jaksa Penuntut Umum tidak mandiri karena semua putusan tergantung kebijaksanaan pimpinan di atasnya, yang tidak berhadapan langsung dengan terdakwa atau hal-hal lain di lapangan selama persidangan tersebut berjalan.

Hakim sendiri dalam memutus suatu perkara juga tidak terlepas dari tekanan-tekanan berbagai pihak yang berusaha mempengaruhi proses bekerjanya penegakan hukum, antara lain : keluarga terdakwa sendiri yang memohon putusan seringan-ringannya bahkan kalau bisa diputus bebas, masyarakat yang awam hukum yang berkepentingan (interrest) minta hukuman setinggi-tingginya terhadap terdakwa anak yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika. Dalam praktek hal tersebut tentu mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan seadil-adilnya.

2). Akibat Penegakan Hukum itu sendiri.

Pelaku tindak pidana menjadi korban sebagai akibat dari penegakan hukum itu sendiri. Ungkapan ini juga sulit untuk dimaknai, bahkan terasa berlebihan, namun demikian dalam kajian kriminologis sebagaimana kini telah mengalami pergeseran pusat perhatiannya, maka tidaklah mengada-ada. SPP yang dalam bekerjanya melibatkan aparaturnya penegak hukum tentu saja berada dalam bingkai atau kerangka peraturan perundang-undangan untuk menjalankan tugas dan kewenangannya, namun demikian tidak selamanya dengan bekerjanya SPP itu (meski tidak ada penyimpangan) berarti tidak menimbulkan masalah di dalamnya.

Kurang baiknya kondisi Undang-undang sebagai salah-satu faktor timbulnya kejahatan antara lain dikemukakan oleh J.E. Sahetapy disamping juga pelaksanaan Undang Undang yang tidak konsekuen dan sikap atau tindak-tanduk dari para penegak hukum.

Wolf Middendorf menyatakan bahwa keseluruhan efektivitas peradilan pidana tergantung pada tiga faktor, yaitu adanya Undang-undang yang baik (*good legislation*); pelaksanaan yang cepat dan pasti (*quick and certain enforcement*); serta pemidanaan yang layak dan seragam (*moderate and uniform sentencing*).

Secara psikologis, masa anak-anak adalah suatu tahap dalam perjalanan hidup manusia yang harus dilalui sebelum berangkat dewasa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara hukum anak-anak dianggap belum dewasa sehingga pertanggungjawabannya dalam hal melakukan suatu tindak pidana juga masih mendapatkan kekhususan. Hal ini tidak lain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan anak sebagaimana yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Dalam kondisi mental yang belum dewasa, maka dapat dipahami bila perbuatan yang dilakukan juga sebagai hasil dari keputusan mental/sikap yang belum dewasa,



sehingga dalam kondisi yang belum dewasa dan masih labil ini, perbuatan yang dilakukan meski dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, maka pertanggungjawabannya juga tidak penuh.

Namun demikian, disatu sisi terkadang juga dinilai tidak adil karena perbuatan yang dilakukan atau bahkan tindak pidana yang dilakukan telah menimbulkan dampak/akibat sebagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Atau lebih jelasnya sifat bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku anak-anak sama dengan sifat bahanya yang dilakukan oleh orang dewasa namun demikian hukumannya berbeda.

Dengan pemahaman yang sekilas, memang terasa tidak adil, namun demikian bila dipahami secara mendalam justru tidak adil ketika seorang anak yang melakukan tindak pidana dipidana sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, karena anak-anak secara psikososial belum memiliki kedewasaan.

Ketidaktahuan anak untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan psikotropika, dampak dan akibat bila digunakan. Di sekolah-sekolah (baik TK, SD, SMP maupun Perguruan Tinggi) yang ada di Kotamadia Semarang sendiri penyuluhan hukum mengenai psikotropika, dampak serta akibat yang ditimbulkannya, belum dilaksanakan.

Dilihat dari sudut perundang-undangan, UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika memiliki kekhususan, persoalan kemudian muncul, karena dalam ketentuan pasal 59 UU No. 5 Tahun 1997 tersebut terdapat ancaman pidana minimum yaitu 4 (empat) tahun. Jadi secara umum, apabila melakukan penyalahgunaan psikotropika selain golongan I tidak akan diterapkan pasal ini, namun demikian apabila penyalahgunaan psikotropika dimana barang buktinya adalah golongan I, maka akan dikenakan pasal 59 ini.

Ancaman pidana minimum ini selain diluar konteks aturan umum KUHP yang tidak mengenal ancaman minimum, timbul persoalan

karena terhadap penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan oleh anak-anak, berdasarkan ketentuan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Hakim dalam menjatuhkan pidana tidak boleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  dari ancaman hukuman maksimum, bagaimana halnya dengan adanya ancaman pidana minimum. Terhadap Jaksa Penuntut Umum belum ada pedoman untuk menuntut, apakah dengan ancaman minimum 4 (empat) tahun berarti dengan sendirinya akan berlaku bagi penuntutan untuk tidak boleh menuntut dibawah 2 tahun.

#### C. Persepsi Penegak Hukum Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika di Kalangan Anak-anak.

Proses pembentukan "pengetahuan" masyarakat terhadap hukum tidak selalu dimulai dengan membaca Undang-undang. Demikian juga dengan pengetahuan masyarakat terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak, tidak harus dimulai dengan mengikuti setiap tahap pemeriksaan dari penyidikan hingga persidangan di Pengadilan.

Pemberitaan tentang penangkapan mahasiswa-mahasiswa suatu Perguruan Tinggi yang sedang menggunakan psikotropika di diskotik, pelajar Sekolah Dasar yang ketagihan membeli permen coklat yang dijual di sekolahannya yang ternyata telah dicampuri dengan psikotropika, atau pelajar-pelajar SMP maupun SMU yang tengah mengadakan transaksi psikotropika di sekolahannya, serta berita-berita lain yang dilangsir oleh berbagai media massa baik elektronik maupun cetak. Sajian-sajian tersebut telah berhasil memberikan transfer informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi tahu tentang penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika.

Namun demikian, masyarakat tidak mengetahui secara keseluruhan bagaimana proses yang terjadi sebenarnya. Karena memang tidak sederhana proses yang dilalui. Bahkan juga tidak sedikit yang ditutup-tutupi karena memang tidak terjangkau oleh pers sebagai suatu fakta yang tersembunyi.

Lain halnya dengan penegak hukum, pengetahuan "masyarakat" penegak hukum tentu saja berbeda dengan masyarakat pada umumnya, karena tentunya para penegak hukum lebih "melek" hukum.

Berkaitan dengan pengetahuan hukum, dari penegak hukum ini (dalam berbagai variasinya) menjadikan persepsi penegak hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika terlihat lebih komprehensif. Sehingga dapat memahami tentang penyalahgunaan psikotropika, tanpa suatu ajustment terlebih dahulu.

Meskipun demikian, tidak semua penegak hukum memiliki persepsi yang sama. Namun demikian yang berbicara/berperan ketika penegak hukum menjalankan tugasnya dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak, tidak hanya masalah "pengetahuan hukum", tetapi juga masalah hati nurani, keberanian bersikap, birokrasi yang mempengaruhi, serta kepentingan-kepentingan yang melingkupinya.

Meski juga ada yang menjalankan tugas sebagaimana apa yang digariskan dalam undang-undang, tetapi sebenarnya hal ini bertentangan dengan rasa keadilan. Namun demikian karena undang-undangnya menyatakan demikian, dan berarti tidak cukup memberikan ruang gerak untuk bertindak sebagaimana hati nuraninya, maka yang bersangkutan tidak dapat berbuat apa-apa.

Berikut adalah beberapa pendapat yang mempresentasikan sebagian dari penegak hukum khususnya Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang. Pilihan dijatuhkan kepada Jaksa karena Jaksa merupakan titik pertemuan antara Penyidik dan Hakim. Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Polisi dan Hakim dapat terdeteksi dari Jaksa.

1. Armansyah, SH, menyatakan bahwa ancaman pidana minimum terhadap penyalahgunaan psikotropika golongan I, sangat tidak adil. Karena tidak mempertimbangkan jumlah barang bukti yang disita dari terdakwa. Sehingga terdakwa yang barang buktinya hanya 1 butir bahkan setengah butir psikotropika golongan I sama dengan mereka yang kedapatan memiliki 100 butir atau bahkan ribuan psikotropika golongan I.<sup>9</sup>
2. Syafwan A. Rachman, SH, mengatakan bahwa dengan tidak membedakan antara memiliki, menyimpan atau mengedarkan psikotropika golongan I, dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya terdakwa, karena antara pengedar dan pembeli atau

---

<sup>9</sup> Armansyah, SH, Kepala Kejaksaan Negeri Semarang, dalam wawancara langsung.

mereka yang kedapatan dengan ancaman minimum yang sama.<sup>10</sup>

3. Noerjono, SH, mengatakan bahwa ancaman yang tidak membedakan antara yang menyimpan, mengedarkan psikotropika golongan I dirasa bertentangan dengan rasa keadilan. Bahkan menjadi media bagi penyidik untuk menyalahgunakan kewenangannya dengan semata-mata mengejar target operasi. Hal ini terjadi karena ketika polisi mengadakan rasia, petugas dapat saja membawa psikotropika sendiri untuk memasukkan ke saku tersangka. Dalam kasus seperti ini tersangka tidak akan mampu berbuat apa-apa karena di persidangan yang akan menjadi saksi adalah teman-teman polisi sendiri yang dengan sendirinya akan mendukung rekan sekerjanya. Meskipun terdakwa mengelak di persidangan hakim tetap tidak akan bisa memungkiri ketentuan bahwa syarat minimal pembuktian akan terpenuhi. Disamping itu hakim juga tidak berani membebaskan meski punya keyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah karena tidak ada alasan hukum yang menguatkan keyakinannya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Syafwan A. Rachman, SH, Kasi Pidum Kejari Semarang, dalam wawancara langsung.

<sup>11</sup> Noerjono, SH, Jaksa pada Kejari Semarang yang sering menemui kasus serupa, dalam wawancara langsung

4. Syarifah Nurdjuliana, SH, mengatakan bahwa ancaman hukuman minimum tidak adil bagi terdakwa juga bagi Hakim dan Jaksa karena Jaksa tidak berani menuntut dibawah ancaman pidana minimum dan Hakim tidak berani memutus dibawah ancaman pidana minimum.<sup>12</sup>
5. Istiyas Joni, SH, mengatakan bahwa dengan menangani suatu perkara tindak pidana penyalahgunaan psikotropika berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di tiap-tiap tahap pemeriksaan baik tahap penyidikan, penuntutan dan penjatuhan vonis, berarti penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak sudah dilakukan.<sup>13</sup>

#### D. Kritik terhadap Penegakan Hukum Penyalahgunaan Psikotropika di Kalangan Anak-anak.

Penegakan hukum, sebagai suatu upaya riil dari pemerintah untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan masyarakat, sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Syarifah Nurdjuliana, SH, Jaksa Anak pada Kejari Semarang, dalam wawancara langsung.

<sup>13</sup> Istiyas Joni, SH, Jaksa Anak pada Kejari Semarang, dalam wawancara langsung.



1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan.

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak, juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagaimana disebutkan oleh Soejono Seokanto tersebut.

Tujuan organisasi penegak hukum akan menentukan bagaimana tingkah laku organisasi itu. Oleh karena itu organisasi tersebut harus hidup di tengah-tengah masyarakat sambil melayaninya, maka tujuan itupun lalu berfungsi untuk membawa organisasi sehingga selamat dalam menjalankan tugasnya di tengah-tengah masyarakat. Proses penyesuaian yang demikian itu menimbulkan gejala-gejala yang disebut *goal substitution* dan *goal displacement*. Dalam *goal substitution* maka tujuan formal digantikan oleh kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah yang akan lebih menguntungkan organisasi di satu pihak dan di lain pihak meniadakan sedapat mungkin

OPT-POSTAR-1988

ancaman terhadapnya. Pada goal displacement, tujuan-tujuan organisasi yang sudah diterima dan disetujui ditelantarkan demi untuk tujuan-tujuan yang lain.<sup>14</sup>

Menurut I.S. Susanto, paling tidak ada 4 dimensi yang dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum, yaitu disamping undang-undangnya, maka penegakan hukum secara konkrit melibatkan pelanggaran hukum, di dalam suatu hubungan yang bersifat saling mempengaruhi dan berlangsung dalam wadah struktur, politik, sosial, ekonomi dan budaya pada satu situasi tertentu.<sup>15</sup>

Terhadap penegakan hukum penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak dapat dikemukakan kritik sebagai berikut:

1. Kritik terhadap perundang-undangan.

I.S. Susanto menyatakan bahwa pada dasarnya terhadap Undang Undang itu perlu dikaji tentang substansinya, yakni seberapa jauh cacat yang dimilikinya, seperti kepentingan-kepentingan apa yang ada di balik Undang-undang, siapa atau kelompok masyarakat mana yang akan memperoleh keuntungan/ manfaat lebih besar dari peraturan atau sebaliknya yang akan dirugikan, apakah Undang-

---

<sup>14</sup> Ibid, hal 59.

<sup>15</sup> I.S.Susanto, Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial, Op.Cit, Hal.17.

undang tersebut cukup adil, apakah sanksinya memadahi dan manusiawi dan sebaliknya.<sup>16</sup>

Undang-undang yang terkait langsung dalam hal penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak ini adalah UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika serta UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Memang penentu keberhasilan penegakan hukum tidak hanya terletak pada peraturan perundang-undangannya, tetapi lebih tertumpu pada aparaturnya. Namun demikian ketiga perangkat Undang-undang ini sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Namun demikian sayangnya antara Undang-undang yang satu dengan yang lainnya belum sinkron, sebagai contoh; UU No. 5 Tahun 1997 pasal 59 yang mengatur penyalahgunaan psikotropika golongan I terdapat ketentuan ancaman minimal, sementara dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak dalam hal penjatuhan hukuman terdapat pedoman bagi Hakim yaitu tidak boleh memutus lebih dari setengah ancaman maksimum. Namun

---

<sup>16</sup> I.S.Susanto, Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial, Masalah-masalah Hukum, Majalah FH Undip No.9 Tahun 1992, hal.17

tidak ada pedoman bagi Hakim untuk memutus dengan adanya ancaman minimal tersebut.

## 2. Kritik terhadap penegak hukum.

### a. Penyidik.

Penyidik berdasarkan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP mempunyai keleluasaan untuk membatasi hak-hak tersangka dengan adanya tindakan penangkapan dan penahanan, namun demikian ketika menangani perkara anak dimana UU tentang Peradilan Anak sangat melindungi sisi-sisi kepentingan anak, ternyata kurang mendapatkan perhatian kepentingan anak tersebut. Dengan demikian implementasi perlindungan anak hingga kini belum sepenuhnya terpenuhi, antara lain : pemeriksaan yang dilakukan dengan cara kekerasan untuk mendapatkan pengakuan tersangka terhadap tindak pidana yang disangkakan kepadanya, pemeriksaan dilakukan tanpa didampingi oleh penasehat hukum padahal menurut undang-undang yang ada tersangka anak wajib didampingi oleh penasehat hukum.

b. Jaksa Penuntut Umum.

Dalam menangani perkara anak, Jaksa Penuntut Umum juga kurang memperhatikan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam UU Peradilan Anak.

Jaksa dalam menjalankan tugasnya sebagai Jaksa Penuntut Umum tidak berani mengambil langkah-langkah yang seharusnya diambil demi kepentingan terdakwa anak, hal ini dapat dilihat pada tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Jaksa Penuntut Umum sangat jarang menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana berupa tindakan terhadap terdakwa anak. Tuntutan berupa pemidanaan lebih sering dilakukan. Padahal Balai Pemasyarakatan sering merekomendasikan untuk hal ini.

Ketidakberanian seorang Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut berupa tindakan ini, karena Jaksa Penuntut Umum terikat hukum kelembagaan yang mengikatnya yakni ketidakmandirian seorang Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan tuntutan pidana karena putusan dan segala sesuatunya

harus bergantung dari putusan pimpinan di atasnya.

c. Hakim.

Seperti halnya Jaksa, Hakim juga sering tidak berani memutus terdakwa anak dengan berupa tindakan. Hal ini sering terjadi karena Hakim juga tidak mau repot-repot. Putusan berupa pemidanaan pelaksanaan atau tindak lanjut bagi hakim akan lebih mudah, lagi pula putusan yang dijatuhkan pun relatif ringan. Namun demikian meski pemidanaannya ringan, tetapi dilihat dari tujuan pemasyarakatan terhadap anak hal ini kurang dapat diterima, bahkan dapat terjadi sebaliknya.

d. Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Bahwa rekomendasi dari Bapas sering hanya bersifat formalitas saja, sehingga kurang menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam memutus perkara, disamping itu Petugas Pemasyarakatan dari Bapas kurang aktif dalam mendampingi klien di tiap-tiap tahap pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun penjatuhan vonis.

Di samping itu petugas Bapas kurang mengoptimalkan partisipasi orangtua/wali kliennya sehingga laporan riwayat hidup dari klien hasilnya kurang memadai karena tidak dapat mengambil data yang akurat.

e. Lembaga Pemasyarakatan.

Bahwa hingga ini belum ada lembaga pemasyarakatan anak di Semarang. Selama ini untuk terpidana anak menjadi satu dengan terpidana dewasa yakni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Kedung Pane Mijen Semarang.

3. Kritik Terhadap Fasilitas Pendukung.

Meskipun UU menjamin bahwa dalam setiap tahap pemeriksaan perkara anak, tersangka anak harus mendapatkan jaminan terpenuhinya kebutuhan baik fisik maupun sosial, namun demikian pada kenyataannya jaminan-jaminan tersebut tidak semuanya terpenuhi. Bahkan ketika tahap-tahap tersebut dilalui dengan penyimpangan, maka tidak ada sanksi yang akan dikenakan.

#### 4. Kritik Terhadap Masyarakat.

Bahwa masyarakat sering memberikan stigma negatif terhadap anak-anak yang terjebak pada penyalahgunaan psikotropika yang terhadapnya sedang dikenakan proses pemidanaan, meskipun seorang anak yang sedang dalam proses pemeriksaan belum tentu bersalah.

Di samping itu, masyarakat juga kurang menyadari bahwa pelaku penyalahgunaan psikotropika kadang juga hanya menjadi korban dari Sistem Peradilan Pidana sendiri, sehingga salah besar kiranya bila terhadap mereka diberikan stigma negatif. Perlindungan dan advokasi seharusnya diberikan terhadap mereka, karena bagaimanapun juga setiap anak dapat menjadi korban dari Sistem Peradilan Pidana.



## BAB IV

### P E N U T U P

Akhirnya kita sampai pada bagian akhir dari penulisan ini berupa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan.

1. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak, memiliki kekhususan bila dibandingkan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana psikotropika yang pelakunya dewasa. Kekhususan ini berkaitan dengan status pelaku tindak pidana yang masih anak-anak. Status anak-anak membawa konsekuensi pada perbedaan-perbedaan pada hukum acara dan pemidanaan, antara lain :

- Untuk dapat menangani perkara anak baik sebagai penyidik, Penuntut Umum, maupun Hakim yang menyidangkan perkara anak harus memiliki kualifikasi sebagai penyidik Anak, Penuntut Umum Anak dan Hakim Anak.
- Dalam setiap tahap pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan, tersangka dan terdakwa anak harus didampingi oleh Petugas Pemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Anak. Petugas Pemasyarakatan ini bertugas untuk

memperlancar tugas penyidik, Penuntut Umum dan Hakim baik di dalam maupun di luar sidang dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

- Tata cara persidangan anak di mana sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan Jaksa Penuntut Umum serta Hakim tidak diperbolehkan mengenakan seragam dinas maupun toga.
- Masa penahanan terhadap anak pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan adalah setengah dari pelaku dewasa.
- Hakim juga tidak boleh memutus lebih dari setengah dari ancaman pidana.
- Terpidana anak harus dimasukkan dalam lembaga pemasyarakatan anak terpisah dari terpidana dewasa.

2. Birokrasi yang terlibat dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak, pada prinsipnya sama dengan birokrasi yang menangani pelaku dewasa. Hanya saja harus melibatkan Petugas Pemasyarakatan dalam setiap tahap pemeriksaan serta setelah terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terpidana anak dimasukkan dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak.

3. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak

adalah menyangkut penerapan hukum. Penerapan hukum yang dimaksudkan di sini adalah kesulitan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut dan Hakim untuk memutus ketika terdakwa anak didakwakan dengan pasal UU psikotropika golongan I yang mengatur tentang ancaman minimum. Padahal dalam UU Peradilan Anak hanya diatur tentang Hakim tidak boleh memutus lebih dari setengah dari ancaman maksimum, sedangkan bagi Jaksa penuntut Umum tidak ada pedomannya dalam melakukan tuntutan pidana. Disamping itu juga terdapat persoalan yang menyangkut dengan status dari anak. Dilihat dari perkembangan psikologis, maka anak dikategorikan belum dewasa, sehingga belum mampu mengambil tindakan atau keputusan yang didasarkan atas pertimbangan yang matang, sehingga ketika anak terlibat dalam kejahatan psikotropika, maka tidak seluruhnya mereka memahami resiko atau akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, sehingga tidak sedikit pelaku tindak pidana psikotropika di kalangan anak-anak ini hanyalah korban dari ketidaktahuannya. Terhadap pelaku yang demikian, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan salah satunya adalah untuk pemasyarakatan, padahal secara psikologis anak masih dalam masa pertumbuhan, maka menjadi persoalan besar bila dijatuhi dengan

hukuman pidana yang lama atau hukuman pidana yang disamakan dengan pelaku dewasa. Sementara ancaman pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana psikotropika relatif tinggi.

4. Kritik terhadap penegakan hukum penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak adalah:

a. Kritik terhadap Perundang-undangan.

Antara peraturan perundang-undangan yakni UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dengan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika belum ada kesesuaian khususnya menyangkut pedoman pemidanaannya.

b. Kritik terhadap Penegak Hukum.

Penyidik Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, Bapas dan Lembaga Pemasyarakatan Anak belum sepenuhnya memperhatikan tentang perlunya perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di bidang psikotropika.

c. Kritik terhadap Fasilitas Pendukung.

Belum terpenuhinya fasilitas pendukung sebagai media untuk memenuhi kebutuhan fisik maupun sosial, yang merupakan jaminan perlindungan terhadap kepentingan anak.

d. Kritik terhadap masyarakat.

Masyarakat sering memberikan stigma negatif terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak, padahal mereka sebenarnya juga menjadi bagian dari korban, karena secara psikologis anak belum dapat memperhitungkan sifat bahaya dari perbuatan yang dilakukan, di sisi lain KUHAP mengenal asas praduga tak bersalah bagi tersangka/terdakwa sebelum jatuh vonis oleh hakim atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

5. Persepsi Penegak hukum tentang penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak lebih banyak menyoroti pada keterbatasan Undang-undang yang kurang memperhatikan kepentingan masa depan anak. Namun demikian para penegak hukum merasa tidak dapat berbuat banyak mengingat ketentuan-ketentuan organisatoris yang membelenggu.

B. Saran.

1. Mekanisme bekerjanya birokrasi penegak hukum dalam menangani penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak masih perlu dibenahi yaitu dengan diberlakukannya suatu sanksi yang tegas yang diatur secara khusus dalam suatu undang-undang bagi aparat

penegak hukum yang dalam melakukan tugasnya tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam tiap tahap pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan tidak akan terjadi lagi.

2. Keterlibatan institusi Balai Pemasyarakatan selama ini kurang aktif, seolah-olah hanya melengkapi persyaratan formal saja, sehingga perlu pembenahan agar dapat berjalan efektif dan kepentingan anak dapat terlindungi. Hal ini dapat ditempuh dengan cara hadirnya petugas Bapas dalam setiap tahap pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan penjatuhan vonis oleh hakim, sehingga implementasi perlindungan anak dapat tercapai. Di samping itu, institusi Bapas perlu meningkatkan hubungan koordinasi yang harmonis dengan instansi yang terkait dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak, di samping itu juga partisipasi orangtua/wali pelaku kejahatan anak perlu dioptimalkan, sehingga kendala-kendala di lapangan seperti kesulitan mencari data dan informasi mengenai pelaku anak dapat diatasi, dengan demikian petugas Bapas pun tidak akan selalu terlambat dalam memberikan laporan mengenai riwayat

hidup pelaku kejahatan anak kepada penyidik, jaksa ataupun hakim.

3. Sehubungan dengan kendala dan persoalan yang lebih disebabkan oleh keterbatasan perundang-undangan, maka keberadaan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak seharusnya lebih disempurnakan, antara lain dengan cara : disesuaikan isi pasal yang mengatur masalah penerapan hukum yang dijadikan pedoman bagi Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan tuntutan pidana dan Hakim dalam menjatuhkan putusan, karena antara kedua undang-undang tersebut di atas belum ada sinkronisasi mengenai masalah penerapan hukum, di samping itu perlu disosialisasikan keberadaan kedua undang-undang tersebut di kalangan masyarakat yang masih awam hukum dan di sekolah-sekolah melalui kegiatan penyuluhan hukum.

4. Perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi aparat penegak hukum khususnya dalam pemahaman terhadap aspek-aspek psikologis anak dikaitkan dengan kemungkinan-kemungkinan yang dapat ditimbulkan sebagai akibat dari tindakan atau kebijakan hukum yang diambil. Hal ini bisa ditempuh melalui diberikannya kesempatan belajar ke tingkat pendidikan yang lebih

tinggi baik di dalam maupun di luar negeri, diadakannya forum diskusi/seminar/lokakarya antara praktisi pendidikan dan birokrasi yang terkait langsung dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak.

5. Keberagaman persepsi penegak hukum, sudah saathya diakomodir dalam rangka penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman dalam penanganan perkara terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak. Hal ini dapat ditempuh dengan cara memberikan sumbangsih kepada badan pembuat undang-undang yang merupakan wakil rakyat, berupa pemikiran, pendapat dan pandangan terhadap keberadaan undang-undang yang terkait dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak, ternyata dalam praktek menimbulkan persoalan mengenai penerapan hukumnya.



#### DAFTAR PUSTAKA

- Alan, Coffey et.al. *An Introduction to The Criminal Justice System an Proses*, Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Albrow, Martin, *Birokrasi*, terjemahan, M. Rusli Karim dan Totok Daryanto, cet. Ke-III, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1996.
- Alkostar, *Negara Tanpa Hukum, Catatan Pengacara Jalanan*, Pustaka Pelajar, 2000.
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, CV. Ananta, Semarang, 1994
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya, Bandung 1996.
- , *Pokok-Pokok Pikiran Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka*, Bahan Masukan Untuk Laporan Akhir Tim Pakar Departemen Kehakiman, Periode 1998/1999.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisianisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996.
- Bawengan, GW, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interograsi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- , *Hukum Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Black, James A & Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, PT. Eresco, Bandung, 1992.
- Blau, Peter M, dan Meyer Marshal W, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, Edisi ke-II UI-Press, 1987. Bur Rasuanto, *Modernisasi Masalah Model-Model*

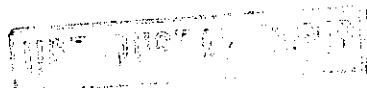
- Pembangunan, Yayasan Ilmu- Ilmu Sosial, Rajawali Pers, 1980.
- Craib, Ian, *Teori-teori Sosial Modern dari Parson sampai Habermas*, (terjemahan), Rajawali Press, Jakarta Cetakan ke-1, 1986.
- D. Stanley, Eitsen, *Crime and Justice, Social Problem*, Allyn and Bacon Inc, 1986.
- Deborah A, Redman, *Economic and The Philosophy of Social Science*, New York, Oxford University Press, 1991.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Filsafat Hukum Dalam Konsepsi dan Analisa*, Alumni, Bandung, 1984.
- , *SPP Dalam Perspektif Perbandingan*, Rajawali, Jakarta, 1984.
- , *Fungsi Perundang-undangan Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Disertasi.
- Don C, Gibbon, *Society, Crime and Criminal Behaviour*, Prentice Hall, Englewood, New Jersey, 1992.
- Duverger, Maurice, *Sosiologi Politik*, terjemahan Daniel Dhakidze, Yayasan Ilmu Sosial, 1985.
- , *Teori dan Praktek Tata Negara*, Terjemahan Suwirjadi, PT. Pustakawan Rakyat, Jakarta, 1967.
- Erich, Goode, *Deviant Behaviour*, Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, 1989.
- Etzioni, Amitai, *Organisasi-organisasi modern* (terjemahan) Suryatin, UI-Press, Jakarta, 1985.
- Faisal, Sanafiah, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang, 1990.
- Frank P, Williams III dan Marlyn D. Mc. Shane, *Criminology Theory*, Prentice Hall, Englewoods Cliffs, New Jersey, 1988.

- Hadisuprpto, Paulus, *Juvenile Delinquency, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- , *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Harahap M, Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid 1, Cetakan ke-3*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993.
- , *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1997.
- Hans Ditter dan Tilman Schiel, *Kelompok-Kelompok Strategis, Studi Perbandingan Tentang Negara, Demokrasi dan Pembentukan Kelas-kelas di Dunia Ketiga*, Terjemahan Aan Efendi, Yayasan Obor, Jakarta, 1990.
- Hoefnagels, G.Peter, *The Other Side of Criminology, An Inversion of The Concept of Crime*, Kluwer-Deventer, Holland, 1973.
- Howard S, Becker, *Outsiders, Studies In The Sociology of Deviance*, The Free Press, New York, 1973.
- Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1991.
- Hawari, Mari *Bersatu Memberantas Bahaya Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika*, PD. Dharma bhakti, Jakarta, 1999.
- Kemal Darmawan, Mohammad, *Polisi dan Masyarakat*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Polisi dan Masyarakat dalam Era Reformasi, Kerjasama FH dan FE UI, 30 Juni 1993.

- Hadisuprpto, Paulus, *Juvenile Delinquency, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997.
- Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- , *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Harahap M, Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid 1, Cetakan ke-3*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993.
- , *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1997.
- Hans Ditter dan Tilman Schiel, *Kelompok-Kelompok Strategis, Studi Perbandingan Tentang Negara, Demokrasi dan Pembentukan Kelas-kelas di Dunia Ketiga*, Terjemahan Aan Efendi, Yayasan Obor, Jakarta, 1990.
- Hoefnagels, G.Peter, *The Other Side of Criminology, An Inversion of The Concept of Crime*, Kluwer-Deventer, Holland, 1973.
- Howard S, Becker, *Outsiders, Studies In The Sociology of Deviance*, The Free Press, New York, 1973.
- Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1991.
- Hawari, *Mari Bersatu Memberantas Bahaya Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika*, PD. Dharma bhakti, Jakarta, 1999.
- Kemal Darmawan, Mohammad, *Polisi dan Masyarakat*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Polisi dan Masyarakat dalam Era Reformasi, Kerjasama FH dan FE UI, 30 Juni 1998.

- , *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994.
- Keraf, Gorys, *Komposisi*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1980.
- Klarke dan Mathew (eds), *Designing Out Crime*, London; HMSO, 1980.
- Lewis LA, Roos MW, *The Gay Dance Party Culture in Sidney, A Qualitative Analysis-J-Homosex*, 1995.
- Manan, Bagir, *Mengkaji Ulang Syariah dan Hukum Menuju Pembangunan Hukum Nasional*, Makalah, 1994.
- Mannaione PF, *Clinical Pharmacology of Drug Dependence*, Piccin Nuova Libraris, SPA, padua, Italy, 1984.
- Michael R, Gottfredson & Travis Hirschi (editor), *Positive Criminology*, Sage Publication, 1987.
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998.
- Nurfaizi, *Megatrend Kriminalitas*, Penerbit Jakarta Citra, Jakarta, 1998.
- P. Leenowers, *Manusia dalam Lingkungan, Refleksi Filsafat tentang Manusia*, diterjemahkan oleh KJ. Veeger, Penerbit Gramedia Jakarta, 1970.
- Philip, Nonet & Philip Selznick, *Law and Society In Transition; Toward Responsive Law*, New York. Harpa & Raw, 1978.
- Prakoso, Djoko, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktek Peradilan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- , *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1987.

- Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997.
- Poloma, Margaret M, *Sosiologi Kontemporer*, Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Yayasan Yasmaga, Edisi I Cetakan ke-4, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Purnianti dan Moh.Kemal Darmawan, *Mashab Dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Qurrah Abu, *Ekstasi Dalam Dua Sistem Hukum*, PT. Golden Terayon Press, Jakarta, 2000.
- Rahardjo, Satjipto, *Manfaat Telaah Sosial Terhadap Hukum*, Pidato Pengukuhan guru Besar Sosiologi Hukum Pada FH UNDIP, Semarang, 13 Desember 1980.
- , *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1980.
- , *Hukum dan Perubahan Sosial*, cetakan ke-II, Alumni Bandung, 1983.
- , *Masalah Penegakan Hukum Suatu tinjauan sosiologis*, Sinar Baru, bandung, 1983.
- , *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, Cetakan ke-4, 1984.
- , *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1997.
- , *Sejarah Ilmu Pengetahuan dan penelitian Sosial*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial pada FH Undip, Semarang, 1999.
- , *Hukum dan Birokrasi*, Masalah-masalah Hukum No. 4 tahun 1989.
- , *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke-4, 1996.



- Rasjidi Lili & B Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mashab dan refleksinya*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998.
- Ronald A. Hardean, et. Al. *Confronting Social Problems*, West Publishing Company, St. Paul New York, 1984.
- Soekanto Soeryono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, cet. Ke-III, 1986.
- , *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Sumitro Ronny Hanitidjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- , *Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik*, CV. Agung, Semarang, 1990.
- , *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung, Cetakan ke I, 1984.
- , *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Surahman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Susanto, I.S. *Birokrasi Yang Humanis*, Makalah, Disampaikan dalam Seminar Sosiologi Hukum dan Konggres I Asosiasi Sosiologi Hukum dan Konggres I Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia, Semarang, 1998.
- , *Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial*, Majalah FH UNDIP No. 9 tahun 1992.
- , *Kriminologi*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1995.
- , *Kejahatan Korporasi*, Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- Toha Miftah, *Perspektif Perilaku Birokrasi*, Cetakan ke-II, CV. Rajawali, 1991.

Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial (Sketsa Penilaian dan Perbandingan)*, Kanisius, Yogyakarta, 1994.

Warassih Esmi, *Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Humaniora*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, FH. UNDIP, Semarang, 1999.

Wignyosoebroto Soetandyo, *Masalah Metodologi dalam Penelitian Hukum Sehubungan Dengan Keragaman Pendekatan Konseptualnya*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial pada FH. UNDIP, Semarang, 1999.

Peraturan Perundang-undangan :

UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan.

UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Fourth United Nations Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders, New York, Department of Economic and Social Affairs, United Nations, 1971.

### Kamus

Kamus Latin-English, Barnes & Noble.

The Dictionary of The Social Science, Aikin, 1964.

Oxford Advanced Learner's Dictionary Of Current English, AS. Hornby, E.V. Gatenby & Wakefield.